



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

**LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)
TAHUN 2013**

Balikpapan Kubangun, Kujaga, Kubela

KATA PENGANTAR

Pergeseran nilai manajemen pemerintahan menjadi manajemen pemerintahan berbasis kinerja, yang berorientasi pada berapa besar kinerja yang dihasilkan dan kinerja tambahan yang diperlukan, agar tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai pada akhir periode perencanaan, mendorong instansi pemerintah untuk mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bukan sekedar formalitas tetapi telah menjadi komitmen.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), merupakan suatu sistem akuntabilitas yang memadai yang dibangun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan program yang diemban setiap instansi pemerintah. Dalam hal ini, setiap instansi pemerintah secara periodik wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi kepada para stakeholders, yang dituangkan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Tahun 2012 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan 2006-2011 serta merupakan tahun kedua kepemimpinan Walikota/Wakil Walikota Balikpapan Periode 2011-2016.

Sinkronisasi, sinergitas dan kesinambungan program kegiatan pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Balikpapan menjadi prioritas dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2011-2016.

Komitmen Pemerintah Kota Balikpapan untuk mewujudkan sebuah tata kelola pemerintahan yang baik berbasis prinsip-prinsip *good governance*, tertuang dalam penyusunan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Balikpapan Tahun 2013. Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Balikpapan Tahun 2013 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan program yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan.

Berikut akan diuraikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Balikpapan Tahun 2013, yang menjabarkan evaluasi dan analisis capaian kinerja serta akuntabilitas keuangan guna menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya yang telah dilakukan dan capaian dari target pada tingkat sasaran program.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Balikpapan Tahun 2013 menggunakan data dan informasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2006-2011.

Dalam rangka penyempurnakan pelaksanaan akuntabilitas kinerja pada waktu yang akan datang, evaluasi terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Balikpapan Tahun 2013 diperlukan.

WALIKOTA BALIKPAPAN



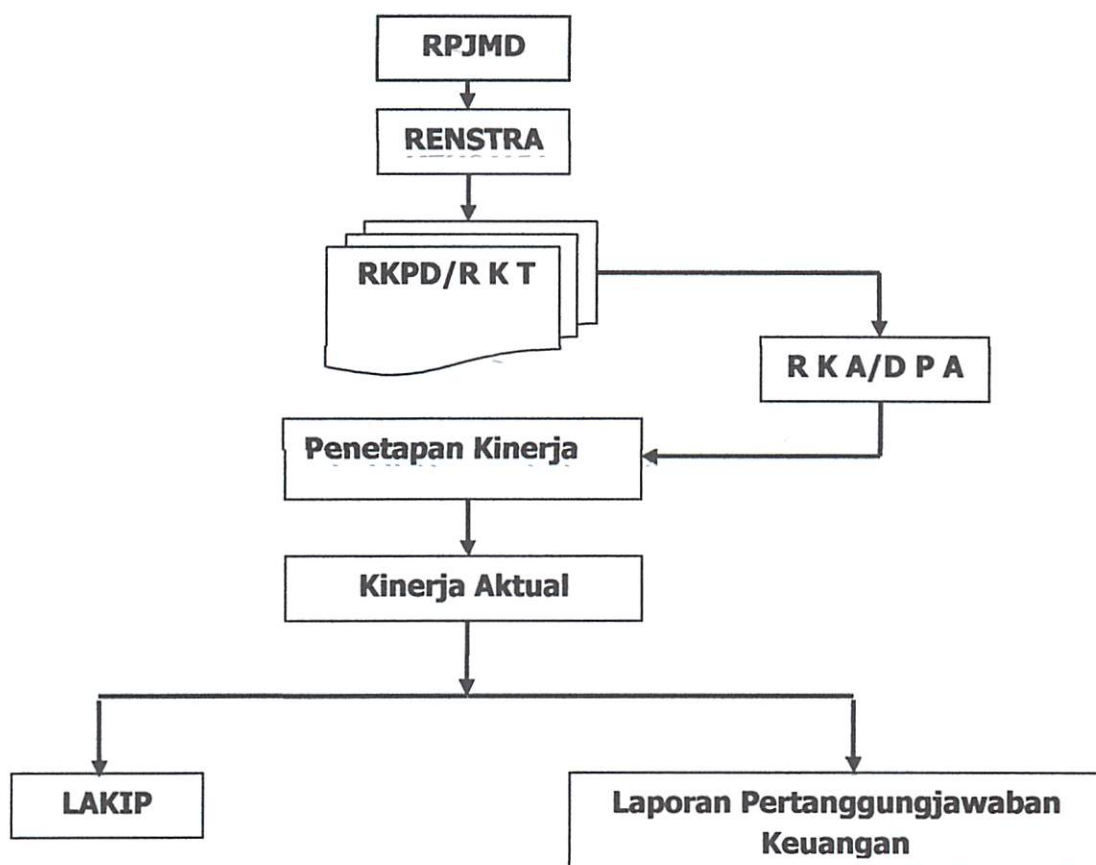
H.M. RIZAL EFFENDI

BALIKPAPAN KABUPATEN, KAWAGA, KUBERA

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) membentuk sistem kerja yang dimulai dari fase perencanaan melalui dokumen RPJMD yang kemudian diderivasikan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Penetapan Kinerja (PK), selanjutnya, fase pengukuran kinerja melalui penggunaan instrument IKU, dan fase pelaporan kinerja yang diwujudkan dalam dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta fase evaluasi dan pemanfaatan informasi kinerja sebagai materi umpan balik formulasi kebijakan.

Proses dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) dapat digambarkan sebagai berikut :



Sumber : Permenpan No. 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kota Balikpapan disusun dengan tujuan memberikan gambaran konkrit mengenai keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan kinerja, yang merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 08 Tahun 2011.

Laporan ini berisi penetapan kinerja dan akuntabilitas kinerja, dimana termasuk didalamnya rencana kinerja tahunan, evaluasi dan analisis capaian kinerja serta akuntabilitas keuangan guna menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya yang telah dilakukan dan tingkat capaian dari target pada tingkat sasaran program. Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 dan mengacu pada Indikator Kinerja Utama, terdapat 47 (empat puluh tujuh) Sasaran Strategis dengan 182 indikator kinerja dalam rangka pencapaian kinerja Pemerintah Kota Balikpapan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 182 indikator sasaran, disimpulkan bahwa :

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KEUANGAN
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas/ mutu pendidikan	93.64	57.71
2	Meningkatnya aksesibilitas memperoleh pendidikan dan meningkatnya pelayanan pendidikan Bagi masyarakat miskin	108	81.87
3	Meningkatnya kualitas tenaga kerja	97,66	55.35

4	Meningkatnya status kesehatan masyarakat	124,45	90.24
5	Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan kesehatan	113	64.15
6.	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan	100	54.32
7.	Meningkatnya kualitas dan prestasi olahraga dan Olahraga Tradisional.	100	87.50
8.	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan agama	81	50.16
9.	Meningkatnya kerukunan intradan antar umat beragama	100	
10.	Meningkatnya kualitas pengelolaan UMKM dan Koperasi	111.96	80.54
11	Meningkatnya kualitas produk UMKM dan Koperasi	75	90.74
12.	Meningkatnya produktivitas Pertanian, Kelautan dan Perikanan	107.1	86.58
13.	Meningkatnya pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin	100	-

14.	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum	100	76.65
15.	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat	100.4	49%
16.	Meningkatnya pelayanan dan perlindungan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	55	48.55
17.	Meningkatnya sistem kewaspadaan dini dan penanggulangan bencana	0	76
18.	Meningkatnya partisipasi pilar masyarakat/relawan dalam penanggulangan bencana	96.8	
19.	Meningkatnya pelayanan administrasi dan perizinan investasi	110.8	71.95
20.	Meningkatnya cakupan layanan persediaan daya listrik kepada masyarakat	100	-
21.	Berkembangnya kawasan industri dan perdagangan yang berwawasan lingkungan	103.7	-
22.	Meningkatnya lapangan usaha dan lapangan kerja	99	73.85
23.	Meningkatnya sumber-sumber pendapatan daerah	117.15	88.87

24.	Meningkatnya Kapasitas institusi penyelenggara pelayanan publik	100	-
25.	Terlaksananya Reformasi Birokrasi	79.81	82.27
26.	Meningkatnya manajemen dan fasilitas perlengkapan jalan	164.4	97.76
27.	Terwujudnya sarana angkutan umum massal	100	-
28.	Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih/ air minum	100	-
29.	Tersedianya sistem jaringan dan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) terpadu	100	-
30.	Berkurangnya titik/ lokasi banjir dan luas wilayah banjir	169	68.04
31.	Meningkatnya kualitas perumahan dikawasan pemukiman kumuh	99.74	96.78
32.	Terwujudnya penyedia hunian vertikal (rusunawa dan rusunami)	100	85.11
33.	Terwujudnya sanitasi sehat yang dapat diakses seluruh lapisan masyarakat	100	86.56

34.	Tersedianya Struktur dan pola ruang yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.	77.66	78.26
35.	Tersedianya Tata ruang pesisir, dan pulau-pulau kecil	101	-
36.	Terkendalinya Pemanfaatan ruang	104.25	59.56
37.	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam program Keluarga Berencana	106	88.15
38.	Meningkatnya pemanfaatan teknologi tepat guna	166.67	80.16
39.	Meningkatnya kemampuan perempuan dalam keluarga dan lingkungan kerja	91.11	25.37
40.	Meningkatnya kualitas anak	90	66.59
41.	Terwujudnya peningkatan pelestarian dan pengembangan kawasan hutan, lahan dan DAS	96.53	76.81
42.	Meningkatnya kebersihan dan keindahan kota	107	80.71
43.	Meningkatnya upaya pelestarian lingkungan hidup melalui pendidikan dan peran serta aktif masyarakat	91.65	77.23

44.	Meningkatnya upaya pelestarian seni dan budaya yang ada di Kota Balikpapan	126.26	58.37
45.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata	84.43	92.73
46.	Berkembangnya usaha-usaha pendukung kepariwisataan	100	91.55

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis terhadap 46 sasaran beserta indikatornya, pencapaian sasaran kinerja Pemerintah Kota Balikpapan menunjukkan trend naik dibandingkan pada tahun 2012 yang merupakan tahun kedua RPJMD. Walau demikian masih terdapat beberapa indikator sasaran yang capaiannya belum seperti diharapkan sehingga harus mendapat perhatian dan peningkatan pada tahun-tahun berikutnya.

WALIKOTA BALIKPAPAN



H.M. RIZAL EFFENDI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. LANDASAN UMUM.....	3
B. MAKSUD DAN TUJUAN.....	7
C. DATA ORGANISASI.....	7
D. SISTEMATIKA PENULISAN	12
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA	
A. GAMBARAN UMUM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA BALIKPAPAN.....	14
1. VISI DAN MISI	15
2. TUJUAN DAN SASARAN	19
3. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU).....	26
B. PENETAPAN KINERJA	40
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. PENGUNGKAPAN AKUNTABILITAS KINERJA	71
B. PENGUNGKAPAN AKUNTABILITAS KEUANGAN	169
C. CAPAIAN PRESTASI DAN PENGHARGAAN	179
BAB IV PENUTUP	201

BAB I

PENDAHULUAN

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas KKN. Perlu diperhatikan pula adanya mekanisme untuk meregulasi akuntabilitas pada setiap instansi pemerintah dan memperkuat peran dan kapasitas parlemen, serta tersedianya akses yang sama pada informasi bagi masyarakat luas.

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi tanggungjawab managerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada setiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali (*controllable activities*) dengan kegiatan yang tidak terkendali (*uncontrollable activities*). Kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti, kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang.

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut, telah

ditetapkan TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Selanjutnya, sebagai kelanjutan dari produk hukum tersebut diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah setiap Pemerintah Daerah (Pejabat Eselon II) diminta untuk menyampaikan kepada Presiden, sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir anggaran.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

LAKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai Kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LAKIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintahan pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat.

Pemerintah Kota Balikpapan berkomitmen untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan program yang diemban sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Balikpapan Tahun 2013.

A. LANDASAN HUKUM

Penyusunan LAKIP Kota Balikpapan Tahun 2013 ditetapkan dan mengacu pada peraturan perundangan, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I di Kalimantan (Lembaran Negara Nomor 72 Tahun 1959);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 jo. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang - Undang No 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
10. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
11. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
12. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
13. Undang - Undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
24. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 No.15);
25. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009-2013; (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009 No.4);
26. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2011-2016.
27. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) Tahun 2010–2014;
28. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia Tahun 2011-2025;

29. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010;
30. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan yang Berkeadilan;
31. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
34. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan RPJMD dengan RPJM Nasional 2010-2014;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
36. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Balikpapan Tahun 2013 dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan informasi pelaksanaan program dan kegiatan Kota Balikpapan selama tahun 2013 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2011-2016.

Melalui penyajian mengenai gambaran dan informasi tentang pelaksanaan program dan kegiatan yang komprehensif, terkait pula dengan fungsi LAKIP yang strategis bagi perkembangan kapasitas dan kapabilitas instansi, penyusunan LAKIP ini berperan dan bertujuan sebagai media akuntabilitas instansi yang dapat menjadi acuan baku dan analisis lanjutan yang mengarah pada sinergitas, sinkronisasi dan integritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 dalam agenda mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

LAKIP Kota Balikpapan Tahun 2013 ini juga berorientasi untuk sarana perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkesinambungan disertai analisis lanjutan dengan tujuan untuk mengidentifikasi peluang-peluang dan masukan-masukan penting guna perbaikan kinerja pada masa berikut dalam rangka mewujudkan visi misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2011-2016.

C. DATA ORGANISASI

Sebagai pelaksanaan ketentuan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 14 bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yaitu :

- a. Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan;
- b. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
- c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. Penyediaan sarana dan prasarana umum;

- e. Penanganan bidang kesehatan;
- f. Penyelenggaraan bidang pendidikan;
- g. Penanggulangan masalah sosial;
- h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan;
- i. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- j. Pengendalian lingkungan hidup;
- k. Pelayanan pertanahan;
- l. Pelayanan Kependudukan, dan Catatan Sipil;
- m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan;
- n. Pelayanan administrasi penanaman modal;
- o. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
- p. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Sedangkan urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung-jawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, disebutkan bahwa urusan wajib yang dilaksanakan meliputi: pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, pekerjaan umum, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perumahan, kepemudaan dan olahraga, penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, kependudukan dan catatan sipil, ketenagakerjaan, ketahanan pangan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, perhubungan, komunikasi dan informatika, pertanahan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat

daerah, kepegawaian, dan persandian, pemberdayaan masyarakat dan desa, sosial, kebudayaan, statistik, kearsipan dan perpustakaan.

Sedangkan berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 dinyatakan bahwa yang termasuk dalam urusan pilihan meliputi: kelautan dan perikanan, pertanian. Kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, industri, perdagangan dan keimigrasian.

Dalam rangka melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di atas maka dibentuklah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan dengan rincian SKPD sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD;
- b. Inspektorat;
- c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- d. Badan Lingkungan Hidup;
- e. Badan Kepegawaian Daerah;
- f. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- g. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- h. Kantor Arsip dan Perpustakaan;
- i. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
- j. Dinas Daerah :
 - 1) Dinas Pendidikan;
 - 2) Dinas Kesehatan;
 - 3) Dinas Pekerjaan Umum;
 - 4) Dinas Tata Kota dan Perumahan;

- 5) Dinas Perhubungan;
 - 6) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - 7) Dinas Tenaga Kerja dan Sosial;
 - 8) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
 - 9) Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
 - 10) Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan;
 - 11) Dinas Pendapatan Daerah;
 - 12) Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman;
 - 13) Dinas Pasar.
- k. Rumah Sakit Khusus Bersalin Sayang Ibu Kelas B;
- l. Satuan Polisi Pamong Praja;
- m. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;
- n. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- o. Kecamatan :
- 1) Kecamatan Balikpapan Barat;
 - 2) Kecamatan Balikpapan Utara;
 - 3) Kecamatan Balikpapan Tengah;
 - 4) Kecamatan Balikpapan Selatan;
 - 5) Kecamatan Balikpapan Timur;
 - 6) Kecamatan Balikpapan Kota.
- p. Kelurahan :
- 1) Kelurahan Baru Ilir;
 - 2) Kelurahan Baru Ulu;

- 3) Kelurahan Baru Tengah;
- 4) Kelurahan Kariangau;
- 5) Kelurahan Margo Mulyo;
- 6) Kelurahan Marga Sari;
- 7) Kelurahan Batu Ampar;
- 8) Kelurahan Gunung Samarinda;
- 9) Kelurahan Karang Joang;
- 10) Kelurahan Muara Rapak;
- 11) Kelurahan Gunung Sari Ulu;
- 12) Kelurahan Gunung Sari Ilir;
- 13) Kelurahan Karang Jati;
- 14) Kelurahan Sumber Rejo;
- 15) Kelurahan Karang Rejo;
- 16) Kelurahan Mekar Sari;
- 17) Kelurahan Sepinggan;
- 18) Kelurahan Gunung Bahagia;
- 19) Kelurahan Damai;
- 20) Kelurahan Klandasan Ulu;
- 21) Kelurahan Klandasan Ilir;
- 22) Kelurahan Prapatan;
- 23) Kelurahan Telaga Sari;
- 24) Kelurahan Teritip;
- 25) Kelurahan Lamaru;

- 26) Kelurahan Manggar;
- 27) Kelurahan Manggar Baru;
- 28) Kelurahan Sungai Nangka;
- 29) Kelurahan Sepinggan Baru;
- 30) Kelurahan Damai Baru;
- 31) Kelurahan Damai Bahagia;
- 32) Kelurahan Graha Indah;
- 33) Kelurahan Gunung Samarinda Baru;
- 34) Kelurahan Sepinggan Raya.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi pengantar LAKIP Tahun 2013 berupa Pengantar, Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan, Data Organisasi Perangkat Daerah serta Sistematika Penyajian.

BAB II PERENCANAAN STRATEJIK

Bab ini berisi gambaran umum uraian Rencana Strategis yang menjabarkan Visi, Misi, dan Tujuan serta Sasaran-sasaran yang akan dicapai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 serta Penetapan Kinerja Tahun 2013 dan Indikator Kinerja Utama dalam upaya pencapaian Sasaran Strategik Pemerintah Kota Balikpapan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini berisi uraian pengungkapan akuntabilitas kinerja dan pengungkapan akuntabilitas keuangan yang menggambarkan pelaksanaan pencapaian sasaran strategis Kota Balikpapan Tahun 2013.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi ringkasan dari tinjauan pelaksanaan kinerja dan keuangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 yang dirangkum ke dalam kesimpulan terhadap Akuntabilitas Kinerja serta Rencana Tindak Lanjutnya.

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. GAMBARAN UMUM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA BALIKPAPAN

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan.

Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud, disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berdasarkan amanat perundang-undangan di atas, dan dengan telah terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025, Pemerintah Kota Balikpapan telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Balikpapan 2006 – 2026.

RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2011 – 2016 merupakan penjabaran visi, misi, dan program Walikota Balikpapan yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam suatu periode masa jabatan.

Penyusunan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2011–2016 melalui berbagai tahapan analisis sektoral, penjaringan aspirasi masyarakat serta dialog yang melibatkan *stakeholders* kunci. Disamping itu penyusunan RPJMD ini mempedomani RPJP Kota Balikpapan, memperhatikan RPJMD Provinsi dan mengacu pada RTRW Provinsi dan Kabupaten Kota.

Tahun 2013 merupakan tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan 2011-2016 serta merupakan tahun ketiga kepemimpinan Walikota/Wakil Walikota Balikpapan Periode 2011-2016.

Sinkronisasi, sinergitas dan kesinambungan program kegiatan pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Balikpapan menjadi prioritas dalam program kegiatan tahun 2013.

1) VISI DAN MISI

Visi dan Misi Kota Balikpapan jangka panjang 20 tahun kedepan sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Balikpapan Tahun 2005–2025. Visi jangka panjang Kota Balikpapan untuk 20 tahun kedepan, adalah **TERWUJUDNYA BALIKPAPAN SEBAGAI KOTA BERDIMENSI INDUSTRI, PERDAGANGAN, JASA DAN PARIWISATA, BUDAYA DAN PENDIDIKAN YANG DIDUKUNG OLEH PENYELENGGARAAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) DAN MASYARAKAT YANG BERIMAN, SEJAHTERA, BERPERADABAN MAJU (MADINATUL IMAN)**

Visi ini menyiratkan agar Kota Balikpapan tetap fokus kepada kegiatan ekonomi Kota yang dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya, dalam arti sesuai dengan peluang dan potensi yang dimiliki oleh Kota Balikpapan yaitu sektor industri, perdagangan, jasa dan pariwisata. Dengan pemilihan sektor ekonomi tersebut diharapkan Kota Balikpapan akan dapat mampu bersaing dan menempatkan diri sebagai salah satu Kota utama di Kawasan Timur Indonesia khususnya Kalimantan. Namun Visi tersebut harus didukung dengan praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) yang wajib dilakukan oleh segenap aparatur Pemerintah Kota dan didukung pula oleh masyarakat yang religius serta berbudaya (Masyarakat Madani) sebagai mandat masyarakat untuk menjadikan Balikpapan sebagai Kota Beriman dalam arti yang sesungguhnya.

Guna mencapai Visi, maka ditetapkan pula Misi jangka panjang Kota Balikpapan untuk kurun waktu 20 tahun kedepan telah ditetapkan sebagai berikut:

- a. **Mewujudkan sumber daya manusia yang Beriman, sehat jasmani dan, memiliki daya saing dibidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi** yaitu membangun manusia Balikpapan dengan mengedepankan pembangunan aspek mental yang didukung oleh kesehatan jasmani dan penguasaan ilmu dan tehnologi dengan mengutamakan pemenuhan hak-hak dasar manusia secara berkualitas sehingga sebagai manusia dapat berperan serta dalam aktualisasi diri dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan pada umumnya dan kehidupan kota pada khususnya.
- b. **Mewujudkan tersedianya infrastuktur Kota yang mampu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan fungsi Kota di masa depan** yaitu membangun infrastruktur kota yang mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan mendukung fungsi kota Balikpapan pada masa yang akan datang baik fungsi internal maupun fungsi external kota sesuai dengan kedudukan kota Balikpapan dalam konteks regional maupun nasional.
- c. **Mewujudkan kondisi kota yang layak huni dan berwawasan lingkungan** yaitu membangun kota dengan mengindahkan kaidah-kaidah kelestarian lingkungan sehingga kota akan menjadi satu kesatuan ekosistem yang layak dihuni oleh warga kotanya
- d. **Mewujudkan perekonomian kota yang berorientasi kepada pengembangan potensi ekonomi kerakyatan dan pengembangan basis ekonomi Kota dimasa depan** yaitu membangun sistem ekonomi yang memungkinkan potensi ekonomi rakyat dapat berkembang, disamping mengembangkan basis ekonomi Kota Balikpapan dalam rangka mempersiapkan peranan Kota Balikpapan sebagai Kota Industri, Perdagangan dan Jasa.

- e. **Mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (good governance)** dengan membangun sistem pemerintahan modern *yang bebas KKN* dan mampu memberikan pelayanan publik dengan baik, serta menerapkan azas penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik seperti partisipasi, transparansi/keterbukaan dan akuntabilitas dari mulai Pemerintahan di tingkat Kota sampai kepada unit pelayanan masyarakat.
- f. **Mewujudkan penegakan hukum yang menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat** dengan membangun suatu sistem regulasi daerah yang dapat menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat yang dapat diterapkan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk mewujudkan Visi jangka panjang Kota Balikpapan dan untuk tetap menjaga kesinambungan program pembangunan di Kota Balikpapan, maka ditetapkan Visi dan Misi jangka menengah. Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada). Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban.

Visi pembangunan daerah Kota Balikpapan untuk periode RPJMD 2011-2016 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:

**MEWUJUDKAN KOTA BALIKPAPAN NYAMAN DIHUNI
MENUJU MADINATUL IMAN**

Penjelasan Visi diatas bermakna sebagai berikut :

- a. Kota Balikpapan sebagai Kota Nyaman Dihuni (*Livable City*) adalah suatu kondisi lingkungan dan suasana kota yang nyaman sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat untuk beraktivitas yang dilihat dari berbagai aspek baik aspek fisik (fasilitas perkotaan, prasarana, tata ruang, dll) maupun aspek non-fisik (hubungan sosial, aktivitas ekonomi, dll).

Prinsip-prinsip dari *Livable City* diantaranya :

- 1) Tersedianya berbagai kebutuhan dasar masyarakat perkotaan (hunian yang layak, air bersih, listrik);
- 2) Tersedianya berbagai fasilitas umum dan fasilitas sosial (transportasi publik, taman kota, fasilitas kesehatan/ kesehatan/ ibadah);
- 3) Tersedianya ruang dan tempat publik untuk bersosialisasi dan berinteraksi;
- 4) Keamanan, bebas dari rasa takut;
- 5) Mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya;
- 6) Sanitasi lingkungan dan keindahan lingkungan fisik.

- b. **Madinatul Iman**, mengandung makna sebagai berikut :

- 1) Suatu sistem sosial yang tumbuh dan berkembang, yang berasaskan pada prinsip moral.
- 2) Menjamin kebebasan perorangan dengan tetap memperhatikan kestabilan masyarakat.
- 3) Mendorong daya usaha dan inisiatif individu di segala bidang penyelenggaraan pemerintahan dengan mengacu pada peraturan perundangan-undangan.
- 4) Tatanan masyarakat yang beriman, sejahtera, religius dan berperadaban maju.

Untuk mewujudkan visi jangka menengah di atas, ditetapkan Misi dari Walikota dan Wakil Walikota terpilih tahun 2011 - 2016 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia yang Beriman;
2. Membangun Kewirausahaan dan Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat;
3. Meningkatkan Ketertiban Umum, Penegakan Hukum, Pemberantasan KKN dan Penanganan Masalah Sosial;
4. Meningkatkan Investasi, Memperkokoh Ekspektasi Dunia Usaha dan Memperluas Lapangan Kerja;
5. Meningkatkan Pelayanan Publik dan Melaksanakan Reformasi Birokrasi;
6. Meningkatkan Infrastruktur Kota yang Representatif;
7. Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan serta Perlindungan Anak;
8. Memperkuat Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Mengembangkan Pariwisata serta Melestarikan Keragaman Budaya dan Kegotongroyongan.

2) TUJUAN DAN SASARAN

Sebagai penjabaran atau penerapan dari pernyataan misi tersebut di atas, Sekretariat Daerah Kota Balikpapan menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam periode waktu 2011-2016, sebagai berikut :

MISI 1 : MENINGKATKAN KUALITAS DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERIMAN

Tujuan 1 : Meningkatkan kecerdasan dan ketrampilan masyarakat.

Sasaran : 1. Meningkatnya kualitas/mutu pendidikan ;
2. Meningkatnya aksesibilitas memperoleh pendidikan ;
3. Meningkatnya kualitas tenaga kerja.

Tujuan 2 : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Sasaran : 1. Meningkatnya status kesehatan masyarakat ;
2. Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan kesehatan.

Tujuan 3 : Meningkatkan pembinaan pemuda dan olahraga.

Sasaran : 1. Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan ;
2. Meningkatnya kualitas dan prestasi olahraga.

Tujuan 4 : Meningkatkan kualitas keagamaan masyarakat.

Sasaran : 1. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan agama ;
2. Meningkatnya kerukunan intra dan antar umat beragama.

MISI 2 MEMBANGUN KEWIRAUSAHAAN DAN MENINGKATKAN KEMANDIRIAN EKONOMI MASYARAKAT.

Tujuan 1 : Mengembangkan Kewirausahaan UMKM dan Koperasi.

Sasaran : 1. Meningkatnya kualitas pengelolaan UMKM dan Koperasi ;
2. Meningkatnya kualitas produk UMKM dan Koperasi.

- Tujuan 2 : Memantapkan kemandirian Ekonomi masyarakat.
Sasaran : 1. Meningkatnya produktivitas Pertanian, Kelautan dan Perikanan ;
2. Meningkatnya pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin.

MISI 3 MENINGKATKAN KETERTIBAN UMUM, PENEGAKAN HUKUM, PEMBERANTASAN KKN DAN PENANGANAN MASALAH SOSIAL.

- Tujuan 1 : Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum.
Sasaran : Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum;

- Tujuan 2 : Meningkatkan kesadaran hukum dan pemberantasan KKN.
Sasaran : Meningkatnya partisipasi politik Masyarakat.

- Tujuan 3 : Mengentaskan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Sasaran : 1. Meningkatnya pelayanan dan perlindungan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ;
2. Meningkatnya kemandirian masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

- Tujuan 4 : Meningkatkan peranan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan Bencana.
Sasaran : 1. Meningkatnya sistem kewaspadaan dini dan penanggulangan bencana ;

2. Meningkatnya partisipasi pilar masyarakat/relawan dalam penanggulangan bencana.

MISI 4 MENINGKATKAN INVESTASI, MEMENUHI EKSPEKTASI DUNIA USAHA, DAN MEMPERLUAS LAPANGAN KERJA.

Tujuan 1 : Mewujudkan iklim investasi yang kondusif.

Sasaran : Meningkatnya pelayanan administrasi dan perizinan investasi.

Tujuan 2 : Meningkatkan investasi berbasis keunggulan daerah.

Sasaran : Berkembangnya kawasan industri dan perdagangan yang berwawasan lingkungan.

Tujuan 3 : Menciptakan dan memperluas lapangan kerja.

Sasaran : Meningkatnya lapangan usaha dan lapangan kerja.

Tujuan 4 : Meningkatkan Sumber-sumber pendapatan daerah dan pembiayaan daerah.

Sasaran : Meningkatnya sumber sumber pendapatan daerah;

MISI 5 MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DAN MELAKSANAKAN REFORMASI BIROKRASI.

Tujuan 1 : Meningkatkan pelayanan publik yang prima

Sasaran : Meningkatnya Kapasitas institusi penyelenggara pelayanan publik;

Tujuan 2 : Melaksanakan Reformasi Birokrasi dalam penyelenggaraan.
Sasaran : Terlaksananya reformasi birokrasi

MISI 6 MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR KOTA YANG REPRESENTATIF.

Tujuan 1 : Menyediakan prasarana dan sarana perhubungan yang nyaman, aman, efisien dan ramah lingkungan.

Sasaran : 1. Meningkatnya manajemen dan fasilitas perlengkapan jalan ;
2. Terwujudnya Sarana Angkutan Umum Massal (SAUM).

Tujuan 4 : Menyediakan pelayanan air bersih/minum dan pengelolaan air limbah.

Sasaran : 1. Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih/air minum ;
2. Tersedianya sistem jaringan dan instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) terpadu.

Tujuan 5 : Meningkatkan upaya pengendalian dan penanggulangan banjir dalam kota

Sasaran : Mengurangi titik/lokasi banjir, luas wilayah banjir dan lama waktu genangan.

Tujuan 6 : Menciptakan perumahan dan lingkungan permukiman yang sehat dan layak huni

Sasaran : 1. Meningkatnya kualitas perumahan dikawasan permukiman kumuh ;
2. Terwujudnya penyediaan hunian vertikal (rusunawa dan rusunami) ;

3. Terwujudnya sanitasi sehat yang dapat diakses seluruh lapisan masyarakat.

Tujuan 7 : Menyediakan ruang kota yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan

Sasaran : 1. Tersedianya struktur dan pola ruang yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
2. Tersedianya tata ruang pesisir, dan pulau-pulau kecil ;
3. Terkendalinya pemanfaatan ruang.

**MISI 7 : MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA,
: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN
SERTA PERLINDUNGAN ANAK.**

Tujuan 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga

Sasaran : Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam program Keluarga Berencana.

Tujuan 2 : Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat

Sasaran : Meningkatnya pemanfaatan teknologi tepat guna.

Tujuan 3 : Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender

Sasaran : Meningkatnya kemampuan perempuan dalam keluarga dan lingkungan kerja ;

Tujuan 4 : Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak.

Sasaran : Meningkatnya kualitas anak.

MISI 8 : MEMPERKUAT DAYA DUKUNG LINGKUNGAN HIDUP DAN MENGEMBANGKAN PARIWISATA SERTA MELESTARIKAN KERAGAMAN BUDAYA DAN KEGOTONGROYONGAN.

Tujuan 1 : Meningkatkan daya dukung lingkungan hidup selaras dengan pengembangan ekonomi kota (eco2cities)

Sasaran : 1. Terwujudnya peningkatan pelestarian dan pengembangan kawasan hutan, lahan dan DAS;
2. Meningkatnya kebersihan dan keindahan kota ;
3. Meningkatnya upaya pelestarian lingkungan hidup melalui pendidikan dan peran serta aktif masyarakat.

Tujuan 2 : Mengembangkan dan melestarikan heterogenitas budaya

Sasaran : Meningkatnya upaya pelestarian ragam seni dan budaya yang ada di Kota Balikpapan.

Tujuan 3 : Mengembangkan pariwisata yang berwawasan lingkungan

Sasaran : 1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata ;
2. Berkembangnya usaha-usaha pendukung kepariwisataan.

3) Indikator Kinerja Utama (I K U)

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Pemerintah Kota Balikpapan menetapkan Indikator Kinerja Utama.

Hal ini sejalan dengan penyempurnaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana yang telah diamanatkan Instruksi Presiden No 7 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Akuntabilitas Instansi Pemerintah.

Indikator Kinerja Utama Kota Balikpapan memberikan pedoman bagi perumusan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan dalam rangka untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja, dan melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen RPJMD Kota Balikpapan tahun 2011 – 2016.

Keterkaitan sasaran strategis dengan masing-masing indikator kinerja utama berikut sumber data yang digunakan tergambarkan dalam dokumen IKU Kota Balikpapan sebagaimana berikut :

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
KOTA BALIKPAPAN**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kualitas/mutu pendidikan	1. Jumlah Tenaga Pendidik yang bersertifikat profesi 2. Persentase capaian SPM pendidikan tingkat dasar 3. Persentase capaian SPM pendidikan tingkat menengah 4. Angka putus sekolah 5. Jumlah sekolah standar nasional	Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
2.	Meningkatnya aksesibilitas memperoleh pendidikan	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar <ul style="list-style-type: none"> a. SD b. SMP c. SLTA 2. Angka Partisipasi Murni <ul style="list-style-type: none"> a. SD b. SMP c. SLTA 3. Jumlah Perpustakaan : <ul style="list-style-type: none"> ➤ Formal ➤ Informal 4. Persentase Tingkat literasi usia > 15 tahun 5. Kurikulum SMK yang diintegrasikan kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri 6. APK Pendidikan Usia Dini 7. Rasio tingkat pendidikan dasar yang ditamatkan siswa Gakin	Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA
1	2	3	4
3.	Meningkatnya kualitas tenaga kerja	1. Persentase Angka beban tanggungan (Dependency ratio) 2. Angka kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja 3. Persentase penggunaan peralatan K3 di perusahaan 4. Persentase lembaga K3 di perusahaan 5. Persentase jumlah perusahaan yang menerima penghargaan Zero Accident dan SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja)	Disnakersos Disnakersos Disnakersos Disnakersos Disnakersos
4.	Meningkatnya Status kesehatan masyarakat	1. UHH 2. AKI/AKB: - - Angka kematian ibu nifas - Angka kematian balita - Angka kematian Neonatal 3. Persalinan dengan Tenaga kesehatan 4. Persentase ASI eksklusif	Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
5.	Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan kesehatan	1. Jumlah fasilitas kesehatan tingkat I 2. Jumlah fasilitas kesehatan rujukan 3. Puskesmas perawatan mampu PONEB	Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA
1	2	3	4
		4. Persentase produksi sediaan farmasi & makanan yang memenuhi standar mutu & distribusi 5. Presentase puskesmas dalam pelaksanaan PIO (Pelayanan Informasi Obat) 6. Jumlah Fasilitas kesehatan dengan poli kesehatan remaja. 7. Jumlah fasilitas kesehatan santunan lansia 8. Jumlah jaminan kesehatan 9. Persentase pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 10. Jumlah puskesmas yang memberikan fasilitas kesehatan rujukan TK.I	Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
6.	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan	Jumlah organisasi kepemudaan aktif	Kantor Kesbangpol
7.	Meningkatnya kualitas dan prestasi olahraga dan olahraga tradisional	1. Jumlah organisasi Cabang olahraga 2. Jumlah prestasi olahraga 3. Jumlah klub olahraga tradisional	Disporabudpar Disporabudpar Disporabudpar
8.	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan agama	1. Jumlah prestasi masyarakat dalam lomba bidang keagamaan 2. Jumlah TKA / TPA 3. Jumlah Pembangunan fasilitas keagamaan	Bagian Kesra Bagian Kesra Bagian Kesra

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA
1	2	3	4
9.	Meningkatnya kerukunan intra dan antar umat beragama	1. Jumlah konflik masyarakat yang berlatarbelakang Agama 2. Jumlah lembaga yang menangani kerukunan keagamaan 3. Jumlah kegiatan lembaga yang menangani kerukunan keagamaan	Kantor Kesbangpol Kantor Kesbangpol Kantor Kesbangpol
10.	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan Koperasi	1. Jumlah Koperasi Aktif (%) 2. Jumlah UMKM Produktif 3. Jumlah Produk Unggulan	Disperdagkop Disperdagkop Disperdagkop
11.	Meningkatkan Permodalan	1. Jumlah LKM (Lembaga Keuangan Mikro)/KSP (Koperasi Simpan Pinjam) 2. Jumlah BPR 3. % Kredit Usaha Kecil Menengah Nilai investasi 4. Angka inflasi	Disperdagkop Disperdagkop Disperdagkop Disperdagkop
12.	Meningkatnya produktivitas Pertanian, Kelautan dan Perikanan	1. Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura 2. Produksi hasil ternak 3. Produksi Budidaya Perikanan	DPKP
13.	Meningkatnya pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin	1. Pemerataan pendapatan penduduk berpenghasilan di bawah 40% terendah 2. Persentase penduduk miskin	Bagian Perekonomian
14.	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat dalam menjaga ketentraman dan	1. Jumlah kelompok siskamling aktif 2. Jumlah kelurahan sadar hukum.	Bagian Pemerintahan Bagian Pemerintahan

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA
1	2	3	4
	ketertiban umum		
15.	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat	1. Angka partisipasi pemilu	Kantor Kesbangpol
16.	Meningkatnya pelayanan dan perlindungan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	1. Jumlah panti sosial dan rehabilitasi yang dikelola Pemerintah dan non pemerintah 2. Jumlah Masyarakat PMKS	Disnakersos Disnakersos
17.	Meningkatnya sistem kewaspadaan dini dan penanggulangan bencana	Terbentuknya sistem informasi Peringatan Dini Kejadian Bencana	BPBK
18.	Meningkatnya partisipasi pilar masyarakat/relawan dalam penanggulangan bencana	1. Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat 2. Jumlah Taruna Siaga Bencana	Disnakersos BPBK
19.	Meningkatnya pelayanan administrasi dan perizinan investasi	1. Capaian IKM unit Pelayanan Publik 2. Cakupan kepemilikan Kartu tanda penduduk 3. Cakupan kepemilikan akte kelahiran 4. Jumlah investor 5. Jumlah penghargaan citra pelayanan prima	Bagian Organisasi Disdukcapil Disdukcapil BPMP2T Bag. Organisasi

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA
1	2	3	4
20.	Meningkatnya cakupan layanan persediaan daya listrik kepada masyarakat	1. Rasio Ketersediaan daya listrik	Bagian Perekonomian
21.	Berkembangnya kawasan industri dan perdagangan yang berwawasan lingkungan	1. Jumlah luasan kawasan terbuka pada lahan industri 2. Persentase Pertumbuhan Industri 3. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB 4. Angka PDRB 5. Jumlah Sarana Perdagangan 6. Jumlah Pasar yang berwawasan lingkungan 7. Jumlah pasar yang ditingkatkan sarana dan prasarana	BAPPEDA BAPPEDA BAPPEDA BAPPEDA Disperindagkop Dinas Pasar Dinas Pasar
22.	Meningkatnya lapangan usaha dan lapangan kerja	1. Jumlah Unit Usaha 2. Persentase Penyerapan tenaga kerja 3. Jumlah kesempatan kerja 4. Angka Pengangguran 5. Angka Partisipasi Angkatan Kerja	Disperindagkop Disnakersos Disnakersos Disnakersos Disnakersos
23.	Meningkatnya sumber-sumber pendapatan daerah	1. Retribusi 2. Sumber Pendapatan Daerah dari pihak ketiga	Dispenda Dispenda
24.	Meningkatnya Kapasitas institusi penyelenggara pelayanan publik	1. Jumlah SKPD yang menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Bagian Organisasi

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA
1	2	3	4
25.	Terlaksananya Reformasi Birokrasi	1. Opini terhadap laporan keuangan daerah 2. Nilai akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintahan (AKIP) SKPD 3. Pemenuhan kebutuhan PNS 4. Rasio PNS yang mengikuti diklat teknis 5. Rasio PNS yang mengikuti diklat fungsional 6. Peningkatan pemanfaatan SIMPEG (Sistem Informasi, Formasi dan Mutasi) 7. Tingkat kapasitas sumberdaya aparatur (Diklat): a. Diklat PIM II b. Diklat PIM III c. Diklat PIM IV 8. Peningkatan tunjangan kerja	BPKAD Bag. Organisasi BKD BKD BKD BKD BKD
26.	Meningkatnya manajemen dan fasilitas perlengkapan jalan	1. Jumlah uji kir angkutan umum 2. Jumlah rambu jalan, marka jalan, dan ATCS 3. Pemeliharaan alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL) 4. Panjang jalan kota yang dibangun 5. Panjang jalan yang ditingkatkan 6. Panjang jembatan yang dibangun 7. Panjang jalan yang dipelihara 8. Jumlah perbaikan simpang 9. Panjang trotoar yang ditingkatkan	Dishub Dishub Dishub Dinas PU Dinas PU Dinas PU Dinas PU Dinas PU Dinas PU

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA
1	2	3	4
		10. Jumlah halte angkutan umum 11. Jumlah area parkir 12. Jumlah fasilitas pelabuhan/ ruang tunggu	Dishub Dishub Dishub
27.	Terwujudnya Sarana Angkutan Umum Massal (SAUM)	1. Jumlah angkutan umum	Dishub
28.	Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih/air minum.	1. Jumlah Produksi IPA 2. Jumlah ketersediaan air baku 3. Persentase rumah tangga pengguna air bersih	BLH BLH BLH
29.	Tersedianya sistem jaringan dan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) terpadu	1. Cakupan pelayanan air limbah 2. Jumlah instalansi pengolahan Air Limbah (IPAL) terpusat	BLH BLH
30.	Berkurangnya titik/ lokasi banjir dan luas wilayah banjir	1. Jumlah Titik lokasi banjir 2. Jumlah bendali/ bozem 3. Panjang normalisasi sungai 4. Panjang saluran drainase permanen (primer, sekunder dan tersier) 5. Panjang saluran drainase permukiman permanen 6. Panjang saluran drainase permanen (primer, sekunder dan tersier) 7. Jalan inspeksi sungai	BLH Dinas PU Dinas PU Dinas PU Dinas PU Dinas PU Dinas PU

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA
1	2	3	4
31.	Meningkatnya kualitas perumahan dikawasan permukiman kumuh.	1. Jumlah rumah tidak layak huni; 2. Persentase rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni 3. Persentase kawasan pemukiman kumuh	DTKP DTKP DTKP
32.	Terwujudnya penyediaan hunian vertikal (rusunawa dan rusunami)	1. Jumlah rusunami 2. Jumlah rusunawa	DTKP DTKP
33.	Terwujudnya sanitasi sehat yang dapat diakses seluruh lapisan masyarakat	1. (%) rumah tinggal bersanitasi	Dinas PU
34.	Tersedianya struktur dan pola ruang yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	1. Produk hukum tentang Rencana Tata Ruang Kota Balikpapan 2. Jumlah kegiatan sosialisasi Rencana Tata Ruang Kota Balikpapan 3. Tersedianya dokumen-dokumen perencanaan tata ruang	DTKP DTKP DTKP
35.	Tersedianya tata ruang pesisir, dan pulau-pulau kecil.	1. Luas wilayah budidaya pesisir	BAPPEDA
36.	Terkendalinya pemanfaatan ruang.	1. (%) bangunan ber-IMB dengan satuan bangunan	DTKP

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA
1	2	3	4
		2. (%) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang 3. Jumlah Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial 4. Jumlah Bangunan Perumahan 5. Luas wilayah hutan lindung 6. Luas wilayah Ruang Terbuka Hijau (RTH)	DTKP BAPPEDA DTKP BAPPEDA BAPPEDA
37.	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam program Keluarga Berencana	1. Akseptor aktif 2. Prevalensi Rate 3. Persentase partisipasi Gakin untuk berKB 4. Tingkat kelestarian ber KB a. 10 tahun b. 15 tahun c. 20 tahun	BPMP2KB BPMP2KB BPMP2KB BPMP2KB
38.	Meningkatnya pemanfaatan teknologi tepat guna	1. Jumlah inovasi Teknologi Tepat Guna	Disperindagkop
39.	Meningkatnya kemampuan perempuan dalam keluarga dan lingkungan kerja	1. Partisipasi Perempuan di lembaga pemerintah 2. Rasio Pejabat PNS Perempuan dan laki-laki 3. Partisipasi angkatan kerja perempuan 4. menurunnya kasus kasus kekerasan dalam rumah Tangga	BKD BKD Disnakersos BPMP2KB

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA
1	2	3	4
40.	Meningkatnya kualitas anak	1. Jumlah prestasi anak: <ol style="list-style-type: none"> tingkat propinsi tingkat nasional tingkat internasional 2. Jumlah PAUD 3. Jumlah TK 4. Jumlah anak terlantar 5. Angka kekerasan dan eksploitasi anak dibawah umur 6. Angka anak jalanan 7. Jumlah fasilitas bermain anak	Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Disnakersos Disnakersos Disnakersos BPMP2KB
41.	Terwujudnya peningkatan pelestarian dan pengembangan kawasan hutan, lahan dan DAS	1. Luas kawasan hutan 2. Luas rehabilitasi kawasan hutan 3. Jumlah kegiatan Pengamanan kawasan hutan 4. Luas konservasi kawasan mangrove 5. Luas hutan kota yang terehabilitasi dan tidak bermasalah 6. Luas hutan Kota yang sudah di pagar 7. Luas hutan kota 8. (%) terbangunnya Kebun Raya 9. Persentase Ruang Terbuka hijau publik dan privat 10. Rasio ketersediaan area pemakanan 11. Jumlah DAS yang termonitoring	BLH BLH BLH BLH BLH BLH BLH BLH BLH BLH BLH DKPP BLH

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA
1	2	3	4
		12. Jumlah Rekomendasi untuk ijin pengguna air tanah 13. Luasan Penanaman pohon 14. Angka data keanekaragaman hayati 15. Luas lokasi percontohan KEHATI	BLH BLH BLH BLH
42.	Meningkatnya kebersihan dan keindahan kota	1. Cakupan pelayanan persampahan 2. Volume Pengelolaan sampah melalui pengangkutan ke TPA 3. Jumlah sarana dan prasarana TPA 4. Luas bangunan TPA 5. Jumlah Kerja Bakti Massal	DKPP DKPP DKPP DKPP DKPP
43.	Meningkatnya upaya pelestarian lingkungan hidup	1. Persentase pengelolaan Gas Buang industri 2. Jumlah stasiun monitoring udara beroperasi dan kondisi baik 3. Jumlah kendaraan yang telah mengikuti uji emisi 4. Jumlah sumber tidak bergerak (industri, dll) yang telah dipantau tentang emisi cerobong 5. Persentase Badan usaha yang telah memiliki dokumen lingkungan (UKL/UPL atau Amdal) 6. Persentase Usaha/industri yang menaati peraturan pembuangan air limbah	BLH BLH BLH BLH BLH BLH

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA
1	2	3	4
		7. Persentase Usaha yang telah memiliki izin pengelolaan limbah B3	BLH
		8. Persentase Pengendalian pada sumber pencemar memenuhi baku mutu	BLH
		9. Persentase Badan usaha yang telah memiliki sertifikasi hijau	BLH
		10. Persentase Peran aktif masyarakat dan pendidikan dalam pengelolaan lingkungan hidup	BLH
		11. Jumlah sarana dan prasarana 3R dan sarana persampahan RT yang terintegrasi mulai dari sumber sampai dengan TPA	BLH
		12. Jumlah Penyuluhan LH kepada masyarakat	BLH
44.	Meningkatnya upaya pelestarian seni dan budaya	1. Jumlah grup seni dan budaya 2. Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya 3. Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya 4. Jumlah sarana gedung seni dan budaya 5. Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan 6. Jumlah seni budaya yang berciri khas Balikpapan	Disporabudpar Disporabudpar Disporabudpar Disporabudpar Disporabudpar Disporabudpar

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA
1	2	3	4
45.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata	1. Jumlah wisata nusantara 2. Jumlah wisata mancanegara 3. Jumlah destinasi/obyek wisata	Disporabudpar Disporabudpar Disporabudpar
46.	Berkembangnya usaha-usaha pendukung kepariwisataan	1. Jumlah usaha pendukung kepariwisataan	Disporabudpar

B. PENETAPAN KINERJA KOTA BALIKPAPAN

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di dalam Rencana Kinerja ditetapkan Rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan melalui Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2013.

Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya; Program, Kegiatan, serta Kelompok Indikator Kinerja dan Rencana Capaiannya Indikator.

Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan

tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus di organisasi. Penetapan Kinerja yang akan dicapai untuk tahun 2013 adalah sebagai berikut:

PENETAPAN KINERJA KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2013

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kualitas/mutu pendidikan	1. Jumlah Tenaga Pendidik yang bersertifikat profesi 2. Persentase capaian SPM pendidikan tingkat dasar 3. Persentase capaian SPM pendidikan tingkat menengah 4. Angka putus sekolah 5. Jumlah sekolah standar nasional	750 100% 100% 33,8% 19
2.	Meningkatnya aksesibilitas memperoleh pendidikan	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar a. SD b. SMP c. SLTA 2. Angka Partisipasi Murni a. SD b. SMP c. SLTA 3. Jumlah Perpustakaan : ➤ Formal ➤ Informal 4. Persentase Tingkat literasi usia > 15 tahun	112,3% 102,8% 80,8% 90,75% 69,41% 53,98% 140 10 98,93%

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	2	3	4
		5. Kurikulum SMK yang diintegrasikan kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri 6. APK Pendidikan Usia Dini 7. Rasio tingkat pendidikan dasar yang ditamatkan siswa Gakin	100% 45% 100%
3.	Meningkatnya kualitas tenaga kerja	1. Persentase Angka beban tanggungan (Dependency ratio) 2. Angka kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja 3. Persentase penggunaan peralatan K3 di perusahaan 4. Persentase lembaga K3 di perusahaan 5. Persentase jumlah perusahaan yang menerima penghargaan Zero Accident dan SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja)	44,9 182 85% 70% 35
4.	Meningkatnya Status kesehatan masyarakat	1. UHH 2. AKI/AKB: - Angka kematian ibu nifas - Angka kematian balita - Angka kematian Neonatal 3. Persalinan dengan Tenaga kesehatan 4. Persentase ASI eksklusif	72,3 102/100.000KH 32/1000KH - 87% 50%

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	2	3	4
5.	Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan kesehatan	1. Jumlah fasilitas kesehatan tingkat I 2. Jumlah fasilitas kesehatan rujukan 3. Puskesmas perawatan mampu PONED 4. Persentase produksi sediaan farmasi & makanan yang memenuhi standar mutu & distribusi 5. Presentase puskesmas dalam pelaksanaan PIO (Pelayanan Informasi Obat) 6. Jumlah Fasilitas kesehatan dengan poli kesehatan remaja. 7. Jumlah fasilitas kesehatan santunan lansia 8. Jumlah jaminan kesehatan a. Jamkesda b. JPK OR c. Gakin d. Jamkesmas 9. Persentase pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 10. Jumlah puskesmas yang memberikan fasilitas kesehatan rujukan TK.I	27 PKM; 28 klinik 18 5 pkm 67% 6 pkm 15 pkm 1 pkm 150.000 jiwa 1.000 jiwa 17.360 jiwa 93.475 jiwa 100% 27 pkm
6.	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan	1. Jumlah organisasi kepemudaan aktif	73

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	2	3	4
7.	Meningkatnya kualitas dan prestasi olahraga dan olahraga tradisional	1. Jumlah organisasi Cabang olahraga 2. Jumlah prestasi olahraga 3. Jumlah klub olahraga tradisional	45 45 3
8.	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan agama	1. Jumlah prestasi masyarakat dalam lomba bidang keagamaan 2. Jumlah TKA / TPA 3. Jumlah Pembangunan fasilitas keagamaan	45 330 113
9.	Meningkatnya kerukunan intra dan antar umat beragama	1. Jumlah konflik masyarakat yang berlatarbelakang Agama	0
10.	Meningkatnya kualitas pengelolaan UMKM dan Koperasi	1. Jumlah Koperasi Aktif (%) 2. Jumlah UMKM Produktif 3. Jumlah Produk Unggulan	385 14.770 2
11.	Meningkatkan Permodalan	1. Jumlah LKM (Lembaga Keuangan Mikro)/KSP (Koperasi Simpan Pinjam) 2. Jumlah BPR 3. % Kredit Usaha Kecil Menengah Nilai investasi	12 1 65.46%
12.	Meningkatnya produktivitas Pertanian, Kelautan dan Perikanan	1. Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura : 2. Produksi hasil ternak : 3. Produksi Budidaya Perikanan :	58.522,5 ton 2.761,35 ton 8.222,8 ton

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	2	3	4
13.	Meningkatnya pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin	1. Pemerataan pendapatan penduduk berpenghasilan di bawah 40% terendah 2. Persentase penduduk miskin	16.58% 3.79%
14.	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum	1. Jumlah kelompok siskamling aktif 2. Jumlah kelurahan sadar hukum.	475 12
15.	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat	Angka partisipasi pemilu	62
16.	Meningkatnya pelayanan dan perlindungan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	1. Jumlah panti sosial dan rehabilitasi yang dikelola Pemerintah dan non pemerintah 2. Jumlah Masyarakat PMKS	1 549
17.	Meningkatnya sistem kewaspadaan dini dan penanggulangan bencana	Terbentuknya sistem informasi Peringatan Dini Kejadian Bencana	1
18.	Meningkatnya partisipasi pilar masyarakat/relawan dalam penanggulangan bencana	1. Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat 2. Jumlah Taruna Siaga Bencana	220 480
19.	Meningkatnya pelayanan administrasi	1. Capaian IKM unit Pelayanan Publik	65

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	2	3	4
	dan perizinan investasi	2. Cakupan kepemilikan Kartu tanda penduduk 3. Cakupan kepemilikan akte kelahiran 4. Jumlah investor 5. Jumlah penghargaan citra pelayanan prima	87% 63% 75 0
20.	Meningkatnya cakupan layanan persediaan daya listrik kepada masyarakat	Rasio Ketersediaan daya listrik	178.668
21.	Berkembangnya kawasan industri dan perdagangan yang berwawasan lingkungan	1. Jumlah luasan kawasan terbuka pada lahan industri 2. Persentase Pertumbuhan Industri 3. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB 4. Angka PDRB 5. Jumlah Sarana Perdagangan 6. Jumlah Pasar yang berwawasan lingkungan 7. Jumlah pasar yang ditingkatkan sarana dan prasarana	0,2% 4,75% 34,22 T 48,45T 46 3 7
22.	Meningkatnya lapangan usaha dan lapangan kerja	1. Jumlah Unit Usaha 2. Penyerapan tenaga kerja	8.450 107.427
23.	Meningkatnya sumber-sumber pendapatan daerah	1. Pajak Daerah, Retribusi, pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain- lain pendapatan yang sah	43.799.812.820,77

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	2	3	4
		2. Sumber Pendapatan Daerah dari pihak ketiga	5
24.	Meningkatnya Kapasitas institusi penyelenggara pelayanan publik	Jumlah SKPD yang menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	13
25.	Terlaksananya Reformasi Birokrasi	1. Opini terhadap laporan keuangan daerah 2. Nilai akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintahan (AKIP) SKPD 3. Pemenuhan kebutuhan PNS 4. Rasio PNS yang mengikuti diklat teknis 5. Rasio PNS yang mengikuti diklat fungsional 6. Peningkatan pemanfaatan SIMPEG (Sistem Informasi, Formasi dan Mutasi) 7. Tingkat kapasitas sumberdaya aparatur (Diklat): a. Diklat PIM II b. Diklat PIM III c. Diklat PIM IV	WTP B 195 1 : 9 1 : 51 5 modul 6 20 40
26.	Meningkatnya manajemen dan fasilitas perlengkapan jalan	1. Jumlah uji kir angkutan umum 2. Jumlah rambu jalan, marka jalan, dan ATCS a. Rambu b. Marka Jalan c. ATCS	50.000 100 1.799m2 14

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	2	3	4
		3. Pemeliharaan alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL) 4. Panjang jalan kota yang dibangun 5. Panjang jalan yang ditingkatkan 6. Panjang jembatan yang dibangun 7. Panjang jalan yang dipelihara 8. Jumlah perbaikan simpang 9. Panjang trotoar yang ditingkatkan 10. Jumlah halte angkutan umum 11. Jumlah area parkir 12. Jumlah fasilitas pelabuhan/ ruang tunggu	14 3 km 15 km 50 m 500 m 1 titik 350 m 4 21 1
27.	Terwujudnya Sarana Angkutan Umum Massal (SAUM)	Jumlah angkutan umum	1922
28.	Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih/air minum.	1. Jumlah Produksi IPA 2. Jumlah ketersediaan air baku 3. Persentase rumah tangga pengguna air bersih	1157 1.105 73%
29.	Tersedianya sistem jaringan dan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) terpadu	1. Cakupan pelayanan air limbah 2. Jumlah instalansi pengolahan Air Limbah (IPAL) terpusat	100% 1
30.	Berkurangnya titik/ lokasi banjir dan luas wilayah banjir	1. Jumlah Titik lokasi banjir 2. Jumlah bendali/ bozem 3. Panjang normalisasi sungai	55 2 1000m

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	2	3	4
		4. Panjang saluran drainase permanen (primer, sekunder dan tersier)	1000m
		5. Panjang saluran drainase permukiman permanen	5.000m
		6. Panjang saluran drainase permanen (primer, sekunder dan tersier)	2.500m
		7. Jalan inspeksi sungai	1.000m
31.	Meningkatnya kualitas perumahan dikawasan permukiman kumuh.	1. Jumlah rumah tidak layak huni; 2. Persentase kawasan permukiman kumuh	6.747 0.01%
32.	Terwujudnya penyediaan hunian vertikal (rusunawa dan rusunami)	1. Jumlah rusunami 2. Jumlah rusunawa	1 1
33.	Terwujudnya sanitasi sehat yang dapat diakses seluruh lapisan masyarakat	(%) rumah tinggal bersanitasi	97.15%
34.	Tersedianya struktur dan pola ruang yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	1. Produk hukum tentang Rencana Tata Ruang Kota Balikpapan 2. Jumlah kegiatan sosialisasi Rencana Tata Ruang Kota Balikpapan 3. Tersedianya dokumen-dokumen perencanaan tata ruang	0 34 3

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	2	3	4
35.	Tersedianya tata ruang pesisir, dan pulau-pulau kecil.	Luas wilayah budidaya pesisir	10.16
36.	Terkendalinya pemanfaatan ruang.	1. (%) bangunan ber-IMB dengan satuan bangunan 2. (%) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang 3. Jumlah Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial 4. Jumlah bangunan perumahan 5. Luas Hutan Lindung 6. Luas Wilayah ruang terbuka hijau (RTH)	2,7% 2% 300 654 14.781 3
37.	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam program Keluarga Berencana	1. Akseptor aktif 2. Prevalensi Rate 3. Persentase partisipasi Gakin untuk berKB 4. Tingkat kelestarian ber KB a. 10 tahun b. 15 tahun c. 20 tahun	70.096 74,9 75,03 5,878 2,803 313
38.	Meningkatnya pemanfaatan teknologi tepat guna	Jumlah inovasi Teknologi Tepat Guna	3
39.	Meningkatnya kemampuan perempuan dalam keluarga	1. Partisipasi Perempuan di lembaga pemerintah 2. Rasio Pejabat PNS Perempuan dan laki-laki	3.420 10 : 13

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	2	3	4
	dan lingkungan kerja	3. Partisipasi angkatan kerja perempuan 4. Menurunnya kasus kasus kekerasan dalam rumah Tangga	46,07% 30
40.	Meningkatnya kualitas anak	1. Jumlah prestasi anak: a. tingkat propinsi b. tingkat nasional c. tingkat internasional 2. Jumlah PAUD 3. Jumlah TK a. Negeri b. Swasta 4. Jumlah anak terlantar 5. Angka kekerasan dan eksploitasi anak dibawah umur 6. Angka anak jalanan 7. Jumlah fasilitas bermain anak	152 52 2 200 1 137 25 10 20 72
41.	Terwujudnya peningkatan pelestarian dan pengembangan kawasan hutan, lahan dan DAS	1. Luas kawasan hutan 2. Luas rehabilitasi kawasan hutan 3. Jumlah kegiatan Pengamanan kawasan hutan 4. Luas konservasi kawasan mangrove 5. Luas hutan kota yang terehabilitasi dan tidak bermasalah 6. Luas hutan Kota yang sudah di pagar 7. Luas hutan kota 8. (%) terbangunnya Kebun Raya	16.809,49 Ha 50 Ha 2,35 10 Ha 5 Ha 5 Ha 5 Ha 40%

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	2	3	4
		9. Persentase Ruang Terbuka hijau publik dan privat	37%
		10. Rasio ketersediaan area pemukiman	294.671 m2
		11. Jumlah DAS yang termonitoring	7
		12. Jumlah Rekomendasi untuk ijin pengguna air tanah	25
		13. Luasan Penanaman pohon	50.000
		14. Angka data keanekaragaman hayati	30%
		15. Luas lokasi percontohan KEHATI	1Ha
42.	Meningkatnya kebersihan dan keindahan kota	1. Cakupan pelayanan persampahan 2. Volume Pengelolaan sampah melalui pengangkutan ke TPA 3. Jumlah sarana dan prasarana TPA 4. Luas bangunan TPA 5. Jumlah Kerja Bakti Massal	100% 195.548,02 4 29.1ha 12
43.	Meningkatnya upaya pelestarian lingkungan hidup	1. Persentase pengelolaan Gas Buang industri 2. Jumlah stasiun monitoring udara beroperasi dan kondisi baik 3. Jumlah kendaraan yang telah mengikuti uji emisi 4. Jumlah sumber tidak bergerak (industri, dll) yang telah dipantau tentang emisi cerobong 5. Persentase Badan usaha yang telah memiliki dokumen lingkungan (UKL/UPL atau Amdal)	- 3 1500 5 80

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	2	3	4
		6. Persentase Usaha/industri yang menaati peraturan pembuangan air limbah	100%
		7. Persentase Usaha yang telah memiliki izin pengelolaan limbah B3	100%
		8. Persentase Pengendalian pada sumber pencemar memenuhi baku mutu	40%
		9. Persentase Badan usaha yang telah memiliki sertifikasi hijau	14
		10. Persentase Peran aktif masyarakat dan pendidikan dalam pengelolaan lingkungan hidup	100%
		11. Jumlah sarana dan prasarana 3R dan sarana persampahan RT yang terintegrasi mulai dari sumber sampah sampai dengan TPA	65 Bank Sampah, 4 Rumah kompos
		12. Jumlah Penyuluhan LH kepada masyarakat	12 kegiatan
44.	Meningkatnya upaya pelestarian seni dan budaya	1. Jumlah grup seni dan budaya 2. Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya 3. Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya 4. Jumlah sarana gedung seni dan budaya 5. Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	76 3 5 2 15

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	2	3	4
45.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata	1. Jumlah wisata nusantara 2. Jumlah wisata mancanegara 3. Jumlah destinasi/obyek wisata	599.968 64.848 13
46.	Berkembangnya usaha-usaha pendukung kepariwisataan	Jumlah usaha pendukung kepariwisataan	734

**TUJUAN, INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR KINERJA UTAMA
RPJMD KOTA BALIKPAPAN
(Hasil Review Tahun 2013)**

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan kecerdasan dan ketrampilan masyarakat.	IPM	<p>1. Meningkatnya kualitas/mutu pendidikan</p> <p>2. Meningkatnya aksesibilitas memperoleh pendidikan</p>	<p>1. Jumlah Tenaga Pendidik yang bersertifikat profesi</p> <p>2. Persentase capaian SPM pendidikan tingkat dasar</p> <p>3. Persentase capaian SPM pendidikan tingkat menengah</p> <p>4. Angka Putus Sekolah</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ SD ➤ SMP Sederajat ➤ SLTA Sederajat <p>5. Jumlah sekolah standar nasional</p> <p>1. Angka Partisipasi Kasar :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ SD / MI Sederajat ➤ SMP / MTs Sederajat ➤ SLTA / MA sederajat <p>2. Angka Partisipasi Murni :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ SD / MI Sederajat ➤ SMP / MTs Sederajat ➤ SLTA / MA sederajat

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	2	3	4	5
				3. Jumlah Perpustakaan : <ul style="list-style-type: none"> ➤ Formal ➤ Informal 4. Tingkat literasi usia > 15 tahun 5. Kurikulum SMK yang diintegrasikan kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri 6. APK Pendidikan Usia Dini 7. Rasio Tingkat Pendidikan dasar yang ditamatkan Siswa Gakin
			3. Meningkatnya kualitas tenaga kerja	1. Angka beban tanggungan (Dependency ratio) 2. Angka Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja 3. Persentase penggunaan peralatan K3 di perusahaan 4. Persentase lembaga K3 di perusahaan 5. Jumlah perusahaan yang menerima penghargaan Zero Accident dan SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja)

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	2	3	4	5
2.	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.	UHH	4. Meningkatnya kesehatan masyarakat	1. UHH 2. AKI/AKB : <ul style="list-style-type: none"> ➤ Angka kematian Ibu Nifas ➤ Angka Kematian Balita ➤ Angka kematian Neonatal ➤ Persalinan dengan Tenaga Kesehatan 3. Persentase ASI eksklusif
			5. Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan kesehatan	1. Jumlah fasilitas kesehatan tingkat I 2. Jumlah fasilitas kesehatan rujukan 3. Puskesmas perawatan mampu PONED 4. Presentase produksi sediaan farmasi & makanan yang memenuhi standar mutu dan distribusi 5. Presentase puskesmas dalam pelaksanaan PIO (Pelayanan Informasi Obat) 6. Jumlah fasilitas kesehatan dengan poli kesehatan remaja (PKPR) 7. Jumlah fasilitas kesehatan santunan lansia 8. Jumlah jaminan kesehatan 9. Persentase pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	2	3	4	5
				10. Jumlah puskesmas yang memberikan fasilitas kesehatan rujukan Tk I
1.	Meningkatkan pembinaan pemuda dan olahraga.	Prestasi/Penghargaan	6. Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan	1. Jumlah organisasi kepemudaan aktif
			7. Meningkatnya kualitas dan prestasi olahraga dan olahraga tradisional	1. Jumlah organisasi Cabang olahraga 2. Jumlah prestasi olahraga : 3. Jumlah klub olahraga tradisional
2.	Meningkatkan kualitas keagamaan masyarakat.	Persentase kerukunan umat beragama	8. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan agama	1. Jumlah prestasi masyarakat dalam lomba bidang keagamaan : ➤ Tingkat Internasional ➤ Tingkat Nasional ➤ Tingkat Regional 2. Jumlah TKA / TPA 3. Jumlah Pembangunan fasilitas keagamaan
			9. Meningkatnya kerukunan intra dan antar umat beragama	1. Jumlah konflik masyarakat yang berlatarbelakang Agama
7.	Mengembangkan	Bertambahnya UMKM dan permodalan	10. Meningkatnya kualitas pengelolaan	1. Jumlah Koperasi Aktif (%) 2. Jumlah UMKM Produktif

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	2	3	4	5
	Kewirausahaan UMKM dan Koperasi.		UMKM dan Koperasi	3. Jumlah Produk Unggulan
			11. Meningkatkan Permodalan	1. Jumlah LKM (Lembaga Keuangan Mikro)/KSP (Koperasi Simpan Pinjam) 2. Jumlah BPR 3. % Kredit Usaha Kecil Menengah Nilai investasi
9.	Memantapkan kemandirian ekonomi masyarakat	Angka ketahanan pangan	12. Meningkatnya produktivitas Pertanian, Kelautan dan Perikanan	1. Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura : ➤ Padi ➤ Jagung ➤ Pepaya ➤ Pisang ➤ Nenas ➤ Salak ➤ Sayuran Dataran Rendah 2. Produksi hasil ternak : ➤ Daging Sapi ➤ Daging Ayam ➤ Telur Ayam 3. Produksi Budidaya Perikanan ➤ Produksi Budidaya Rumput Laut ➤ Produksi Perikanan Tangkap

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	2	3	4	5
			13. Meningkatnya pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin	1. Pemerataan pendapatan penduduk berpenghasilan di bawah 40% terendah 2. Persentase penduduk miskin
11.	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum.	Tingkat keamanan dan ketertiban	14. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban	1. Jumlah kelompok siskamling aktif 2. Jumlah kelurahan sadar hukum
13.	Meningkatkan kesadaran hukum dan pemberantasan KKN.	Angka Partisipasi Pemilu	15. Meningkatnya partisipasi masyarakat politik	1. Angka partisipasi pemilu
14.	Mengentaskan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Angka PMKS	16. Meningkatnya pelayanan dan perlindungan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	1. Jumlah panti/organisasi sosial dan rehabilitasi yang dikelola Pemerintah dan non pemerintah 2. Jumlah Masyarakat PMKS
15.	Meningkatkan peranan masyarakat dalam pencegahan dan	Penurunan kejadian bencana	17. Meningkatnya sistem kewaspadaan dini dan penanggulangan bencana	1. Terbentuknya sistem informasi Peringatan Dini Kejadian Bencana

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	2	3	4	5
	penanggulangan Bencana.		18. Meningkatnya partisipasi masyarakat/relawan dalam penanggulangan bencana	1. Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat 2. Jumlah Taruna Siaga Bencana
17.	Mewujudkan iklim investasi yang kondusif.	Angka pelayanan publik	19. Meningkatnya pelayanan administrasi dan perizinan investasi	1. Capaian IKM Unit Pelayanan Publik 2. Cakupan kepemilikan kartu Tanda Penduduk 3. Cakupan kepemilikan akte kelahiran 4. Jumlah investor/investasi 5. Jumlah penghargaan citra pelayanan prima
			20. Meningkatnya cakupan layanan persediaan daya listrik kepada masyarakat	1. Rasio Ketersediaan daya listrik
19.	Meningkatkan investasi berbasis keunggulan daerah.	Luasan kawasan industri dan perdagangan	21. Berkembangnya kawasan industri dan perdagangan yang berwawasan lingkungan	1. Jumlah luasan kawasan terbuka pada lahan industri 2. Persentase Pertumbuhan Industri 3. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB 4. Angka PDRB 5. Jumlah Sarana Perdagangan

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	2	3	4	5
				6. Jumlah Pasar yang berwawasan lingkungan 7. Jumlah pasar yang ditingkatkan sarana dan prasarana
21.	Menciptakan dan memperluas lapangan kerja.	Jumlah lapangan kerja	22. Meningkatnya lapangan usaha dan lapangan kerja	1. Jumlah Unit Usaha 2. Persentase Penyerapan tenaga kerja 3. Jumlah kesempatan kerja 4. Angka Pengangguran 5. Angka Partisipasi Angkatan Kerja
22.	Meningkatkan Sumber-sumber pendapatan daerah dan pembiayaan daerah.	Struktur APBD	23. Meningkatnya sumber-sumber pendapatan daerah	1. Pajak dan retribusi 2. Sumber Pendapatan Daerah lainnya
23.	Meningkatkan pelayanan publik yang prima	Indeks Pelayanan publik	24. Meningkatnya Kapasitas institusi penyelenggara pelayanan publik	1. Jumlah SKPD yang menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
24.	Melaksanakan Reformasi Birokrasi dalam penyelenggaraan.	Terlaksananya reformasi birokrasi	25. Tersusunnya roadmap reformasi birokrasi	1. Opini terhadap laporan keuangan daerah 2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) SKPD 3. Pemenuhan kebutuhan PNS 4. Rasio PNS yang mengikuti diklat teknis 5. Rasio PNS yang mengikuti diklat fungsional

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	2	3	4	5
				6. Peningkatan pemanfaatan SIMPEG 7. Tingkat Kapasitas Sumberdaya Aparatur (Diklat) : <ul style="list-style-type: none"> ➤ Diklat Pim II ➤ Diklat Pim III ➤ Diklat Pim IV
25.	Menyediakan prasarana dan sarana perhubungan yang nyaman, aman, efisien dan ramah lingkungan.	Tersedianya prasarana dan sarana perhubungan yang nyaman, aman, efisien dan ramah lingkungan	26. Meningkatnya manajemen dan fasilitas perlengkapan jalan	1. Jumlah uji kir angkutan umum 2. Jumlah rambu jalan, marka jalan, dan ATCS 3. Pemeliharaan Alat Pemberi Isyarat Lalu lintas (APILL) 4. Panjang jalan kota yang di bangun 5. Panjang jalan yang ditingkatkan 6. Panjang Jembatan yang dibangun 7. Panjang jalan yang dipelihara 8. Jumlah Perbaikan Simpang 9. Panjang trotoar yang ditingkatkan 10. Jumlah halte angkutan umum 11. Jumlah area parkir (gedung/taman parkir) 12. Jumlah Fasilitas Pelabuhan /Ruang Tunggu
			27. Terwujudnya Sarana Angkutan Umum Massal (SAUM)	1. Jumlah angkutan umum

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	2	3	4	5
26.	Menyediakan pelayanan air bersih/minum dan pengelolaan air limbah.	Tersedianya pelayanan air bersih/minum dan pengelolaan air limbah	28. Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih/air minum.	1. Jumlah produksi IPA 2. Jumlah Ketersediaan air baku 3. Persentase rumah tangga pengguna air bersih
			29. Tersedianya sistem jaringan dan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) terpadu	1. Cakupan pelayanan air limbah 2. Jumlah Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) terpusat
28.	Meningkatkan upaya pengendalian dan penanggulangan banjir dalam kota	Terkendalinya dan berkurangnya banjir	30. Berkurangnya titik/ lokasi banjir dan luas wilayah banjir	1. Jumlah Titik lokasi banjir 2. Jumlah bendali/ bozem 3. Panjang normalisasi sungai 4. Panjang saluran drainase permanen (primer, sekunder dan tersier) 5. Panjang saluran drainase permukiman permanen 6. Panjang saluran drainase permanen (primer, sekunder dan tersier) 7. Jalan inspeksi sungai
30.	Menciptakan perumahan dan lingkungan permukiman yang sehat dan layak huni	Terciptanya perumahan dan lingkungan permukiman yang sehat dan layak huni	31. Meningkatnya kualitas perumahan di kawasan permukiman kumuh.	1. Jumlah rumah tidak layak huni; 2. Persentase kawasan permukiman kumuh
			32. Terwujudnya penyediaan hunian vertikal (rusunawa dan rusunami)	1. Jumlah rusunami 2. Jumlah rusunawa

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	2	3	4	5
			33. Terwujudnya sanitasi sehat yang dapat diakses seluruh lapisan masyarakat	1. (%) rumah tinggal bersanitasi
31.	Menyediakan ruang kota yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan	Tersedianya ruang kota yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan	34. Tersedianya struktur dan pola ruang yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	1. Produk hukum tentang Rencana Tata Ruang Kota Balikpapan 2. Jumlah kegiatan sosialisasi Rencana Tata Ruang Kota Balikpapan 3. Tersedianya dokumen-dokumen perencanaan tata ruang
			35. Tersedianya tata ruang pesisir, dan pulau-pulau kecil.	1. Luas wilayah budidaya pesisir
			36. Terkendalinya pemanfaatan ruang.	1. (%) bangunan ber-IMB dengan satuan bangunan 2. (%) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang 3. Jumlah Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial 4. Jumlah bangunan perumahan 5. Luas hutan lindung 6. Luas wilayah ruang terbuka hijau (RTH)

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	2	3	4	5
34.	Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga	Keluarga sejahtera	37. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam program Keluarga Berencana	1. Akseptor aktif 2. Prevalensi Rate 3. Persentase partisipasi Gakin untuk berKB 4. Tingkat kelestarian ber KB <ul style="list-style-type: none"> ➤ 10 Tahun ➤ 15 Tahun ➤ 20 Tahun
37.	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat	Indeks pemberdayaan masyarakat	38. Meningkatnya pemanfaatan teknologi tepat guna	1. Jumlah inovasi Teknologi Tepat Guna
38.	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender	Indeks pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender	39. Meningkatnya kemampuan perempuan dalam keluarga dan lingkungan kerja	1. Partisipasi Perempuan di lembaga pemerintah 2. Rasio Pejabat PNS Perempuan dan laki-laki 3. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan 4. Menurunnya kasus kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga
39.	Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak.	Indeks kesejahteraan dan perlindungan anak	40. Meningkatnya kualitas anak	1. Jumlah prestasi anak : <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tingkat propinsi ➤ Tingkat nasional ➤ Tingkat Internasional

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	2	3	4	5
				2. Jumlah PAUD 3. Jumlah TK 4. Jumlah anak terlantar 5. Angka Kekerasan dan eksploitasi anak di bawah umur 6. Angka anak jalanan 7. Jumlah fasilitas bermain anak
40.	Meningkatkan daya dukung lingkungan hidup selaras dengan pengembangan ekonomi kota (eco2cities)	Meningkatnya daya dukung lingkungan hidup selaras dengan pengembangan ekonomi kota (eco2cities)	41. Terwujudnya peningkatan pelestarian dan pengembangan kawasan hutan, lahan dan DAS	1. Luas kawasan hutan 2. Luas rehabilitasi kawasan hutan 3. Jumlah kegiatan Pengamanan kawasan hutan 4. Luas konservasi kawasan mangrove 5. Luas hutan kota yang terehabilitasi dan tidak bermasalah 6. Luas hutan Kota yang sudah di pagar 7. Luas hutan kota 8. (%) terbangunnya Kebun Raya 9. Persentase Ruang Terbuka hijau publik dan privat 10. Rasio ketersediaan area pemakanan 11. Jumlah DAS yang termonitoring 12. Jumlah Rekomendasi untuk ijin pengguna air tanah 13. Luasan Penanaman pohon 14. Angka data keanekaragaman hayati 15. Luas lokasi percontohan KEHATI

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	2	3	4	5
			42. Meningkatnya kebersihan dan keindahan kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cakupan pelayanan persampahan 2. Volume pengurangan sampah melalui pengolahan sampah 3. Jumlah sarana dan prasarana operasional kebersihan 4. Luas area TPA 5. Frekuensi Kerja Bakti Massal
			43. Meningkatnya upaya pelestarian lingkungan hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase pengelolaan Gas Buang Industri 2. Jumlah stasiun monitoring udara beroperasi dan kondisi baik 3. Jumlah kendaraan yang telah mengikuti uji emisi 4. Jumlah sumber tidak bergerak (industri, dll) yang telah dipantau tentang emisi cerobong 5. Persentase Badan usaha yang telah memiliki dokumen lingkungan (UKL/UPL atau Amdal) 6. Persentase Usaha/industri yang menaati peraturan pembuangan air limbah 7. Persentase Usaha yang telah memiliki izin pengelolaan limbah B3 8. Persentase Pengendalian pada sumber pencemar memenuhi baku mutu

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	2	3	4	5
				9. Persentase Badan usaha yang telah memiliki sertifikasi hijau (Proper) 10. Persentase Peran aktif masyarakat dan pendidikan dalam pengelolaan lingkungan hidup 11. Jumlah sarana dan prasarana 3R dan sarana persampahan RT yang terintegrasi mulai dari sumber sampai dengan TPA 12. Jumlah Penyuluhan LH kepada masyarakat
41.	Mengembangkan dan melestarikan heterogenitas budaya	Persentase heterogenitas budaya	44. Meningkatnya upaya pelestarian seni dan budaya	1. Jumlah grup seni dan budaya 2. Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya 3. Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya 4. Jumlah sarana gedung seni dan budaya 5. Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan
44.	Mengembangkan pariwisata yang berwawasan	Bertambahnya jumlah destinasi dan usaha kepariwisataan	45. Meningkatnya kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata	1. Jumlah wisata nusantara 2. Jumlah wisata mancanegara 3. Jumlah destinasi/obyek wisata

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	2	3	4	5
	lingkungan		46. Berkembangnya usaha-usaha pendukung kepariwisataan	1. Jumlah usaha pendukung kepariwisataan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Pemerintah Kota Balikpapan selaku pengemban amanah masyarakat Kota Balikpapan melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Balikpapan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2012-2016 maupun RKPD Tahun 2012. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

A. PENGUNGKAPAN AKUNTABILITAS KINERJA

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Inpres No. 7 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Pemerintah Kota Balikpapan diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran dan indikator sasaran serta menggambarkan pula tingkat capaian pada program/kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya.

Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan Realisasi Indikator Sasaran melalui media **formulir Pengukuran Kinerja**. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan *Core Area* Kota Balikpapan sebagai kota yang layak dihuni menuju madinatul iman.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu:

- **85 s.d. 100 = Baik Sekali**
- **70 s.d. <85 = Baik**
- **55 s.d. <70 = Cukup**
- **< 55 = Kurang**

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Secara umum Pemerintah Kota Balikpapan telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2011 – 2016.

Perbandingan Indikator Makro
Kota Balikpapan dengan Provinsi Kalimantan Timur

No	Indikator Makro	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013	
		Kota Balikpapan	Pemprov Kaltim	Kota Balikpapan	Pemprov Kaltim	Kota Balikpapan	Pemprov Kaltim
1.	IPM	78.85	75.56	78.85	76.15	79.38	76.73
2.	AMH	98.78	97.21	98.78	97.05	98.88	97.55
3.	RLS	10.26	9.19	10.28	9.19	10.46	9.22
4.	AHH	72.39	71.40	72.39	71.40	72.61	71.61
5.	PPP	658.23	646.01	658.93	645.51	661.33	649.85
6.	LPP	0.71		3.96%		2.72%	
7.	LPE	8.61	3.93	8.66	1.83	9.03	5.63

Sumber : Bidang Sosial Budaya Bappeda Kota Balikpapan

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 07 Tahun 2013 telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 dengan jumlah sasaran strategis sebanyak 50 sasaran dan jumlah indikator kinerja sebanyak 276 indikator.

Menindak lanjuti hasil evaluasi Lakip Kota Balikpapan Tahun 2012, maka Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2012 – 2016 direview kembali dan ditetapkan bahwa tahun 2013 dan seterusnya, Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan

memiliki sasaran sebanyak 46 (empat puluh enam) dan indikator kinerja sebanyak 180 indikator kinerja.

Dari 46 sasaran dengan 180 indikator kinerja, pencapaian target indikator kinerja utama Pemerintah Kota Balikpapan pada masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

SASARAN 1 : MENINGKATNYA KUALITAS / MUTU PENDIDIKAN

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
1.	1. Jumlah Tenaga Pendidik yang bersertifikat profesi	750	488	65.06%
	2. Persentase capaian SPM pendidikan tingkat dasar	100%	98%	98%
	3. Persentase capaian SPM pendidikan tingkat menengah	100%	98%	98%
	4. Angka putus sekolah			
	a. SD	0.80%	0.92%	85%
	b. SMP Sederajat	5.79%	6.38%	89.8%
	c. SMA Sederajat	27.21%	29.02%	93.3%
	5. Jumlah sekolah standar nasional			
	a. SD	9	9	100%
	b. SMP Sederajat	10	12	120%

Dari data dan informasi pada tabel di atas, bahwa pencapaian sasaran ke- 1, yaitu meningkatnya kualitas/mutu pendidikan rata-rata mencapai **93.64 %**.

Hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian pada pencapaian sasaran 1 ini adalah sebagai berikut :

1. Indikator jumlah tenaga pendidik yang bersertifikat profesi tidak memenuhi target yang ditetapkan karena terbatasnya kuota sertifikasi dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur atau Pemerintah Pusat. Program sertifikasi profesi merupakan program Pemerintah Pusat sehingga pembebanan anggaran berada pada APBN sehingga Pemerintah Kota Balikpapan tidak dapat mengalokasikan penyelenggaraan sertifikasi profesi guru secara mandiri.
2. Pencapaian SPM baik pada SPM Pendidikan Dasar maupun Pendidikan Menengah belum mencapai target karena masih ada indikator SPM yang belum terpenuhi, yaitu masih adanya jumlah siswa dalam 1 rombel yang melebihi ketentuan SPM dan adanya sekolah yang belum memiliki laboratorium IPA.
3. Angka putus sekolah baik pada tingkatan SD, SMP sederajat dan SMA sederajat pada tahun 2013 ini belum berhasil dicapai sesuai target. Hal ini disebabkan karena masih adanya siswa yang berhenti sekolah karena keinginan orang tua siswa tersebut, sehingga diperlukan langkah konkrit dalam mengatasi masalah ini.

Pencapaian sasaran strategis kesatu jika dibandingkan dengan capaian tahun 2012 adalah sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2012	2013
1	2	3	4
1.	1. Jumlah Tenaga Pendidik yang bersertifikat profesi	584	488
	2. Persentase capaian SPM pendidikan tingkat dasar	97%	98%
	3. Persentase capaian SPM pendidikan tingkat menengah	97%	98%
	4. Angka putus sekolah		
	a. SD	0.92	0.92
	b. SMP Sederajat	6.38	6.38
	c. SMA Sederajat	29.02	29.02
	5. Jumlah sekolah standar nasional		
	a. SD	9	9
	b. SMP Sederajat	10	12

Pencapaian sasaran strategis kesatu jika dibandingkan dengan target RPJMD Tahun ke-2 adalah sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target RPJMD Tahun ke-2	2013
1	2	3	4
1.	1. Jumlah Tenaga Pendidik yang bersertifikat profesi	750	488
	2. Persentase capaian SPM pendidikan tingkat dasar	100%	98%
	3. Persentase capaian SPM pendidikan tingkat menengah	100%	98%

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target RPJMD Tahun ke-2	2013
1	2	3	4
	4. Angka putus sekolah		
	a. SD	0.80	0.92%
	b. SMP Sederajat	5.79	6.38%
	c. SMA Sederajat	27.21	29.02%
	5. Jumlah sekolah standar nasional		
	a. SD	9	9
	b. SMP Sederajat	10	12

Dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Balikpapan tahun 2013, pencapaian sasaran 1 meningkatnya kualitas/mutu pendidikan, terdapat 6 indikator yang belum mencapai target RPJMD dan 2 indikator telah mencapai target yang ditetapkan. Hal ini menjadi perhatian dalam progress percepatan pencapaian target RPJMD Kota Balikpapan 2011-2016.

SASARAN 2 : MENINGKATNYA AKSESIBILITAS MEMPEROLEH PENDIDIKAN DAN MENINGKATNYA PELAYANAN PENDIDIKAN BAGI MASYARAKAT MISKIN

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
2.	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar			
	a. SD	112.3%	112.3%	100%
	b. SMP	102.8%	102.8%	100%
	c. SLTA	80.8%	80.8%	100%

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
	2. Angka Partisipasi Murni			
	a. SD	90.75%	90.75%	100%
	b. SMP	69.41%	69.41%	100%
	c. SLTA	53.98%	53.98%	100%
	3. Jumlah Perpustakaan :			
	➤ Formal	140	140	100%
	➤ Informal	10	17	170%
	4. Persentase Tingkat literasi usia > 15 tahun	98.93%	98.95%	100%
	5. Kurikulum SMK yang diintegrasikan kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri	100%	100%	100%
	6. APK Pendidikan Usia Dini	45%	57.12%	126%
	7. Rasio tingkat pendidikan dasar yang ditamatkan siswa Gakin	100%	100%	100%

Dari data dan informasi pada tabel di atas, bahwa pencapaian sasaran 2 yaitu meningkatnya aksesibilitas memperoleh pendidikan dan meningkatnya pelayanan pendidikan bagi masyarakat miskin rata-rata mencapai **108 %**.

Pencapaian indikator kinerja utama yang menonjol pada sasaran ke-2 ini adalah pada bertambahnya jumlah perpustakaan informal di Kota Balikpapan. Hal ini seiring dengan berkembangnya program-program pendidikan luar sekolah yang dimotori oleh organisasi-organisasi kemasyarakatan/kepemudaan yang aktif.

Pencapaian sasaran strategis ke-2 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2012 adalah sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2012	2013
1	2	3	4
2.	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar		
	a. SD	111.84	112.3%
	b. SMP	102.23	102.8%
	c. SLTA	80.57	80.8%
	2. Angka Partisipasi Murni		
	a. SD	90.01	90.75%
	b. SMP	69.25	69.41%
	c. SLTA	53.95	53.98%
	3. Jumlah Perpustakaan :		
	➤ Formal	124	140
	➤ Informal	10	17
	4. Persentase Tingkat literasi usia > 15 tahun	98.48%	98.95%
	5. Kurikulum SMK yang diintegrasikan kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri	100%	100%
	6. APK Pendidikan Usia Dini	36.55%	57.12%
	7. Rasio tingkat pendidikan dasar yang ditamatkan siswa Gakin	100%	100%

Terdapat peningkatan pencapaian realisasi target dari tahun 2012, hal ini menunjukkan trend positif dari pencapaian sasaran keseluruhan.

Pencapaian sasaran strategis ke-2 jika dibandingkan dengan target RPJMD Tahun ke-2 adalah sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target RPJMD Tahun ke-2	2013
1	2	3	4
2.	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar		
	a. SD	112.3%	112.3%
	b. SMP	102.62%	102.8%
	c. SLTA	80.8%	80.8%
	2. Angka Partisipasi Murni		
	a. SD	90.75%	90.75%
	b. SMP	69.41%	69.41%
	c. SLTA	53.98%	53.98%
	3. Jumlah Perpustakaan :		
	➤ Formal	140	140
	➤ Informal	10	17
	4. Persentase Tingkat literasi usia > 15 tahun	98.93%	98.95%
	5. Kurikulum SMK yang diintegrasikan kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri	100%	100%
	6. APK Pendidikan Usia Dini	45%	57.12%
	7. Rasio tingkat pendidikan dasar yang ditamatkan siswa Gakin	100%	100%

Dibandingkan dengan RPJMD Kota Balikpapan pada target tahun 2013, pencapaian sasaran 2 yaitu meningkatnya aksesibilitas memperoleh pendidikan dan meningkatnya pelayanan pendidikan bagi masyarakat miskin telah mencapai target yang ditetapkan sehingga diyakini pada akhir tahun capaian perencanaan strategis dapat dipenuhi.

SASARAN 3 : MENINGKATNYA KUALITAS TENAGA KERJA

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
3	1. Angka beban tanggungan (Dependency ratio)	44.9	44.9	100%
	2. Angka kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja	182	173	105%
	3. Persentase penggunaan peralatan K3 di perusahaan	85%	67%	78.8%
	4. Persentase lembaga K3 di perusahaan	70%	66%	94.3%
	5. Jumlah perusahaan yang menerima penghargaan Zero Accident dan SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja)	35	36	103%

Dari data dan informasi pada tabel di atas, bahwa pencapaian sasaran ke-3 yaitu meningkatnya kualitas tenaga kerja rata-rata mencapai **97,66 %**.

Terdapat 1 indikator yang masih perlu mendapatkan perhatian oleh SKPD pemangku sasaran ke-3 yaitu penanganan K3 pada perusahaan di Kota Balikpapan.

Pencapaian sasaran strategis ke-3 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2012 adalah sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2012	2013
1	2	3	4
3	1. Angka beban tanggungan (Dependency ratio)	44.9	44.9
	2. Angka kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja	186	173
	3. Persentase penggunaan peralatan K3 di perusahaan	85%	67%
	4. Persentase lembaga K3 di perusahaan	82%	66%
	5. Jumlah perusahaan yang menerima penghargaan Zero Accident dan SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja)	28	36

Pencapaian sasaran strategis ke-3 jika dibandingkan dengan target RPJMD Tahun ke-2 adalah sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target RPJMD Tahun Ke-2	2013
1	2	3	4
3	1. Persentase Angka beban tanggungan (Dependency ratio)	44.9	44.9
	2. Angka kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja	186	173
	3. Persentase penggunaan peralatan K3 di perusahaan	85%	67%
	4. Persentase lembaga K3 di perusahaan	82%	66%
	5. Persentase jumlah perusahaan yang menerima penghargaan Zero Accident dan SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja)	28	36

Dibandingkan dengan RPJMD Kota Balikpapan pada target tahun 2013, pencapaian sasaran ke-3 yaitu meningkatnya kualitas tenaga kerja telah mencapai target yang ditetapkan sehingga diyakini pada akhir tahun capaian perencanaan strategis dapat dipenuhi.

SASARAN 4 : MENINGKATNYA STATUS KESEHATAN MASYARAKAT

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
1	2	4	4	5
4.	1. UHH	72.3	72.61	100.42%
	2. AKI/AKB:			
	- Angka kematian ibu nifas	102/100.000KH	88/100.000KH	113.73%
	- Angka kematian balita	32/1.000KH	12/1.000KH	162.5%
	- Angka kematian Neonatal	-	8/1.000KH	-

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
1	2	4	4	5
	- Persalinan dengan Tenaga kesehatan	87%	93.82%	107.84%
	3. Persentase ASI eksklusif	50%	69.1%	138.2%

Dari data dan informasi pada tabel di atas, bahwa pencapaian sasaran ke-4 yaitu meningkatnya status kesehatan masyarakat rata-rata mencapai **124.45 %**.

Usia Harapan Hidup di Kota Balikpapan tahun 2013 mengalami peningkatan dari 72.3 naik menjadi 72.61. Salah satu hal yang mempengaruhi peningkatan ini adalah terpenuhinya kualitas dan akses pelayanan dasar kesehatan yang terlihat pada pencapaian sasaran ke-5 RPJMD Kota Balikpapan.

Indikator kinerja utama yang juga mengalami peningkatan pencapaian pada sasaran ke-4 ini merupakan hasil pelaksanaan program kegiatan sistem pengolahan data terpadu yang terintegrasi dari seluruh Rumah Sakit, Puskesmas dan klinik kesehatan yang ada di Kota Balikpapan.

Sedangkan hal yang perlu diperhatikan pada sasaran ke-4 ini adalah terdapat 8/1.000 angka kematian neonatal sehingga Dinas Kesehatan pada tahun mendatang dapat merencanakan program kegiatan yang dapat membantu berkurangnya angka kematian neonatal.

Pencapaian sasaran strategis ke-4 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2012 adalah sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2012	2013
1	2	4	4
4.	1. UHH	72.3	72.3
	2. AKI/AKB:		
	- Angka kematian ibu nifas	102/100.000KH	88/100.000KH
	- Angka kematian balita	32/1.000KH	12/1.000KH
	- Angka kematian Neonatal	0	8/1.000KH
	- Persalinan dengan Tenaga kesehatan	87%	93.82%
	3. Persentase ASI eksklusif	50%	69.1%

Pencapaian sasaran strategis ke-4 jika dibandingkan dengan target RPJMD Tahun ke-2 adalah sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target RPJMD Tahun Ke-2	2013
1	2	4	4
4.	1. UHH	72.3	72.3
	2. AKI/AKB:		
	- Angka kematian ibu nifas	102/100.000KH	88/100.000KH
	- Angka kematian balita	32/1.000KH	12/1.000KH
	- Angka kematian Neonatal	0	8/1.000KH
	- Persalinan dengan Tenaga kesehatan	87%	93.82%
	3. Persentase ASI eksklusif	50%	69.1%

Dibandingkan dengan RPJMD Kota Balikpapan pada target tahun 2013, pencapaian sasaran ke-4 yaitu meningkatnya status kesehatan masyarakat telah mencapai target yang ditetapkan sehingga diyakini pada akhir tahun capaian perencanaan strategis dapat dipenuhi.

SASARAN 5 : MENINGKATNYA KUALITAS DAN AKSES PELAYANAN KESEHATAN

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
5.	1. Jumlah fasilitas kesehatan tingkat I	27PKM ; 28 Klinik	27PKM ; 28 Klinik	100%
	2. Jumlah fasilitas kesehatan rujukan	18	17	94.44%
	3. Puskesmas perawatan mampu PONED	5 PKM	6 PKM	120%
	4. Persentase produksi sediaan farmasi & makanan yang memenuhi standar mutu & distribusi	67%	70%	104%
	5. Presentase puskesmas dalam pelaksanaan PIO (Pelayanan Informasi Obat)	6 PKM	8 PKM	133.33%
	6. Jumlah Fasilitas kesehatan dengan poli kesehatan remaja.	15 PKM	12 PKM	80%
	7. Jumlah fasilitas kesehatan santunan lansia	1 PKM	1 PKM	100%
	8. Jumlah jaminan kesehatan			
	a. Jamkesda	150.000 jiwa	116.387 jiwa	122%
	b. JPK OR	1.000 jiwa	1.000 jiwa	100%
	c. Gakin	17.360 jiwa	17.360 jiwa	100%
	d. Jamkesmas	93.475 jiwa	87.673 jiwa	93.79%

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
	9. Persentase pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100 %	4.96%	4.96%
	10. Jumlah puskesmas yang memberikan fasilitas kesehatan rujukan TK.I	27 PKM	27 PKM	100%

Dari data dan informasi pada tabel di atas, bahwa pencapaian sasaran ke-5 yaitu meningkatnya kualitas dan akses pelayanan kesehatan rata-rata mencapai **113 %**.

Tahun 2013, pengguna layanan jamkesda mengalami penurunan yang berarti bahwa adanya peningkatan kesehatan di antara pemilik Jamkesda Kota Balikpapan. Sedangkan rendahnya presentase pelayanan kesehatan rujukan diakibatkan meningkatkan layanan kesehatan pada Puskesmas, dimana telah dioperasikannya 7 Puskesmas 24 jam dengan fasilitas rawat inap di Kota Balikpapan.

Pencapaian sasaran strategis ke-5 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2012 adalah sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2012	2013
1	2	3	4
5.	1. Jumlah fasilitas kesehatan tingkat I	27PKM ; 28 Klinik	27PKM ; 28 Klinik
	2. Jumlah fasilitas kesehatan rujukan	18	17
	3. Puskesmas perawatan mampu PONEB	5 PKM	6 PKM
	4. Persentase produksi sediaan farmasi & makanan yang memenuhi standar mutu & distribusi	67%	70%

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2012	2013
1	2	3	4
	5. Presentase puskesmas dalam pelaksanaan PIO (Pelayanan Informasi Obat)	6 PKM	8 PKM
	6. Jumlah Fasilitas kesehatan dengan poli kesehatan remaja.	15 PKM	12 PKM
	7. Jumlah fasilitas kesehatan santunan lansia	1 PKM	1 PKM
	8. Jumlah jaminan kesehatan		
	a. Jamkesda	150.000 jiwa	116.387 jiwa
	b. JPK OR	1.000 jiwa	1.000 jiwa
	c. Gakin	17.360 jiwa	17.360 jiwa
	d. Jamkesmas	93.475 jiwa	87.673 jiwa
	9. Persentase pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100 %	4.96%
	10. Jumlah puskesmas yang memberikan fasilitas kesehatan rujukan TK.I	27 PKM	27 PKM

Pencapaian sasaran strategis ke-5 jika dibandingkan dengan target RPJMD Tahun ke-2 adalah sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target RPJMD Tahun Ke-2	2013
1	2	3	4
5.	1. Jumlah fasilitas kesehatan tingkat I	27PKM ; 28 Klinik	27PKM ; 28 Klinik
	2. Jumlah fasilitas kesehatan rujukan	18	17
	3. Puskesmas perawatan mampu PONED	5 PKM	6 PKM
	4. Persentase produksi sediaan farmasi & makanan yang memenuhi standar mutu & distribusi	67%	70%
	5. Presentase puskesmas dalam pelaksanaan PIO (Pelayanan Informasi Obat)	6 PKM	8 PKM

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target RPJMD Tahun Ke-2	2013
1	2	3	4
	6. Jumlah Fasilitas kesehatan dengan poli kesehatan remaja.	15 PKM	12 PKM
	7. Jumlah fasilitas kesehatan santunan lansia	1 PKM	1 PKM
	8. Jumlah jaminan kesehatan		
	a. Jamkesda	150.000 jiwa	116.387 jiwa
	b. JPK OR	1.000 jiwa	1.000 jiwa
	c. Gakin	17.360 jiwa	17.360 jiwa
	d. Jamkesmas	93.475 jiwa	87.673 jiwa
	9. Persentase pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100 %	4.96%
	10. Jumlah puskesmas yang memberikan fasilitas kesehatan rujukan TK.I	27 PKM	27 PKM

Dibandingkan dengan RPJMD Kota Balikpapan pada target tahun 2013, pencapaian sasaran ke-5 yaitu meningkatnya kualitas dan akses pelayanan kesehatan telah mencapai target yang ditetapkan sehingga diyakini pada akhir tahun capaian perencanaan strategis dapat dipenuhi.

SASARAN 6 : MENINGKATNYA PERAN PEMUDA DALAM PEMBANGUNAN

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
1	2	4	5	6
6.	Jumlah organisasi kepemudaan aktif	73	73	100%

Dari data dan informasi pada tabel di atas, bahwa pencapaian sasaran ke-6 yaitu meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan rata-rata mencapai **100 %**.

Pencapaian sasaran strategis ke-6 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2012 adalah sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2012	2013
1	2	4	5
6.	Jumlah organisasi kepemudaan aktif	73	73

Pencapaian sasaran strategis ke-6 jika dibandingkan dengan target RPJMD Tahun ke-2 adalah sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target RPJMD Tahun Ke-2	2013
1	2	4	5
6.	Jumlah organisasi kepemudaan aktif	73	73

Dibandingkan dengan RPJMD Kota Balikpapan pada target tahun 2013, pencapaian sasaran ke-6 yaitu meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan telah mencapai target yang ditetapkan sehingga diyakini pada akhir tahun capaian perencanaan strategis dapat dipenuhi.

**SASARAN 7 : MENINGKATNYA KUALITAS DAN PRESTASI
OLAHRAGA DAN OLAHRAGA TRADISIONAL**

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
8.	1. Jumlah organisasi Cabang olahraga	45	45	100%
	2. Jumlah prestasi olahraga	45	45	100%
	3. Jumlah klub olahraga tradisional	3	3	100%

Dari data dan informasi pada tabel di atas, bahwa pencapaian sasaran ke-7 yaitu meningkatnya kualitas dan prestasi olahraga dan Olahraga Tradisional rata-rata mencapai **100 %**.

Pencapaian sasaran strategis ke-7 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2012 adalah sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2012	2013
1	2	3	4
8.	1. Jumlah organisasi Cabang olahraga	45	45
	2. Jumlah prestasi olahraga	45	45
	3. Jumlah klub olahraga tradisional	3	3

Pencapaian sasaran strategis ke-7 jika dibandingkan dengan target RPJMD Tahun ke-2 adalah sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET RPJMD Tahun Ke-2	2013
1	2	3	4
8.	1. Jumlah organisasi cabang olahraga	45	45
	2. Jumlah prestasi olahraga	45	45
	3. Jumlah klub olahraga tradisional	3	3

Dibandingkan dengan RPJMD Kota Balikpapan pada target tahun 2013, pencapaian sasaran ke-7 yaitu meningkatnya kualitas dan prestasi olahraga dan Olahraga Tradisional. telah mencapai target yang ditetapkan sehingga diyakini pada akhir tahun capaian perencanaan strategis dapat dipenuhi.

SASARAN 8 : MENINGKATNYA PEMAHAMAN DAN PENGAMALAN AGAMA

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISA SI	%
1	2	3	4	5
9.	1. Jumlah prestasi masyarakat dalam lomba bidang keagamaan			
	a. Nasional	20	11	55%
	b. Regional	25	22	88%
	2. Jumlah TKA / TPA	330	330	100%
	3. Jumlah Pembangunan fasilitas keagamaan	113	113	100%

Dari data dan informasi pada tabel di atas, bahwa pencapaian sasaran ke-8 yaitu meningkatnya pemahaman dan pengamalan agama rata-rata mencapai **81 %**.

Perlu pembinaan lebih intensif agar prestasi masyarakat dalam lomba bidang keagamaan dapat meningkat pada tahun yang akan datang.

Pencapaian sasaran strategis ke-8 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2012 adalah sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2012	2013
1	2	3	4
8.	1. Jumlah prestasi masyarakat dalam lomba bidang keagamaan		
	c. Nasional	20	11
	d. Regional	25	22
	2. Jumlah TKA / TPA	330	330
	3. Jumlah Pembangunan fasilitas keagamaan	113	113

Pencapaian sasaran strategis ke-8 jika dibandingkan dengan target RPJMD Tahun ke-2 adalah sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET RPJMD Tahun Ke-2	2013
1	2	3	4
8.	1. Jumlah prestasi masyarakat dalam lomba bidang keagamaan		
	a. Nasional	20	11
	b. Regional	25	22
	2. Jumlah TKA / TPA	330	330
	3. Jumlah Pembangunan fasilitas keagamaan	113	113

Dibandingkan dengan RPJMD Kota Balikpapan pada target tahun 2013, pencapaian sasaran ke-8 yaitu meningkatnya pemahaman dan pengamalan agama telah mencapai target yang ditetapkan sehingga diyakini pada akhir tahun capaian perencanaan strategis dapat dipenuhi.

SASARAN 9 : MENINGKATNYA KERUKUNAN INTRA DAN ANTAR UMAT BERAGAMA

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
9.	1. Jumlah konflik masyarakat yang berlatar belakang Agama	0	0	100%

Dari data dan informasi pada tabel di atas, bahwa pencapaian sasaran ke-9 yaitu meningkatnya kerukunan intra dan antar umat beragama rata-rata mencapai **100 %**.

Situasi kondusif di Kota Balikpapan ini tentunya sangat mendukung pencapaian seluruh sasaran strategis Kota Balikpapan dan pencapaian visi Kota Balikpapan sebagai Kota Balikpapan yang nyaman dihuni menuju Madinatul Iman.

Hal ini didukung dengan aktifnya peran Forum Komunikasi Umat Beragama Kota Balikpapan dan serta telah tercapainya juga sasaran ke-14 meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban.

Pencapaian sasaran strategis ke-9 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2012 adalah sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2012	2013
1	2	3	4
9.	1. Jumlah konflik masyarakat yang berlatar belakang Agama	0	0

Pencapaian sasaran strategis ke-9 jika dibandingkan dengan target RPJMD Tahun ke-2 adalah sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET RPJMD Tahun Ke-2	2013
1	2	3	4
9.	1. Jumlah konflik masyarakat yang berlatar belakang Agama	0	0

Dibandingkan dengan RPJMD Kota Balikpapan pada target tahun 2013, pencapaian sasaran ke-9 yaitu meningkatnya kerukunan intra dan antar umat beragama telah mencapai target yang ditetapkan sehingga diyakini pada akhir tahun capaian perencanaan strategis dapat dipenuhi.

**SASARAN 10 : MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN
UMKM DAN KOPERASI**

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
10	1. Jumlah Koperasi Aktif (%)	385	410	106.49%
	2. Jumlah UMKM Produktif	14.770	19.017	129%
	3. Jumlah Produk unggulan	2	2	100%

Dari data dan informasi pada tabel di atas, bahwa pencapaian sasaran ke-10 yaitu meningkatnya kualitas pengelolaan UMKM dan Koperasi rata-rata mencapai **111.96 %**.

Realisasi pencapaian sasaran pada sasaran ke-10 ini berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini terjadi karena pembinaan terhadap koperasi dan UMKM yang telah berjalan dengan baik serta berhasilnya program kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Balikpapan bekerjasama dengan tenaga ahli di bidangnya.

Pencapaian sasaran strategis ke-10 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2012 adalah sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2012	2013
1	2	3	4
10	1. Jumlah Koperasi Aktif (%)	403	410
	2. Jumlah UMKM Produktif	17.686	19.017
	3. Jumlah Produk unggulan	6	2

Pencapaian sasaran strategis ke-8 jika dibandingkan dengan target RPJMD Tahun ke-2 adalah sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET RPJMD Tahun Ke-2	2013
1	2	3	4
10	1. Jumlah Koperasi Aktif (%)	385	410
	2. Jumlah UMKM Produktif	14.770	19.017
	3. Jumlah Produk unggulan	5	2

Dibandingkan dengan RPJMD Kota Balikpapan pada target tahun 2013, pencapaian sasaran ke-10 yaitu meningkatnya kualitas pengelolaan UMKM dan Koperasi telah mencapai target yang ditetapkan sehingga diyakini pada akhir tahun capaian perencanaan strategis dapat dipenuhi.

Untuk indikator kinerja utama jumlah produk unggulan, target RPJMD tahun ke-2 merupakan target akumulasi dari tahun ke-1 sehingga secara tertulis bahwa target tahun 2013 tidak tercapai namun pada kenyataan jumlah produk unggulan telah mencapai target tahun ke-2 RPJMD.

SASARAN 11 : MENINGKATNYA KUALITAS PRODUK UMKM DAN KOPERASI

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
11	1. Jumlah LKM	12	15	125%
	2. Jumlah BPR	1	0	0
	3. Persentase KUKM	65.46%	65.46%	100%

Dari data dan informasi pada tabel di atas, bahwa pencapaian sasaran ke-11 yaitu meningkatnya kualitas produk UMKM dan Koperasi rata-rata mencapai **75 %**.

Sampai dengan tahun 2013, Bank Perkreditan Rakyat yang dikelola Pemerintah Kota Balikpapan belum dapat diwujudkan. Proses pembentukan BPR dimaksud masih dalam tahap penyusunan draft Peraturan Daerah Kota Balikpapan. Sementara itu, BPR yang dikelola pihak swasta telah berkembang di Kota Balikpapan.

Pada saat ini pencapaian sasaran strategis ke-11 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2012 adalah sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2012	2013
1	2	3	4
11	1. Jumlah LKM	15	15
	2. Jumlah BPR	0	0
	3. Persentase KUKM	65.46%	65.46

Pencapaian sasaran strategis ke-11 jika dibandingkan dengan target RPJMD Tahun ke-2 adalah sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET RPJMD Tahun Ke-2	2013
1	2	3	4
11	1. Jumlah LKM	15	15
	2. Jumlah BPR	1	0
	3. Persentase KUKM	65.46%	65.46%

Dibandingkan dengan RPJMD Kota Balikpapan pada target tahun 2013, pencapaian sasaran ke-11 yaitu meningkatnya kualitas produk UMKM dan Koperasi 2 indikator kinerja utama telah mencapai target yang ditetapkan namun masih ada 1 indikator yang belum tercapai dan dijadikan progress pada pencapaian pada tahun 2014.

SASARAN 12 : MENINGKATNYA PRODUKTIVITAS PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
12	1. Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura	58.522,5 Ton	56.763 Ton	97%
	2. Produksi hasil ternak	2.761,35 Ton	3.214 Ton	116.39%
	3. Produksi Budidaya Perikanan	8.222,8 Ton	8.875,3 Ton	107.93%

Dari data dan informasi pada tabel di atas, bahwa pencapaian sasaran ke-12 yaitu meningkatnya produktivitas Pertanian, Kelautan dan Perikanan rata-rata mencapai **107.1 %**.

Dari capaian seluruh indikator dalam sasaran ke-12 ini, terdapat 1 komponen indikator yang tidak terpenuhi yaitu Produktivitas tanaman pangan dan hortikultura khususnya produksi padi. Sehingga diperlukan strategi yang tepat untuk dapat meningkatkan produksi makanan pokok tersebut.

Produktivitas tanaman pangan dan hortikultura meliputi produksi padi, produksi jagung, produksi papaya, produksi pisang, produksi nenas, produksi salak dan produksi sayuran dataran rendah. Untuk produksi hasil ternak meliputi daging sapi, daging ayam dan telur ayam. Sedangkan untuk produksi budidaya perikanan meliputi produksi rumput laut dan produksi ikan tangkap.

Pencapaian sasaran strategis ke-12 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2012 adalah sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2012	2013
1	2	3	4
12	1. Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura	46.507 Ton	56.763 Ton
	2. Produksi hasil ternak	3.215,45 Ton	3.214 Ton
	3. Produksi Budidaya Perikanan	10.810,9 Ton	8.875,3 Ton

Pencapaian sasaran strategis ke-12 jika dibandingkan dengan target RPJMD Tahun ke-2 adalah sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET RPJMD Tahun Ke-2	2013
1	2	3	4
12	1. Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura	58.472,5 Ton	56.763 Ton
	2. Produksi hasil ternak	2.757,35 Ton	3.214 Ton
	3. Produksi Budidaya Perikanan	7.750,2 Ton	8.875,3 Ton

Dibandingkan dengan RPJMD Kota Balikpapan pada target tahun 2013, pencapaian sasaran ke-12 yaitu meningkatnya produktivitas Pertanian, Kelautan dan Perikanan telah mencapai target yang ditetapkan bahkan telah mampu melampaui target yang ditetapkan sehingga diyakini pada akhir tahun capaian perencanaan strategis dapat dipenuhi.

SASARAN 13 : MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MISKIN

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
13	1. Pemerataan pendapatan penduduk berpenghasilan di bawah 40% terendah	16.58%	16.58%	100%
	2. Persentase penduduk miskin	3.79%	3.79%	100%

Dari data dan informasi pada tabel di atas, bahwa pencapaian sasaran ke-13 yaitu meningkatnya pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin rata-rata mencapai **100 %**.

Pencapaian sasaran strategis ke-13 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2012 adalah sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2012	2013
1	2	3	4
13	1. Pemerataan pendapatan penduduk berpenghasilan di bawah 40% terendah 2. Persentase penduduk miskin	16.58% 3.79%	16.58% 3.79%

Pencapaian sasaran strategis ke-13 jika dibandingkan dengan target RPJMD Tahun ke-2 adalah sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET RPJMD Tahun Ke-2	2013
1	2	3	4
13	1. Pemerataan pendapatan penduduk berpenghasilan di bawah 40% terendah 2. Persentase penduduk miskin	16.58% 3.79%	16.58% 3.79%

Dibandingkan dengan RPJMD Kota Balikpapan pada target tahun 2013, pencapaian sasaran ke-13 yaitu meningkatnya pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin telah mencapai target yang ditetapkan sehingga diyakini pada akhir tahun capaian perencanaan strategis dapat dipenuhi.

**SASARAN 14 : MENINGKATNYA KESADARAN MASYARAKAT
DALAM MENJAGA KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM**

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
14	1. Jumlah kelompok siskamling aktif	475	475	100%
	2. Jumlah kelurahan sadar hukum.	12	12	100%

Dari data dan informasi pada tabel di atas, bahwa pencapaian sasaran ke-14 yaitu meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum rata-rata mencapai **100 %**.

Pencapaian sasaran strategis ke-14 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2012 adalah sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2012	2013
1	2	3	4
14	1. Jumlah kelompok siskamling aktif	475	475
	2. Jumlah kelurahan sadar hukum.	12	12

Pencapaian sasaran strategis ke-14 jika dibandingkan dengan target RPJMD Tahun ke - 2 adalah sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET RPJMD Tahun Ke-2	2013
1	2	3	4
14	1. Jumlah kelompok siskamling aktif	475	475
	2. Jumlah kelurahan sadar hukum.	12	12

Dibandingkan dengan RPJMD Kota Balikpapan pada target tahun 2013, pencapaian sasaran ke-14 yaitu meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum telah mencapai target yang ditetapkan sehingga diyakini pada akhir tahun capaian perencanaan strategis dapat dipenuhi.

SASARAN 15 : MENINGKATNYA PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
1	3	4	5	6
15	Angka partisipasi pemilu	62%	62.25%	100.4%

Dari data dan informasi pada tabel di atas, bahwa pencapaian sasaran ke-15 yaitu meningkatnya partisipasi politik masyarakat rata-rata mencapai **100.4 %**.

Jumlah pemilih Kota Balikpapan yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Balikpapan adalah 406.260 pemilih.

Pencapaian sasaran strategis ke-15 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2012 adalah sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2012	2013
1	2	3	4
15	Angka partisipasi pemilu	62	62.25

Pencapaian sasaran strategis ke-15 jika dibandingkan dengan target RPJMD Tahun ke - 2 adalah sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target RPJMD Tahun Ke-2	2013
1	2	3	4
15	Angka partisipasi pemilu	82	62.25

Dibandingkan dengan RPJMD Kota Balikpapan pada target tahun 2013, pencapaian sasaran ke-15 yaitu meningkatnya partisipasi politik masyarakat belum mencapai target yang ditetapkan sehingga diperlukan program kegiatan yang mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dengan melibatkan seluruh elemen organisasi kemasyarakatan dan pemerintah.

**SASARAN 16 : MENINGKATNYA PELAYANAN DAN
PERLINDUNGAN TERHADAP PENYANDANG
MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL**

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
16	1. Jumlah panti sosial dan rehabilitasi yang dikelola Pemerintah dan non pemerintah	1	0	0
	2. Jumlah Masyarakat PMKS	549	490	110 %

Dari data dan informasi pada tabel di atas, bahwa pencapaian sasaran ke-16 yaitu meningkatnya pelayanan dan perlindungan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial rata-rata mencapai **55 %**.

Dalam rangka peningkatan pelayanan dan perlindungan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial khususnya tentang keberadaan panti sosial dan rehabilitasi yang dikelola Pemerintah, sampai dengan tahun 2013 ini Pemerintah Kota Balikpapan belum memiliki panti sosial dan rehabilitasi tersebut.

Proses pendirian panti sosial dan rehabilitasi Kota Balikpapan pada tahun 2013 berada pada kajian akademik dan kajian sosial dalam pendirian suatu kelembagaan. Diharapkan pada tahun 2014 kajian tersebut dapat ditindaklanjuti dan menjadi perhatian bagi segenap pemangku sasaran ini untuk segera memenuhi target yang telah ditetapkan.

Pencapaian sasaran strategis ke-16 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2012 adalah sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2012	2013
1	2	3	4
16	1. Jumlah panti sosial dan rehabilitasi yang dikelola Pemerintah dan non pemerintah	0	0
	2. Jumlah Masyarakat PMKS	907	490

Pencapaian sasaran strategis ke-16 jika dibandingkan dengan target RPJMD Tahun ke - 2 adalah sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target RPJMD Tahun Ke-2	2013
1	2	3	4
16	1. Jumlah panti sosial dan rehabilitasi yang dikelola Pemerintah dan non pemerintah	1	0
	2. Jumlah Masyarakat PMKS	549	490

Dibandingkan dengan RPJMD Kota Balikpapan pada target tahun 2013, pencapaian sasaran ke-16 yaitu meningkatnya pelayanan dan perlindungan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 1 indikator telah mencapai target yang ditetapkan sehingga diyakini pada akhir tahun capaian perencanaan strategis dapat dipenuhi. Namun 1 indikator belum mencapai target RPJMD.

SASARAN 17 : MENINGKATNYA SISTEM KEWASPADAAN DINI DAN PENANGGULANGAN BENCANA

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
17	Terbentuknya sistem informasi Peringatan Dini Kejadian Bencana	1	0	-

Dari data dan informasi pada tabel di atas, bahwa pencapaian sasaran ke-17 yaitu meningkatnya sistem kewaspadaan dini dan penanggulangan bencana rata-rata mencapai **0 %**.

Dalam rangka mencapai sasaran ke-17 ini, telah dilakukan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kewaspadaan dini dan penanggulangan bencana di Kota Balikpapan, antara lain telah dilaksanakannya penguatan kelembagaan SKPD pemangku fungsi sasaran ke-17 ini yaitu dari Badan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran menjadi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Kegiatan lain yang dilakukan adalah sosialisasi-sosialisasi tentang pencegahan bencana dan kebakaran, pembinaan organisasi kemasyarakatan, mengoptimalkan sarana, prasarana dan aparatur yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Diakui, sampai dengan tahun 2013 ini, Sistem informasi peringatan dini kejadian bencana belum dapat dilaksanakan secara sistemik namun berbagai usaha tengah dilakukan dalam rangka mewujudkan target tersebut. Diharapkan dengan penguatan kelembagaan yang dilakukan mampu membentuk sistem yang terpadu terkait penanggulangan dan penanganan bencana di Kota Balikpapan.

Pencapaian sasaran strategis ke-17 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2012 adalah sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2012	2013
1	2	3	4
17	Terbentuknya sistem informasi Peringatan Dini Kejadian Bencana	0	0

Pencapaian sasaran strategis ke-17 jika dibandingkan dengan target RPJMD Tahun ke - 2 adalah sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET RPJMD Tahun Ke-2	2013
1	2	3	4
17	Terbentuknya sistem informasi Peringatan Dini Kejadian Bencana	1	0

Dibandingkan dengan RPJMD Kota Balikpapan pada target tahun 2013, pencapaian ke-17 yaitu meningkatnya sistem kewaspadaan dini dan penanggulangan bencana belum mencapai target yang ditetapkan sehingga strategis untuk mencapai sasaran tersebut.

**SASARAN 18 : MENINGKATNYA PARTISIPASI PILAR
MASYARAKAT/RELAWAN DALAM
PENANGGULANGAN BENCANA**

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
1	3	4	5	6
18	1. Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat	220	206	93.6%
	2. Jumlah Taruna siaga bencana	480	480	100%

Dari data dan informasi pada tabel di atas, bahwa pencapaian sasaran ke-18 yaitu meningkatnya partisipasi pilar masyarakat/relawan dalam penanggulangan bencana rata-rata mencapai **96.8 %**.

Pekerja Sosial Masyarakat dalam indikator ke-1 sasaran ke-18 adalah tenaga sukarelawan dari masyarakat yang membantu dalam setiap kejadian bencana yang berada pada setiap kelurahan yang ada di Balikpapan. Indikator ini belum tercapai karena adanya pergantian personil yang mana personil yang baru belum memperoleh pelatihan khusus terkait bencana. Hal ini menjadi perhatian dari SKPD yang bertanggung jawab atas penanggulan bencana di Kota Balikpapan, khususnya terkait dengan pemekaran Kelurahan.

Pencapaian sasaran strategis ke-18 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2012 adalah sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2012	2013
1	3	4	5
18	1. Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat 2. Jumlah Taruna siaga bencana	206 480	206 480

Pencapaian sasaran strategis ke-18 jika dibandingkan dengan target RPJMD Tahun ke - 2 adalah sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target RPJMD Tahun Ke-2	2013
1	3	4	5
18	1. Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat 2. Jumlah Taruna siaga bencana	220 480	206 480

Dibandingkan dengan RPJMD Kota Balikpapan pada target tahun 2013, pencapaian ke-18 yaitu meningkatnya partisipasi pilar masyarakat/relawan dalam penanggulangan bencana belum mencapai target yang ditetapkan tetapi diyakini pada akhir tahun capaian perencanaan strategis dapat dipenuhi.

**SASARAN 19 : MENINGKATNYA PELAYANAN ADMINISTRASI
DAN PERIZINAN INVESTASI**

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
19	1. Capaian IKM unit Pelayanan Publik	65	130	200%
	2. Cakupan kepemilikan Kartu tanda penduduk	87%	78.3%	90%
	3. Cakupan kepemilikan akte kelahiran	63%	50.4%	80%
	4. Jumlah investor	75	138	184%
	5. Jumlah penghargaan citra pelayanan prima	0	0	0

Dari data dan informasi pada tabel di atas, bahwa pencapaian sasaran ke-19 yaitu meningkatnya pelayanan administrasi dan perizinan investasi rata-rata mencapai **110.8 %**.

Terdapat 1 indikator kinerja utama pada sasaran ke 19 ini yang tidak tercapai yaitu jumlah penghargaan citra pelayanan prima karena pada tahun 2013 Kementerian PAN dan RB tidak melaksanakan proses akhir pelaksanaan penilaian kinerja. Pemerintah Kota Balikpapan telah mengusulkan 3 (tiga) Unit Pelayanan Publik yang mewakili Kota Balikpapan, yaitu BPMP2T, RS Bersalin Sayang Ibu dan SMK N I Balikpapan.

Secara keseluruhan hasil Survey IKM pada SKPD/ Unit Pelayanan di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, 118 SKPD/ Unit Pelayanan berada pada kategori "**Baik**" dan 12 SKPD/ Unit Pelayanan berada pada kategori "**Sangat Baik**".

Pencapaian sasaran strategis ke-19 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2012 adalah sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2012	2013
1	2	3	4
19	1. Capaian IKM unit Pelayanan Publik	6	130
	2. Cakupan kepemilikan Kartu tanda penduduk	80%	90%
	3. Cakupan kepemilikan akte kelahiran	70%	80%
	4. Jumlah investor	75	138
	5. Jumlah penghargaan citra pelayanan prima	0	0

Pencapaian sasaran strategis ke-19 jika dibandingkan dengan target RPJMD Tahun ke - 2 adalah sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET RPJMD Tahun Ke-2	2013
1	2	3	4
19	1. Capaian IKM unit Pelayanan Publik	6	6
	2. Cakupan kepemilikan Kartu tanda penduduk	80%	80%
	3. Cakupan kepemilikan akte kelahiran	70%	70%
	4. Jumlah investor	75	138
	5. Jumlah penghargaan citra pelayanan prima	5	0

Dibandingkan dengan RPJMD Kota Balikpapan pada target tahun 2013, pencapaian ke-19 yaitu meningkatnya pelayanan administrasi dan perizinan investasi telah mencapai target yang ditetapkan sehingga diyakini pada akhir tahun capaian perencanaan strategis dapat dipenuhi. Walaupun pada indikator kinerja utama ke-5 belum tercapai namun hal itu disebabkan dari faktor eksternal Pemerintah Kota Balikpapan.

SASARAN 20 : MENINGKATNYA CAKUPAN LAYANAN PERSEDIAAN DAYA LISTRIK KEPADA MASYARAKAT

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
20	Rasio Ketersediaan daya listrik	178.668	178.668	100%

Dari data dan informasi pada tabel di atas, bahwa pencapaian sasaran ke-20 yaitu meningkatnya cakupan layanan persediaan daya listrik kepada masyarakat rata-rata mencapai **100 %**.

Pencapaian sasaran strategis ke-20 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2012 adalah sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2012	2013
1	2	3	4
20	Rasio Ketersediaan daya listrik	178.668	178.668

Pencapaian sasaran strategis ke-20 jika dibandingkan dengan target RPJMD Tahun ke - 2 adalah sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET RPJMD Tahun Ke-2	2013
1	2	3	4
20	Rasio Ketersediaan daya listrik	178.668	178.668

Dibandingkan dengan RPJMD Kota Balikpapan pada target tahun 2013, pencapaian ke-20 yaitu meningkatnya cakupan layanan persediaan daya listrik telah mencapai target yang ditetapkan sehingga diyakini pada akhir tahun capaian perencanaan strategis dapat dipenuhi.

SASARAN 21 : BERKEMBANGNYA KAWASAN INDUSTRI DAN PERDAGANGAN YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
21	1. Jumlah luas kawasan terbuka pada lahan industri	0.2%	0.2%	100%
	2. Persentase Pertumbuhan Industri	4.75%	4.75%	100%
	3. Kontribusi sektor industry terhadap PDRB	34.22T	34.22 T	100%
	4. Angka PDRB	48.45 T	48.45T	100%
	5. Jumlah Sarana Perdagangan	46	58	126%
	6. Jumlah Pasar yang berwawasan lingkungan	3	3	100%
	7. Jumlah pasar yang ditingkatkan sarana dan prasarana	7	7	100%

Dari data dan informasi pada tabel di atas, bahwa pencapaian sasaran ke-21 yaitu berkembangnya kawasan industry dan perdagangan yang berwawasan lingkungan rata-rata mencapai **103.7 %**.

Meningkatkan jumlah sarana perdagangan pada indikator kinerja utama ke-5 sasaran ke-21 pada tahun 2013 ini merupakan dampak positif dari bertambahnya jumlah investor yang ada di Kota Balikpapan sebagaimana yang disajikan pada pencapaian sasaran ke-19, indikator kinerja utama ke-4.

Pencapaian sasaran strategis ke-21 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2012 adalah sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2012	2013
1	2	3	4
21	1. Jumlah luas kawasan terbuka pada lahan industri	4.2%	0.2%
	2. Persentase Pertumbuhan Industri	5.55%	4.75%
	3. Kontribusi sektor industry terhadap PDRB	23.35 T	34.22 T
	4. Angka PDRB	6.23T	48.45T
	5. Jumlah Sarana Perdagangan	46	58
	6. Jumlah Pasar yang berwawasan lingkungan	3	3
	7. Jumlah pasar yang ditingkatkan sarana dan prasarana	7	7

Pencapaian sasaran strategis ke-21 jika dibandingkan dengan target RPJMD Tahun ke - 2 adalah sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET RPJMD Tahun Ke-2	2013
1	2	3	4
21	1. Jumlah luas kawasan terbuka pada lahan industri	0.2%	0.2%
	2. Persentase Pertumbuhan Industri	4.75%	4.75%
	3. Kontribusi sektor industry terhadap PDRB	34.22 T	34.22 T
	4. Angka PDRB	48.45T	48.45T
	5. Jumlah Sarana Perdagangan :	58	58
	6. Jumlah Pasar yang berwawasan lingkungan	3	3
	7. Jumlah pasar yang ditingkatkan sarana dan prasarana	7	7

Dibandingkan dengan RPJMD Kota Balikpapan pada target tahun 2013, pencapaian ke-21 yaitu berkembangnya kawasan industri dan perdagangan yang berwawasan lingkungan telah mencapai target yang ditetapkan sehingga diyakini pada akhir tahun capaian perencanaan strategis dapat dipenuhi.

SASARAN 22 : MENINGKATNYA LAPANGAN USAHA DAN LAPANGAN KERJA

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
22	1. Jumlah Unit Usaha	8.450	8.289	98%
	2. Penyerapan tenaga kerja	107.427	107.480	100%

Dari data dan informasi pada tabel di atas, bahwa pencapaian sasaran ke-22 yaitu meningkatnya lapangan usaha dan lapangan kerja rata-rata mencapai **99 %**.

Pencapaian sasaran strategis ke-22 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2012 adalah sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2012	2013
1	2	3	4
22	1. Jumlah Unit Usaha	17.981	8.289
	2. Persentase Penyerapan tenaga kerja	107.480	107.480

Pencapaian sasaran strategis ke-22 jika dibandingkan dengan target RPJMD Tahun ke - 2 adalah sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET RPMJP Tahun Ke-2	2013
1	2	3	4
22	1. Jumlah Unit Usaha	17.981	8.289
	2. Persentase Penyerapan tenaga kerja	107.480	107.480

Dibandingkan dengan RPJMD Kota Balikpapan pada target tahun 2013, pencapaian ke-22 yaitu meningkatnya lapangan usaha dan lapangan kerja telah mencapai target yang ditetapkan sehingga diyakini pada akhir tahun capaian perencanaan strategis dapat dipenuhi.

SASARAN 23 : MENINGKATNYA**SUMBER-SUMBER****PENDAPATAN DAERAH**

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
23	1. Pajak Daerah, Retribusi, Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dpisahkan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah.	2.214.991.437.841,-	2.421.958.180.024,97	109.3%
	2. Sumber pembiayaan daerah dari pihak ketiga	4	5	125%

Dari data dan informasi pada tabel di atas, bahwa pencapaian sasaran ke-23 yaitu Meningkatnya sumber-sumber pendapatan daerah rata-rata mencapai **117,15 %**.

Pencapaian sasaran strategis ke-23 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2012 adalah sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2012	2013
1	2	3	4
23	1. Pajak Daerah, Retribusi, Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dpisahkan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah.	43.799.812.820,77	2.421.958.180.024,97
	2. Sumber pembiayaan daerah dari pihak ketiga	5	5

Pencapaian sasaran strategis ke-23 jika dibandingkan dengan target RPJMD Tahun ke - 2 adalah sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET RPJMD Tahun Ke-2	2013
1	2	3	4
23	1. Pajak Daerah, Retribusi, Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. 2. Sumber pembiayaan daerah dari pihak ketiga	51.248.954.189,00 4	2.421.958.180.024,97 5

Dibandingkan dengan RPJMD Kota Balikpapan pada target tahun 2013, pencapaian ke-23 yaitu Meningkatnya sumber-sumber pendapatan daerah telah mencapai target yang ditetapkan sehingga diyakini pada akhir tahun capaian perencanaan strategis dapat dipenuhi.

SASARAN 24 : MENINGKATNYA KAPASITAS INSTITUSI PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
24	SKPD yang menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	13	13	100%

Dari data dan informasi pada tabel di atas, bahwa pencapaian sasaran ke-24 yaitu meningkatnya kapasitas institusi penyelenggara pelayanan publik rata-rata mencapai **100 %**.

Pencapaian pelaksanaan SPM di Kota Balikpapan telah dilaporkan dalam bentuk Laporan Percepatan Pencapaian SPM Tahun 2013 Kota Balikpapan.

Pencapaian sasaran strategis ke-24 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2012 adalah sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2012	2013
1	2	3	4
24	SKPD yang menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	13	13

Pencapaian sasaran strategis ke-24 jika dibandingkan dengan target RPJMD Tahun ke - 2 adalah sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target RPJMD Tahun Ke-2	2013
1	2	3	4
24	SKPD yang menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	13	13

Dibandingkan dengan RPJMD Kota Balikpapan pada target tahun 2013, pencapaian ke-24 yaitu meningkatnya kapasitas institusi penyelenggara pelayanan publik telah mencapai target yang ditetapkan sehingga diyakini pada akhir tahun capaian perencanaan strategis dapat dipenuhi.

SASARAN 25 : TERSUSUNNYA ROADMAP REFORMASI BIROKRASI

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
25	1. Opini terhadap laporan keuangan daerah	WTP	WDP	0%
	2. Nilai akuntabilitas kinerja instansi Pemerintahan (AKIP) SKPD	B	CC	0%
	3. Pemenuhan kebutuhan PNS	195	116	59%
	4. Rasio PNS yang mengikuti diklat teknis	1 : 9	1 : 9	100%
	5. Rasio PNS yang mengikuti diklat fungsional	1 : 51	1 : 51	100%
	6. Peningkatan pemanfaatan SIMPEG (Sistem Informasi, Formasi dan Mutasi)	5 modul	3 modul	60%
	7. Tingkat kapasitas sumberdaya aparatur (Diklat):			
	a. Diklat PIM II	6	5	83.33%
	b. Diklat PIM III	20	23	115%
	c. Diklat PIM IV	40	80	200%

Dari data dan informasi pada tabel di atas, bahwa pencapaian sasaran ke-25 yaitu tersusunnya Road Map Reformasi Birokrasi rata-rata mencapai **79.81 %**.

Hal-hal yang perlu diperhatikan pada capaian sasaran ke-25 ini adalah komitmen untk meningkatkan opini terhadap laporan keuangan daerah dan nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) Kota Balikpapan.

Walaupun terjadi peningkatan dari tahun 2012, namun masih perlu peningkatan dalam rangka mencapai target RPJMD Kota Balikpapan.

Kebutuhan PNS untuk Tahun 2013 belum terpenuhi secara maksimal karena pada proses pengadaan CPNS Kota Balikpapan yang berhasil lulus seleksi baik pada seleksi administrasi maupun pada seleksi tertulis hanya 116 peserta dari 195 formasi yang tersedia.

Pemanfaatan Simpeg pada tahun 2013 belum mencapai target yang ditetapkan, dari 5 modul yang ditargetkan, yang berhasil diselesaikan hanya 3 modul yaitu sistem informasi, formasi dan mutasi.

Pengiriman peserta Diklatpim II pada Tahun 2013 tidak mencapai target awal, hal ini disebabkan bahwa pejabat yang dimutasi dan atau dipromosikan telah memenuhi syarat jabatan.

Khusus penyusunan roadmap Reformasi Birokrasi di Kota Balikpapan bahwa Pemerintah Kota Balikpapan telah menyusun roadmap reformasi birokrasi dan saat ini telah dievaluasi dan disempurnakan lebih lanjut. Demikian juga dengan program PMPRB Kota Balikpapan, telah dilaksanakan dan dijadualkan pengiriman hasil penilaian akan disampaikan pada tahun 2014.

Pencapaian sasaran strategis ke-25 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2012 adalah sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2012	2013
1	2	3	4
25	1. Opini terhadap laporan keuangan daerah	WDP	WDP
	2. Nilai akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintahan (AKIP) SKPD	C	CC
	3. Pemenuhan kebutuhan PNS	54	116
	4. Rasio PNS yang mengikuti diklat teknis	1 : 11	1 : 9
	5. Rasio PNS yang mengikuti diklat fungsional	1 ; 155	1 : 51
	6. Peningkatan pemanfaatan SIMPEG (Sistem Informasi, Formasi dan Mutasi)	4 modul	3 modul
	7. Tingkat kapasitas sumberdaya aparatur (Diklat):		
	d. Diklat PIM II	3	5
	e. Diklat PIM III	19	23
	f. Diklat PIM IV	40	80

Pencapaian sasaran strategis ke-25 jika dibandingkan dengan target RPJMD Tahun ke - 2 adalah sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target RPJMD Tahun ke-2	2013
1	2	3	4
26	1. Opini terhadap laporan keuangan daerah	WTP	WDP

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target RPJMD Tahun ke-2	2013
1	2	3	4
	2. Nilai akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintahan (AKIP) SKPD	B	CC
	3. Pemenuhan kebutuhan PNS	195	116
	4. Rasio PNS yang mengikuti diklat teknis	1 : 9	1 : 9
	5. Rasio PNS yang mengikuti diklat fungsional	1 : 58	1 : 51
	6. Peningkatan pemanfaatan SIMPEG (Sistem Informasi, Formasi dan Mutasi)	5 modul	3 modul
	7. Tingkat kapasitas sumberdaya aparatur (Diklat):		
	a. Diklat PIM II	6	5
	b. Diklat PIM III	20	23
	c. Diklat PIM IV	40	80

Dibandingkan dengan RPJMD Kota Balikpapan pada target tahun 2013, pencapaian ke-25 yaitu tersusunnya Road Map Reformasi Birokrasi, 3 indikator telah mencapai target yang ditetapkan sedangkan indikator lainnya belum mencapai target namun diyakini pada akhir tahun capaian perencanaan strategis dapat dipenuhi.

SASARAN 26 : MENINGKATNYA MANAJEMEN DAN FASILITAS PERLENGKAPAN JALAN

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
26	1. Jumlah uji kir angkutan umum	50.000	51.995	103.99%
	2. Jumlah rambu jalan, marka jalan, dan ATCS			
	a. Rambu	100	100	100%
	b. Marka Jalan	1.799m ²	1.799m ²	100%
	c. ATCS	14	14	100%
	3. Pemeliharaan alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL)	14	14	100%
	4. Panjang jalan kota yang dibangun	3 km	7.9 km	263%
	5. Panjang jalan yang ditingkatkan	15 km	32.8 km	218.66%
	6. Panjang jembatan yang dibangun	50 m	53 m	106%
	7. Panjang jalan yang dipelihara	500 m	625.8 m	125%
	8. Jumlah perbaikan simpang	1 titik	1 titik	100%
	9. Panjang trotoar yang ditingkatkan (pemeliharaan)	350 m	1000 m	285.7%
	10. Jumlah halte angkutan umum	4	0	0%
	11. Jumlah area parkir	21	21	100%
	12. Jumlah fasilitas pelabuhan/ ruang tunggu	1	1	100%

Dari data dan informasi pada tabel di atas, bahwa pencapaian sasaran ke-26 yaitu meningkatnya manajemen dan fasilitas perlengkapan jalan rata-rata mencapai **164.4 %**.

Pencapaian realisasi sasaran ke-26, khususnya pada indikator kinerja utama nomor 4 sampai dengan 9 telah mencapai target bahkan telah melampaui target yang ditetapkan. Salah satu faktor keberhasilannya adalah terserapnya secara maksimal anggaran program dan kegiatan tersebut.

Panjang jembatan yang dibangun adalah total panjang dari pembangunan 6 (enam) buah jembatan, yaitu jembatan mess perwira/saluran primer pandan sari (2 jembatan), jembatan RT.31 Kelurahan Manggar Baru, Jembatan RT. 10 Kelurahan Manggar, Jembatan RT. 8 Kelurahan Lamaru dan Jembatan Jalan AMD 36.

Hal yang perlu mendapatkan perhatian pada pencapaian sasaran ke-26 ini adalah pada indikator pembangunan halte angkutan umum yang pada tahun 2013 tidak terwujud karena adanya permasalahan dalam proses lelang.

Pencapaian sasaran strategis ke-26 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2012 adalah sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2012	2013
1	2	3	4
26	1. Jumlah uji kir angkutan umum	46.550	51.995
	2. Jumlah rambu jalan, marka jalan, dan ATCS		
	a. Rambu	100	100
	b. Marka Jalan	1.799	1.799m2
	c. ATCS	14	14
	3. Pemeliharaan alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL)	14	14
	4. Panjang jalan kota yang dibangun	6.86 km	7.9 km

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2012	2013
1	2	3	4
	5. Panjang jalan yang ditingkatkan	3.9 km	32.8 km
	6. Panjang jembatan yang dibangun	8 Bh	6 Bh
	7. Panjang jalan yang dipelihara	518 m	625.8 m
	8. Jumlah perbaikan simpang	2 Titik	1 Titik
	9. Panjang trotoar yang ditingkatkan	212 m	350 m
	10. Jumlah halte angkutan umum	4	0
	11. Jumlah area parkir	21	21
	12. Jumlah fasilitas pelabuhan/ ruang tunggu	1	1

Pencapaian sasaran strategis ke-26 jika dibandingkan dengan target RPJMD Tahun ke - 2 adalah sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target RPJMD Tahun Ke-2	2013
1	2	3	4
26	1. Jumlah uji kir angkutan umum	51.000	51.995
	2. Jumlah rambu jalan, marka jalan, dan ATCS		
	a. Rambu	100	100
	b. Marka Jalan	1.799m ²	1.799m ²
	c. ATCS	14	14
	3. Pemeliharaan alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL)	14	14
	4. Panjang jalan kota yang dibangun	3 km	7.9 km
	5. Panjang jalan yang ditingkatkan	15 km	32.8 km
	6. Panjang jembatan yang dibangun	5 Bh	6 Bh
	7. Panjang jalan yang dipelihara	500 m	625.8 m
	8. Jumlah perbaikan simpang	1 titik	1 titik
	9. Panjang trotoar yang ditingkatkan	350 m	350 m
	10. Jumlah halte angkutan umum	4	0

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target RPJMD Tahun Ke-2	2013
1	2	3	4
	11. Jumlah area parkir	25	21
	12. Jumlah fasilitas pelabuhan/ ruang tunggu	1	1

Dibandingkan dengan RPJMD Kota Balikpapan pada target tahun 2013, pencapaian ke-26 yaitu meningkatnya manajemen dan fasilitas perlengkapan jalan, 1 indikator belum mencapai target sedangkan 13 indikator telah mencapai target yang ditetapkan sehingga diyakini pada akhir tahun capaian perencanaan strategis dapat dipenuhi.

SASARAN 27 : TERWUJUDNYA SARANA ANGKUTAN UMUM MASSAL

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
27	Jumlah Angkutan Umum	1922	1922	100

Dari data dan informasi pada tabel di atas, bahwa pencapaian sasaran ke-27 yaitu terwujudnya sarana angkutan umum massal rata-rata mencapai **100 %**.

Kebijakan mengenai jumlah angkutan umum adalah *zero grown*, dimana tidak ada lagi pengadaan armada baru, yang ada hanya peremajaan armada angkutan umum.

Pencapaian sasaran strategis ke-27 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2012 adalah sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2012	2013
1	2	3	4
27	Jumlah Angkutan Umum	1922	1922

Pencapaian sasaran strategis ke-27 jika dibandingkan dengan target RPJMD Tahun ke - 2 adalah sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target RPJMD Tahun Ke-2	2013
1	2	3	4
27	Terwujudnya sarana angkutan umum massal	1920	1922

Dibandingkan dengan RPJMD Kota Balikpapan pada target tahun 2013, pencapaian ke-27 yaitu terwujudnya sarana angkutan umum massal telah mencapai target yang ditetapkan sehingga diyakini pada akhir tahun capaian perencanaan strategis dapat dipenuhi.

SASARAN 28 : MENINGKATNYA CAKUPAN PELAYANAN AIR BERSIH/ AIR MINUM

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
28	1. Jumlah Produksi IPA	1157	1157	100%
	2. Jumlah ketersediaan air baku	1.105	1.105	100%
	3. Persentase rumah tangga pengguna air bersih	73%	73%	100%

Dari data dan informasi pada tabel di atas, bahwa pencapaian sasaran ke-28 yaitu meningkatnya cakupan pelayanan air bersih/ air minum rata-rata mencapai **100 %**.

Pencapaian sasaran strategis ke-28 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2012 adalah sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2012	2013
1	2	3	4
28	1. Jumlah Produksi IPA	1157	1157
	2. Jumlah ketersediaan air baku	1.105	1.105
	3. Persentase rumah tangga pengguna air bersih	73%	73%

Pencapaian sasaran strategis ke-28 jika dibandingkan dengan target RPJMD Tahun ke - 2 adalah sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target RPJMD Tahun Ke-2	2013
1	2	3	4
28	1. Jumlah Produksi IPA	1.157	1157
	2. Jumlah ketersediaan air baku	1.106	1.105
	3. Persentase rumah tangga pengguna air bersih	73%	73%

Dibandingkan dengan RPJMD Kota Balikpapan pada target tahun 2013, pencapaian ke-28 yaitu meningkatnya cakupan pelayanan air bersih/air minum telah mencapai target yang ditetapkan sehingga diyakini pada akhir tahun capaian perencanaan strategis dapat dipenuhi.

SASARAN 29 : TERSEDIANYA SISTEM JARINGAN DAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH (IPAL) TERPADU

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
29	1. Cakupan pelayanan air limbah	100%	100%	100%
	2. Jumlah instalansi pengolahan Air Limbah (IPAL) terpusat	1	1	100%

Dari data dan informasi pada tabel di atas, bahwa pencapaian sasaran ke-29 yaitu tersedianya sistem jaringan dan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) terpadu rata-rata mencapai **100 %**.

Pencapaian sasaran strategis ke-29 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2012 adalah sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2012	2013
1	2	3	4
29	1. Cakupan pelayanan air limbah 2. Jumlah instalansi pengolahan Air Limbah (IPAL) terpusat	100% 1	100% 1

Pencapaian sasaran strategis ke-29 jika dibandingkan dengan target RPJMD Tahun ke - 2 adalah sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target RPJMD Tahun Ke-2	2013
1	2	3	4
29	1. Cakupan pelayanan air limbah 2. Jumlah instalansi pengolahan Air Limbah (IPAL) terpusat	100% 1	100% 1

Dibandingkan dengan RPJMD Kota Balikpapan pada target tahun 2013, pencapaian ke-29 yaitu Tersedianya sistem jaringan dan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) terpadu telah mencapai target yang ditetapkan sehingga diyakini pada akhir tahun capaian perencanaan strategis dapat dipenuhi.

**SASARAN 30 : BERKURANGNYA TITIK/ LOKASI BANJIR DAN
LUAS WILAYAH BANJIR**

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
30	1. Jumlah titik lokasi banjir	55	9	210%
	2. Jumlah bendali/ bozem	2	7	350%
	3. Panjang normalisasi sungai	1.000m	400m	40%
	4. Panjang saluran drainase permanen (primer, sekunder dan tersier)	1.000m	3.136,25m	313.63%
	5. Panjang saluran drainase pemukiman permanen	5.000m	3.093,67m	61.87%
	6. Panjang saluran drainase (primer, sekunder dan tersier) yang ditingkatkan	2.500m	5.276m	211,04%
	7. Jalan inspeksi sungai	1.000m	0	-

Dari data dan informasi pada tabel di atas, bahwa pencapaian sasaran ke-30 yaitu berkurangnya titik/ lokasi banjir dan luas wilayah banjir rata-rata mencapai **169 %**.

Hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam pencapaian sasaran ke-30 antara lain normalisasi sungai dan pembangunan jalan inspeksi sungai yang mana pada tahun 2013 tidak mencapai target yang ditetapkan. Namun jika dihitung dari awal tahun pencapaian RPJMD khususnya pada indikator normalisasi sungai telah mencapai target RPJMD dimana capaian tahun 2012 telah mencapai 8.088,95 m.

Berkurangnya titik banjir pada tahun 2013 ini merupakan hasil dari tercapainya program kegiatan normalisasi sungai, pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan.

Pencapaian sasaran strategis ke-30 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2012 adalah sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2012	2013
1	2	3	4
30	1. Jumlah titik lokasi banjir	55	9
	2. Jumlah bendali/ bozem	1	7
	3. Panjang normalisasi sungai	8.088,95	0
	4. Panjang saluran drainase permanen (primer, sekunder dan tersier)	2995,56m	3.136,25m
	5. Panjang saluran drainase pemukiman permanen	3.093,67m	3.093,67m
	6. Panjang saluran drainase (primer, sekunder dan tersier) ditingkatkan	3.280,56m	5.276m
	7. Jalan inspeksi sungai	0	0

Pencapaian sasaran strategis ke-30 jika dibandingkan dengan target RPJMD Tahun ke - 2 adalah sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target RPJMD Tahun Ke-2	2013
1	2	3	4
30	1. Jumlah titik lokasi banjir	55	9
	2. Jumlah bendali/ bozem	1	7

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target RPJMD Tahun Ke-2	2013
1	2	3	4
	3. Panjang normalisasi sungai	1.000m	0
	4. Panjang saluran drainase permanen (primer, sekunder dan tersier)	1.000m	3.136,25m
	5. Panjang saluran drainase pemukiman permanen	5.000m	3.093,67m
	6. Panjang saluran drainase (primer, sekunder dan tersier) ditingkatkan	2.000m	5.276m
	7. Jalan inspeksi sungai	1.000m	0

Dibandingkan dengan RPJMD Kota Balikpapan pada target tahun 2013, pencapaian ke-30 yaitu 1 indikator kinerja tidak tercapai pada tahun 2013 namun jika diakumulasi dengan pencapaian tahun 2012 maka telah mencapai target RPJMD. Sedangkan untuk indikator jalan inspeksi harus mendapat perhatian.

Untuk indikator lainnya telah mencapai target yang ditetapkan sehingga diyakini pada akhir tahun capaian perencanaan strategis dapat dipenuhi.

SASARAN 31 : MENINGKATNYA KUALITAS PERUMAHAN DI KAWASAN PEMUKIMAN KUMUH

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
31	1. Jumlah rumah tidak layak huni	6.747	6.782	99.48%
	2. Persentase kawasan pemukiman kumuh	0.01%	0.01%	100%

Dari data dan informasi pada tabel di atas, bahwa pencapaian sasaran ke-31 yaitu meningkatnya kualitas perumahan dikawasan pemukiman kumuh rata-rata mencapai **99.74 %**.

Pencapaian sasaran strategis ke-31 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2012 adalah sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2012	2013
1	2	3	4
31	1. Jumlah rumah tidak layak huni	6.799	6.782
	2. Persentase kawasan pemukiman kumuh	0.04%	0.01%

Pencapaian sasaran strategis ke-31 jika dibandingkan dengan target RPJMD Tahun ke - 2 adalah sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target RPJMD Tahun Ke-2	2013
1	2	3	4
31	1. Jumlah rumah tidak layak huni	6.747	6.782
	2. Persentase kawasan pemukiman kumuh	1.47%	0.01%

Dibandingkan dengan RPJMD Kota Balikpapan pada target tahun 2013 pencapaian ke-31 yaitu meningkatnya kualitas perumahan dikawasan pemukiman kumuh pada indikator 1 belum mencapai target yang ditetapkan namun diyakini pada akhir tahun capaian perencanaan strategis dapat dipenuhi.

Sedangkan untuk indikator 2, telah mencapai bahkan telah melampaui target RPJMD Tahun ke-31 Kota Balikpapan.

SASARAN 32 : TERWUJUDNYA PENYEDIAAN HUNIAN VERTIKAL (RUSUNAWA DAN RUSUNAMI)

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
32	1. Jumlah rusunami	1	1	100%
	2. Jumlah rusunawa	1	1	100%

Dari data dan informasi pada tabel di atas, bahwa pencapaian sasaran ke-32 yaitu terwujudnya penyediaan hunian vertikal (rusunawa dan rusunami) rata-rata mencapai **100 %**.

Pembangunan rusunawa sampai dengan tahun 2013 ini masih menggunakan sumber dana dari APBN (Kementerian PU dan Perumahan Rakyat) sedangkan APBD Kota Balikpapan dipergunakan untuk pengembangan rumah susun untuk membangun sarana, prasarana dan utilitas pendukungnya.

Pencapaian sasaran strategis ke-32 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2012 adalah sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2012	2013
1	2	3	4
32	1. Jumlah rusunami	0	1
	2. Jumlah rusunawa	2	1

Pencapaian sasaran strategis ke-32 jika dibandingkan dengan target RPJMD Tahun ke - 2 adalah sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target RPJMD Tahun Ke-2	2013
1	2	3	4
32	1. Jumlah rusunami 2. Jumlah rusunawa	1 1	1 1

Dibandingkan dengan RPJMD Kota Balikpapan pada target tahun 2013, pencapaian ke-32 yaitu terwujudnya penyediaan hunian vertikal (rusunawa dan rusunami) telah mencapai target yang telah ditetapkan dan diyakini pada akhir tahun capaian perencanaan strategis dapat dipenuhi.

SASARAN 33 : TERWUJUDNYA SANITASI SEHAT YANG DAPAT DIAKSES SELURUH LAPISAN MASYARAKAT

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
33	Persentase Rumah tinggal bersanitasi	97.15%	97.15%	100%

Dari data dan informasi pada tabel di atas, bahwa pencapaian sasaran ke-33 yaitu terwujudnya sanitasi sehat yang dapat diakses seluruh lapisan masyarakat rata-rata mencapai **100 %**.

Pencapaian sasaran strategis ke-33 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2012 adalah sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2012	2013
1	2	3	4
33	Persentase Rumah tinggal bersanitasi	97.15%	97.15%

Pencapaian sasaran strategis ke-33 jika dibandingkan dengan target RPJMD Tahun ke - 2 adalah sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target RPJMD Tahun Ke-2	2013
1	2	3	4
33	Persentase Rumah tinggal bersanitasi	97.15%	97.15%

Dibandingkan dengan RPJMD Kota Balikpapan pada target tahun 2013, pencapaian ke-33 yaitu terwujudnya sanitasi sehat yang dapat diakses seluruh lapisan masyarakat telah mencapai target yang ditetapkan sehingga diyakini pada akhir tahun capaian perencanaan strategis dapat dipenuhi.

**SASARAN 34 : TERSEDIANYA STRUKTUR DAN POLA RUANG
YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN DAN
BERKELANJUTAN**

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
34	1. Produk hukum tentang rencana tata ruang Kota Balikpapan	0	0	0
	2. Jumlah kegiatan sosialisasi Rencana Tata Ruang Kota Balikpapan	34	34	100%
	3. Tersedianya dokumen-dokumen perencanaan tata ruang	3	4	133%

Dari data dan informasi pada tabel di atas, bahwa pencapaian sasaran ke-34 yaitu Tersedianya Struktur dan pola ruang yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan rata-rata mencapai **77.66 %**.

Pencapaian sasaran strategis ke-34 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2012 adalah sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2012	2013
1	2	3	4
34	1. Produk hukum tentang rencana tata ruang Kota Balikpapan	1	0
	2. Jumlah kegiatan sosialisasi Rencana Tata Ruang Kota Balikpapan	1	34
	3. Tersedianya dokumen-dokumen perencanaan tata ruang	1	4

Pencapaian sasaran strategis ke-34 jika dibandingkan dengan target RPJMD Tahun ke - 2 adalah sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target RPJMD Tahun Ke-2	2013
1	2	3	4
34	1. Produk hukum tentang rencana tata ruang Kota Balikpapan	1	0
	2. Jumlah kegiatan sosialisasi Rencana Tata Ruang Kota Balikpapan	27	34
	3. Tersedianya dokumen-dokumen perencanaan tata ruang	4	4

Dibandingkan dengan RPJMD Kota Balikpapan pada target tahun 2013, pencapaian ke-34 yaitu Tersedianya Struktur dan pola ruang yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan telah mencapai target yang ditetapkan sehingga diyakini pada akhir tahun capaian perencanaan strategis dapat dipenuhi.

SASARAN 35 : TERSEDIANYA TATA RUANG PESISIR, DAN PULAU-PULAU KECIL

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
35	Luas wilayah budaya pesisir	10.16	10.33	101%

Dari data dan informasi pada tabel di atas, bahwa pencapaian sasaran ke-35 yaitu tersedianya Tata ruang pesisir, dan pulau-pulau kecil rata-rata mencapai **101 %**.

Pencapaian sasaran strategis ke-36 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2012 adalah sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2012	2013
1	2	3	4
35	Luas wilayah budaya pesisir	749.2	10.33

Pencapaian sasaran strategis ke-35 jika dibandingkan dengan target RPJMD Tahun ke - 2 adalah sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target RPJMD Tahun Ke-2	2013
1	2	3	4
35	Luas wilayah budaya pesisir	749.2	10.33

Dibandingkan dengan RPJMD Kota Balikpapan pada target tahun 2013, pencapaian ke-35 yaitu tersedianya Tata ruang pesisir, dan pulau-pulau kecil telah mencapai target yang ditetapkan sehingga diyakini pada akhir tahun capaian perencanaan strategis dapat dipenuhi.

SASARAN 36 : TERKENDALINYA PEMANFAATAN RUANG

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
36	1. Persentase bangunan ber IMB dengan satuan bangunan	2%	2,9%	145%
	2. Persentase kesesuaian pemanfaatan Ruang dengan rencana Tata Ruang	2%	2%	100%
	3. Jumlah fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial	300	472	157%
	4. Jumlah bangunan perumahan	654	154	23.5%
	5. Luas hutan lindung	14.781	14.781	100%
	6. Luas wilayah ruang terbuka hijau (RTH)	3	3	100%

Dari data dan informasi pada tabel di atas, bahwa pencapaian sasaran ke-36 terkendalinya Pemanfaatan ruang rata-rata mencapai **104.25 %**.

Pencapaian sasaran strategis ke-36 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2012 adalah sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2012	2013
1	2	3	4
36	1. Persentase bangunan ber IMB dengan satuan bangunan	2,7%	2,9%
	2. Persentase kesesuaian pemanfaatan Ruang dengan rencana Tata Ruang	82%	2%
	3. Jumlah fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial	300	472
	4. Jumlah bangunan perumahan	154	154

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2012	2013
1	2	3	4
	5. Luas hutan lindung	14.781	14.781
	6. Luas wilayah ruang terbuka hijau (RTH)	393ha	3ha

Pencapaian sasaran strategis ke-36 jika dibandingkan dengan target RPJMD Tahun ke - 2 adalah sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target RPJMD Tahun Ke-2	2013
1	2	3	4
36	1. Persentase bangunan ber IMB dengan satuan bangunan	2%	2,9%
	2. Persentase kesesuaian pemanfaatan Ruang dengan rencana Tata Ruang	84%	2%
	3. Jumlah fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial	300	472
	4. Jumlah bangunan perumahan	654	154
	5. Luas hutan lindung	13.000	14.781
	6. Luas wilayah ruang terbuka hijau (RTH)	3	3

Dibandingkan dengan RPJMD Kota Balikpapan pada target tahun 2013, pencapaian ke-36 yaitu terkendalinya Pemanfaatan ruang telah mencapai target yang ditetapkan sehingga diyakini pada akhir tahun capaian perencanaan strategis dapat dipenuhi.

**SASARAN 37 : MENINGKATNYA KESADARAN MASYARAKAT
DALAM PROGRAM KELUARGA BERENCANA**

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
37	1. Akseptor aktif	70.096	83.728	119%
	2. Prevalensi Rate	74,9	75,25	100.47%
	3. Persentase partisipasi Gakin untuk berKB	75,03	75,03	100%
	4. Tingkat kelestarian ber KB			
	a. 10 tahun	5,878	5.886	119%
	b. 15 tahun	2,803	2.845	101.5%
	c. 20 tahun	313	316	100.96%

Dari data dan informasi pada tabel di atas, bahwa pencapaian sasaran ke-37 meningkatnya kesadaran masyarakat dalam program Keluarga Berencana rata-rata mencapai **106 %**.

Pencapaian sasaran ke-37 ini didukung dengan semakin meningkatnya tingkat kesadaran masyarakat Kota Balikpapan ber-KB, dukungan APBD Kota Balikpapan dan APBN melalui asas dekonsentrasi maupun asas tugas perbantuan serta suksesnyanya pelaksanaan penyuluhan Program KB/KS dan pelayanan KB/KS.

Pencapaian sasaran strategis ke-37 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2012 adalah sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2012	2013
1	2	3	4
37	1. Akseptor aktif	70.096	83.728
	2. Prevalensi Rate	78	75,25
	3. Persentase partisipasi Gakin untuk berKB	78.14	75,03
	4. Tingkat kelestarian ber KB		
	a. 10 tahun	5.878	5.886
	b. 15 tahun	2.803	2.845
	c. 20 tahun	313	316

Pencapaian sasaran strategis ke-37 jika dibandingkan dengan target RPJMD Tahun ke - 2 adalah sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target RPJMD Tahun Ke-2	2013
1	2	3	4
37	1. Akseptor aktif	70.096	83.728
	2. Prevalensi Rate	74.9	75,25
	3. Persentase partisipasi Gakin untuk berKB	75.03	75,03
	4. Tingkat kelestarian ber KB		
	a. 10 tahun	5.878	5.886
	b. 15 tahun	2.803	2.845
	c. 20 tahun	313	316

Dibandingkan dengan RPJMD Kota Balikpapan pada target tahun 2013, pencapaian ke-37 yaitu meningkatnya kesadaran masyarakat dalam program Keluarga Berencana telah mencapai target yang ditetapkan sehingga diyakini pada akhir tahun capaian perencanaan strategis dapat dipenuhi.

**SASARAN 38 : MENINGKATNYA PEMANFAATAN TEKNOLOGI
TEPAT GUNA**

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
38	Jumlah inovasi Teknologi Tepat Guna	3	5	166.67%

Dari data dan informasi pada tabel di atas, bahwa pencapaian sasaran ke-38 meningkatnya pemanfaatan teknologi tepat guna rata-rata mencapai **166.67 %**.

Pemanfaatan teknologi tepat guna yang dikembangkan antara lain : alat sangria, alat penguat signal internet, alat penggorengan amplang, alat penggorengan hemat energi dan alat perajang umbi.

Pembinaan TTG dilaksanakan melalui Pos Pelayanan Tekhnologi di Kecamatan dan hasil pembinaan termaksud telah memperoleh hasil dimana alat penggorengan amplang telah berhasil meraih juara II Lomba TTG Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013.

Pencapaian sasaran strategis ke-38 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2012 adalah sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2012	2013
1	2	3	4
38	Jumlah inovasi Teknologi Tepat Guna	3	5

Pencapaian sasaran strategis ke-38 jika dibandingkan dengan target RPJMD Tahun ke - 2 adalah sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target RPJMD Tahun Ke-2	2013
1	2	3	4
39	Jumlah inovasi Teknologi Tepat Guna	3	5

Dibandingkan dengan RPJMD Kota Balikpapan pada target tahun 2013, pencapaian ke-38 yaitu meningkatnya pemanfaatan teknologi tepat guna telah mencapai target yang ditetapkan sehingga diyakini pada akhir tahun capaian perencanaan strategis dapat dipenuhi.

SASARAN 39 : MENINGKATNYA KEMAMPUAN PEREMPUAN DALAM KELUARGA DAN LINGKUNGAN KERJA

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
39	1. Partisipasi Perempuan di lembaga pemerintah	3.420	3.420	100%

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
	2. Rasio Pejabat PNS Perempuan dan laki-laki	10 : 13	10 : 13	100%
	3. Partisipasi angkatan kerja perempuan	46.07	46.07	100%
	4. Menurunnya kasus kasus kekerasan dalam rumah Tangga	30	38	73.33%

Dari data dan informasi pada tabel di atas, bahwa pencapaian sasaran ke-39 meningkatnya kemampuan perempuan dalam keluarga dan lingkungan kerja rata-rata mencapai **91.11 %**.

Pada tahun 2013, tercatat peningkatan kasus kekerasan dalam rumah tangga, hal ini sebenarnya dampak dari sistem pendataan yang berjalan dengan baik dan telah dibentuknya Lembaga P2TP2A Kota Balikpapan sehingga penanganan kasus-kasus kekerasan semakin terkontrol dan dapat dibantu penanganannya.

Pencapaian sasaran strategis ke-39 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2012 adalah sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2012	2013
1	2	3	4
39	1. Partisipasi Perempuan di lembaga pemerintah	3.509	3.420
	2. Rasio Pejabat PNS Perempuan dan laki-laki	10 : 14	10 : 13
	3. Partisipasi angkatan kerja perempuan	46.07	46.07
	4. Menurunnya kasus kasus kekerasan dalam rumah Tangga	36	38

Pencapaian sasaran strategis ke-39 jika dibandingkan dengan target RPJMD Tahun ke - 2 adalah sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target RPJMD Tahun Ke-2	2013
1	2	3	4
39	1. Partisipasi Perempuan di lembaga pemerintah	3.420	3.420
	2. Rasio Pejabat PNS Perempuan dan laki-laki	10 : 13	10 : 13
	3. Partisipasi angkatan kerja perempuan	46.07	46.07
	4. Menurunnya kasus kasus kekerasan dalam rumah Tangga	3	38

Dibandingkan dengan RPJMD Kota Balikpapan pada target tahun 2013, pencapaian ke-39 yaitu meningkatnya kemampuan perempuan dalam keluarga dan lingkungan kerja telah mencapai target yang ditetapkan sehingga diyakini pada akhir tahun capaian perencanaan strategis dapat dipenuhi.

SASARAN 40 : MENINGKATNYA KUALITAS ANAK

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
40	1. Jumlah prestasi anak:			
	a. tingkat propinsi	152	152	100%
	b. tingkat nasional	52	52	100%
	c. tingkat internasional	2	2	100%
	2. Jumlah PAUD	200	200	100%

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
	3. Jumlah TK			
	a. Negeri	1	1	100%
	b. Swasta	137	137	100%
	4. Jumlah anak terlantar	25	25	100%
	5. Angka kekerasan dan eksploitasi anak dibawah umur	10	22	0%
	6. Angka anak jalanan	20	20	100%
	7. Jumlah fasilitas bermain anak	72	72	100%

Dari data dan informasi pada tabel di atas, bahwa pencapaian sasaran ke-40 meningkatnya kualitas anak rata-rata mencapai **90 %**.

Angka kekerasan dan eksploitasi anak di bawah umur pada tahun 2013 ini, melebihi dari target yang ditetapkan bahkan kenaikannya mencapai 120%. Secara hitungan angka, hal ini menunjukkan penurunan kinerja namun kami menilai hal ini adalah positif mengingat telah aktifnya Lembaga P2TP2A Kota Balikpapan sehingga setiap kasus kekerasan sudah memiliki lembaga pelayanannya.

Pencapaian sasaran strategis ke-40 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2012 adalah sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2012	2013
1	2	3	4
40	1. Jumlah prestasi anak:		
	a. tingkat propinsi	152	152
	b. tingkat nasional	52	52
	c. tingkat internasional	1	2

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2012	2013
1	2	3	4
	2. Jumlah PAUD	200	200
	3. Jumlah TK		
	a. Negeri	1	1
	b. Swasta	137	137
	4. Jumlah anak terlantar	25	25
	5. Angka kekerasan dan eksploitasi anak dibawah umur	7	22
	6. Angka anak jalanan	20	20
	7. Jumlah fasilitas bermain anak	72	72

Pencapaian sasaran strategis ke-40 jika dibandingkan dengan target RPJMD Tahun ke - 2 adalah sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target RPJMD Tahun Ke-2	2013
1	2	3	4
40	1. Jumlah prestasi anak:		
	a. tingkat propinsi	152	152
	b. tingkat nasional	52	52
	c. tingkat internasional	2	2
	2. Jumlah PAUD	200	200
	3. Jumlah TK		
	a. Negeri	1	1
	b. Swasta	37	137
	4. Jumlah anak terlantar	20	25
	5. Angka kekerasan dan eksploitasi anak dibawah umur	10	22
	6. Angka anak jalanan	20	20
	7. Jumlah fasilitas bermain anak	72	72

Dibandingkan dengan RPJMD Kota Balikpapan pada target tahun 2013, pencapaian ke-40 yaitu meningkatnya kualitas anak telah mencapai target yang ditetapkan sehingga diyakini pada akhir tahun capaian perencanaan strategis dapat dipenuhi.

SASARAN 41 : TERWUJUDNYA PENINGKATAN PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN HUTAN, LAHAN DAN DAS

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
41	1. Luas kawasan hutan	16.809,49 Ha	16.809,49 Ha	100%
	2. Luas rehabilitasi kawasan hutan	50 Ha	50 Ha	100%
	3. Jumlah kegiatan Pengamanan kawasan hutan	2,35	2,35	100%
	4. Luas Konservasi kawasan mangrove	10 Ha	10 Ha	100%
	5. Luas Hutan kota yang terehabilitasi dan tidak bermasalah	5 Ha	5 Ha	100%
	6. Luas Hutan Kota yang sudah di pagar	5 Ha	5 Ha	100%
	7. Luas hutan kota	5 Ha	5 Ha	100%
	8. Persentase terbangunnya Kebun Raya	40%	40%	100%
	9. Persentase Ruang Terbuka hijau publik dan privat	37%	37%	100%
	10. Luas lahan Pemakaman	294.671 m2	278.844 m2	94.6%
	11. Jumlah DAS yang termonitoring	7	7	100%
	12. Jumlah rekomendasi untuk ijin pengguna air tanah	25	44	176%
	13. Luasan penanaman Pohon	50.000	40,460	80.92%
	14. Angka data keanekaragaman hayati	30%	30%	100%
	15. Luas lokasi percontohan KEHATI	1Ha	1Ha	100%

Dari data dan informasi pada tabel di atas, bahwa pencapaian sasaran ke-41 terwujudnya peningkatan pelestarian dan pengembangan kawasan hutan, lahan dan DAS rata-rata mencapai **96.53 %**.

Pada sasaran ke-41 ini, yang menonjol adalah jumlah pemberian rekomendasi untuk ijin penggunaan air tanah yang mengalami penambahan mencapai 176%, sehingga harus terus dilakukan pengawasan dan pemantauan setiap tahun untuk mengantisipasi terjadinya subsidence/penurunan tanah akibat pemakaian yang berlebihan.

Terkait dengan lahan pemakaman khususnya pada areal pemakaman terpadu Km.15 Kecamatan Balikpapan Utara, terdapat 15.827m2 yang masih belum dapat dibebaskan karena adanya permasalahan status kepemilikan tanah, diharapkan pada tahun 2014 dapat diselesaikan.

Pencapaian sasaran strategis ke-41 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2012 adalah sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2012	2013
1	2	3	4
41	1. Luas kawasan hutan	16.809,49 Ha	16.809,49 Ha
	2. Luas rehabilitasi kawasan hutan	50 Ha	50 Ha
	3. Jumlah kegiatan Pengamanan kawasan hutan	2,35	2,35
	4. Luas Konservasi kawasan mangrove	8.3 Ha	10 Ha
	5. Luas Hutan kota yang terehabilitasi dan tidak bermasalah	5 Ha	5 Ha
	6. Luas Hutan Kota yang sudah di pagar	5 Ha	5 Ha
	7. Luas hutan kota	5 Ha	5 Ha

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2012	2013
1	2	3	4
	8. Persentase terbangunnya Kebun Raya	20%	40%
	9. Persentase Ruang Terbuka hijau publik dan privat	37%	37%
	10. Luas lahan Pemakaman	24.180 m ²	278.844 m ²
	11. Jumlah DAS yang termonitoring	13	7
	12. Jumlah rekomendasi untuk ijin pengguna air tanah	50	44
	13. Luasan penanaman Pohon	31.551	40.460
	14. Angka data keanekaragaman hayati	100%	100%
	15. luas lokasi percontohan KEHATI	1ha	1ha

Pencapaian sasaran strategis ke-41 jika dibandingkan dengan target RPJMD Tahun ke - 2 adalah sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target RPJMD Tahun Ke-2	2013
1	2	3	4
41	1. Luas kawasan hutan	16.809,49 Ha	16.809,49 Ha
	2. Luas rehabilitasi kawasan hutan	50 Ha	50 Ha
	3. Jumlah kegiatan Pengamanan kawasan hutan	2,35	2,35
	4. Luas Konservasi kawasan mangrove	10 Ha	10 Ha
	5. Luas Hutan kota yang terehabilitasi dan tidak bermasalah	5 Ha	5 Ha
	6. Luas Hutan Kota yang sudah di pagar	5 Ha	5 Ha
	7. Luas hutan kota	5 Ha	5 Ha
	8. Persentase terbangunnya Kebun Raya	40%	40%
	9. Persentase Ruang Terbuka hijau publik dan privat	3%	37%

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target RPJMD Tahun Ke-2	2013
1	2	3	4
	10. Luas lahan Pemakaman	294.671 m2	278.844 m2
	11. Jumlah DAS yang termonitoring	7	7
	12. Jumlah rekomendasi untuk ijin pengguna air tanah	44	44
	13. Luasan penanaman Pohon	101 Ha	40,460 Ha
	14. Angka data keanekaragaman hayati	30%	30%
	15. Luas lokasi percontohan KEHATI	1Ha	1Ha

Dibandingkan dengan RPJMD Kota Balikpapan pada target tahun 2013, pencapaian ke-41 yaitu terwujudnya peningkatan pelestarian dan pengembangan kawasan hutan, lahan dan DAS terdapat 12 indikator yang telah mencapai target yang ditetapkan dan terdapat 2 indikator yang belum mencapai target RPJMD namun demikian diyakini pada akhir tahun capaian perencanaan strategis dapat dipenuhi.

SASARAN 42 : MENINGKATNYA KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN KOTA

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
42	1. Cakupan pelayanan persampahan	100%	98%	98%
	2. Volume pengelolaan sampah melalui pengangkutan ke TPA	195.548,02	123.664,87	136.76%
	3. Jumlah sarana dan prasarana TPA	4	5	125%
	4. Luas bangunan TPA	29.1ha	27.1ha	93%
	5. Jumlah kerja bakti masal	12 kali	10kali	83.33%

Dari data dan informasi pada tabel di atas, bahwa pencapaian sasaran ke-42 meningkatnya kebersihan dan keindahan kota rata-rata mencapai **107 %**.

Pengelolaan sampah melalui pengangkutan ke TPA Tahun 2013 mengalami penurunan dari target yang telah ditetapkan. Hal ini sangat positif mengingat kesadaran masyarakat sudah meningkat dengan berjalannya program 3R di masing-masing lingkungan dan hal berhubungan dengan pencapaian sasaran ke-43 khususnya indikator kinerja utama ke-11 yaitu telah berkembangnya rumah kompos dan bank sampah.

Pencapaian sasaran strategis ke-42 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2012 adalah sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2012	2013
1	2	3	4
42	1. Cakupan pelayanan persampahan	95%	98%
	2. Volume pengelolaan sampah melalui pengangkutan ke TPA	195.548,02	123.664,87
	3. Jumlah sarana dan prasarana TPA	4	5
	4. Jumlah bangunan TPA	29.1ha	27.1ha
	5. Jumlah kerja bakti masal	10 kali	10 kali

Pencapaian sasaran strategis ke-42 jika dibandingkan dengan target RPJMD Tahun ke - 2 adalah sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target RPJMD Tahun Ke-2	2013
1	2	3	4
42	1. Cakupan pelayanan persampahan	100%	98%
	2. Volume pengelolaan sampah melalui pengangkutan ke TPA	195.548,02	123.664,87
	3. Jumlah sarana dan prasarana TPA	4	5
	4. Jumlah bangunan TPA	29.1ha	27.1ha
	5. Jumlah kerja bakti masal	10 kali	10 kali

Dibandingkan dengan RPJMD Kota Balikpapan pada target tahun 2013, pencapaian ke-42 yaitu meningkatnya upaya pelestarian lingkungan hidup melalui pendidikan dan peran serta aktif masyarakat, telah mencapai target yang ditetapkan sehingga diyakini pada akhir tahun capaian perencanaan strategis dapat dipenuhi.

SASARAN 43 : MENINGKATNYA UPAYA PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP MELALUI PENDIDIKAN DAN PERAN SERTA AKTIF MASYARAKAT

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
43	1. Persentase pengelolaan Gas Buang industri	-	-	-
	2. Jumlah stasiun monitoring udara	3	2	66.66%

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
	beroperasi dan kondisi baik			
3.	Jumlah kendaraan yang telah mengikuti uji emisi	1500	2032	135%
4.	Jumlah sumber tidak bergerak (industri, dll) yang telah dipantau tentang emisi cerobong	5	5	100%
5.	Persentase Badan usaha yang telah memiliki dokumen lingkungan (UKL/UPL atau Amdal)	80	107	133.75%
6.	Persentase Usaha/industri yang menaati peraturan pembuangan air limbah	100%	100%	100%
7.	Persentase Usaha yang telah memiliki izin pengelolaan limbah B3	100%	100%	100%
8.	Persentase Pengendalian pada sumber pencemar memenuhi baku mutu	40%	40%	100%
9.	Persentase Badan usaha yang telah memiliki sertifikasi hijau (Proper)	14	10	71.43%
10.	Persentase Peran aktif masyarakat dan pendidikan dalam pengelolaan lingkungan hidup	100%	93%	93%
11.	Jumlah sarana dan prasarana 3R dan sarana persampahan RT yang terintegrasi mulai dari sumber sampah dengan TPA	65 Bank Sampah, 4 Rumah kompos	65 Bank Sampah, 4 Rumah kompos	100%
12.	Jumlah Penyuluhan LH kepada masyarakat	12 kegiatan	12 kegiatan	100%

Dari data dan informasi pada tabel di atas, bahwa pencapaian sasaran ke-43 meningkatnya upaya pelestarian lingkungan hidup melalui pendidikan dan peran serta aktif masyarakat rata-rata mencapai **91.65 %**.

Pencapaian sasaran strategis ke-43 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2012 adalah sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2012	2013
1	2	3	4
43	1. Persentase pengelolaan Gas Buang industri	-	-
	2. Jumlah stasiun monitoring udara beroperasi dan kondisi baik	2	2
	3. Jumlah kendaraan yang telah mengikuti uji emisi	2177	2032
	4. Jumlah sumber tidak bergerak (industri, dll) yang telah dipantau tentang emisi cerobong	-	5
	5. Persentase Badan usaha yang telah memiliki dokumen lingkungan (UKL/UPL atau Amdal)	97	107
	6. Persentase Usaha/industri yang menaati peraturan pembuangan air limbah	100%	100%
	7. Persentase Usaha yang telah memiliki izin pengelolaan limbah B3	100%	100%
	8. Persentase Pengendalian pada sumber pencemar memenuhi baku mutu	46%	40%
	9. Persentase Badan usaha yang telah memiliki sertifikasi hijau (Proper)	10	10

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2012	2013
1	2	3	4
	10. Persentase Peran aktif masyarakat dan pendidikan dalam pengelolaan lingkungan hidup	100%	93%
	11. Jumlah sarana dan prasarana 3R dan sarana persampahan RT yang terintegrasi mulai dari sumber sampah dengan TPA	65 Bank Sampah, 4 Rumah kompos	65 Bank Sampah, 4 Rumah kompos
	12. Jumlah Penyuluhan LH kepada masyarakat	12 kegiatan	12 kegiatan

Pencapaian sasaran strategis ke-43 jika dibandingkan dengan target RPJMD Tahun ke - 2 adalah sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target RPJMD Tahun Ke-2	2013
1	2	3	4
43	1. Persentase pengelolaan Gas Buang industri	-	-
	2. Jumlah stasiun monitoring udara beroperasi dan kondisi baik	3	2
	3. Jumlah kendaraan yang telah mengikuti uji emisi	1500	2032
	4. Jumlah sumber tidak bergerak (industri, dll) yang telah dipantau tentang emisi cerobong	2	5
	5. Persentase Badan usaha yang telah memiliki dokumen lingkungan (UKL/UPL atau Amdal)	80	107

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target RPJMD Tahun Ke-2	2013
1	2	3	4
	6. Persentase Usaha/industri yang menaati peraturan pembuangan air limbah	100%	100%
	7. Persentase Usaha yang telah memiliki izin pengelolaan limbah B3	100%	100%
	8. Persentase Pengendalian pada sumber pencemar memenuhi baku mutu	40%	40%
	9. Persentase Badan usaha yang telah memiliki sertifikasi hijau (Proper)	10	10
	10. Persentase Peran aktif masyarakat dan pendidikan dalam pengelolaan lingkungan hidup	93%	93%
	11. Jumlah sarana dan prasarana 3R dan sarana persampahan RT yang terintegrasi mulai dari sumber sampai dengan TPA	65 Bank Sampah, 4 Rumah kompos	65 Bank Sampah, 4 Rumah kompos
	12. Jumlah Penyuluhan LH kepada masyarakat	12	12 kegiatan

Dibandingkan dengan RPJMD Kota Balikpapan pada target tahun 2013, pencapaian ke-43 yaitu meningkatnya upaya pelestarian lingkungan hidup melalui pendidikan dan peran serta aktif masyarakat, telah mencapai target yang ditetapkan sehingga diyakini pada akhir tahun capaian perencanaan strategis dapat dipenuhi.

SASARAN 44 : MENINGKATNYA UPAYA PELESTARIAN SENI DAN BUDAYA YANG ADA DI KOTA BALIKPAPAN

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
44	1. Jumlah grup seni dan budaya	76	80	105%
	2. Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	3	4	133.33%
	3. Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	5	8	160%
	4. Jumlah sarana gedung seni dan budaya	2	-	0%
	5. Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	15	25	166.67%

Dari data dan informasi pada tabel di atas, bahwa pencapaian sasaran ke-44 meningkatnya upaya pelestarian seni dan budaya yang ada di Kota Balikpapan rata-rata mencapai **126.26%**.

Pembangunan sarana gedung seni dan budaya Kota Balikpapan berada pada tahapan pembangunan sehingga diharapkan tahun 2014 telah dapat digunakan.

Pencapaian sasaran strategis ke-44 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2012 adalah sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2012	2013
1	2	3	4
44	1. Jumlah grup seni dan budaya	63	80
	2. Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	1	4
	3. Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	7	8
	4. Jumlah sarana gedung seni dan budaya	-	-
	5. Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	12	12

Pencapaian sasaran strategis ke-44 jika dibandingkan dengan target RPJMD Tahun ke - 2 adalah sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target RPJMD Tahun Ke-2	2013
1	2	3	4
44	1. Jumlah grup seni dan budaya	76	80
	2. Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	28	4
	3. Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	5	8
	4. Jumlah sarana gedung seni dan budaya	5	-
	5. Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	98	12

Dibandingkan dengan RPJMD Kota Balikpapan pada target tahun 2013, pencapaian ke-44 yaitu meningkatnya upaya pelestarian seni dan budaya yang ada di Kota Balikpapan telah mencapai target yang ditetapkan sehingga diyakini pada akhir tahun capaian perencanaan strategis dapat dipenuhi.

SASARAN 45 : MENINGKATNYA KUALITAS DAN KUANTITAS DESTINASI PARIWISATA

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
45	1. Jumlah wisata nusantara	599.968	616.252	103%
	2. Jumlah wisata mancanegara	64.848	27.423	42.29%
	3. Jumlah destinasi/obyek wisata	13	14	108%

Dari data dan informasi pada tabel di atas, bahwa pencapaian sasaran ke-45 meningkatnya kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata rata-rata mencapai **84.43 %**.

Pencapaian sasaran strategis ke-45 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2012 adalah sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2012	2013
1	2	3	4
46	1. Jumlah wisata nusantara	599.968	616.252
	2. Jumlah wisata mancanegara	64.848	27.423
	3. Jumlah destinasi/obyek wisata	13	14

Pencapaian sasaran strategis ke-45 jika dibandingkan dengan target RPJMD Tahun ke - 2 adalah sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target RPJMD Tahun Ke-2	2013
1	2	3	4
45	1. Jumlah wisata nusantara	21.938	616.252
	2. Jumlah wisata mancanegara	398.702	27.423
	3. Jumlah destinasi/obyek wisata	4	14

Dibandingkan dengan RPJMD Kota Balikpapan pada target tahun 2013, pencapaian ke-45 yaitu meningkatnya kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata 2 indikator telah mencapai target yang ditetapkan sedangkan 1 indikator masih perlu mendapatkan perhatian sehingga pada akhir tahun capaian perencanaan strategis dapat dipenuhi.

SASARAN 46 : BERKEMBANGNYA USAHA-USAHA PENDUKUNG KEPARIWISATAAN

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
46	Jumlah usaha pendukung kepariwisataan	734	734	100%

Dari data dan informasi pada tabel di atas, bahwa pencapaian sasaran ke-46 berkembangnya usaha-usaha pendukung kepariwisataan rata-rata mencapai **100 %**.

Pencapaian sasaran strategis ke-46 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2012 adalah sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2012	2013
1	2	3	4
46	Jumlah usaha pendukung kepariwisataan	655	734

Pencapaian sasaran strategis ke-47 jika dibandingkan dengan target RPJMD Tahun ke - 2 adalah sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target RPJMD Tahun Ke-2	2013
1	2	3	4
46	Jumlah usaha pendukung kepariwisataan	640	734

Dibandingkan dengan RPJMD Kota Balikpapan pada target tahun 2013, pencapaian ke-46 yaitu berkembangnya usaha-usaha pendukung kepariwisataan telah mencapai target yang ditetapkan sehingga diyakini pada akhir tahun capaian perencanaan strategis dapat dipenuhi.

B. PENGUNGKAPAN AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pada tahun 2013 serapan APBD Kota Balikpapan mencapai angka **76,42%** dan lebih baik dari pada tahun 2012 yang hanya mencapai angka **69,7%**.

Ikhtisar laporan realisasi anggaran APBD Kota Balikpapan pada tahun 2013 (setelah perubahan) yang merupakan akuntabilitas keuangan dapat digambarkan sebagai berikut:

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4
Pendapatan Daerah	2.214.991.437.841,00	2.421.958.180.024,97	109.3
Belanja	3.167.626.103.188,43	2.420.847.444.080,94	76.4
Pembiayaan Penerimaan	984.224.665.347,43	982.603.712.550,43	99.8
Pembiayaan Pengeluaran	31.590.000.000	21.000.000.000	66.5
Silpa		962.714.448.494,46	

1. Pendapatan Daerah

a. Pendapatan Asli Daerah

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4
Hasil Pajak Daerah	262.423.628.135,00	340.998.751.947,69	129.9

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4
Hasil Retribusi Daerah	51.248.954.189,00	57.378.640.539,94	112
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	17.190.000.000,00	17.191.752.156,00	100
Lain-lain Pendapatan Yang Salah	23.977.690.368,00	54.896.805.288,54	228.9

Realisasi perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Balikpapan selama periode tahun 2011-2013 dapat dilihat pada tabel berikut :

TAHUN	TARGET PAD	REALISASI PAD	PENDAPATAN	PROPORSI TERHADAP PENDAPATAN
2011	200.000.000.000,00	237.029.073.666,77	1.804.343.010.488,77	13.1%
2012	290.007.283.203,00	352.034.256.557,17	1.647.132.469.666,19	134.0%
2013	354.840.272.692,00	470.465.949.932,97	2.214.991.437.841,00	109.3%

b. Dana Perimbangan

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	723.561.592.321,00	831.216.372.792,00	114.9
Dana Alokasi Umum	427.133.126.000,00	427.133.126.000,00	100
Dana Alokasi Kkusus	23.186.930.000,00	23.186.930.000,00	100

Realisasi perkembangan dana perimbangan Kota Balikpapan selama periode tahun 2011-2013 dapat dilihat pada tabel berikut :

TAHUN	PERIMBANGAN	R(%)	PENDAPATAN	PROPORSI TERHADAP PENDAPATAN
2011	1.151.703.793.532,-	112.81%	1.804.343.010.488,77	63.8%
2012	1.074.521.018.050,00	124.6%	1.647.132.469.666,19	134.0%
2013	1.173.881.648.321,00	109.2%	2.214.991.437.841,00	109.3%

c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	346.488.590.800,00	336.773.634.300,00	97.2
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	95.822.126.028,00	93.623.367.000,00	97.7
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	239.558.800.000,00	239.558.800.000,00	100

Realisasi perkembangan lain-lain pendapatan yang sah Kota Balikpapan selama periode tahun 2011-2013 dapat dilihat pada tabel berikut :

TAHUN	DANA LAIN-LAIN	R(%)	PENDAPATAN	PROPORSI TERHADAP PENDAPATAN
2011	415.610.143.290,-	104.01%	1.804.343.010.488,77	23.24
2012	282.604.168.413,19	182.4%	1.647.132.469.666,19	134.0
2013	686.269.516.828,00	97.6%	2.214.991.437.841,00	109.3

2. Belanja

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4
Belanja Tidak Langsung	831.041.322.064,62	734.517.519.834,65	88.4
Belanja Langsung	2.336.584.781.123,81	1.686.329.924.246,29	72.2

Realisasi perkembangan Belanja Kota Balikpapan selama periode tahun 2011-2013 dapat dilihat pada tabel berikut :

TAHUN	BELANJA TIDAK LANGSUNG	(%)	BELANJA LANGSUNG	(%)
2011	665.975.045.902,92	90.7	861.457.202.954,85	80
2012	636.400.738.757,38	95.4	1.035.447.137.559,59	89.5
2013	734.517.519.834,65	88.4	1.686.329.924.246,29	72.2

3. Capaian Akuntabilitas Keuangan

Capaian akuntabilitas keuangan per sasaran strategis pada tahun 2013 digambarkan pada tabel berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas/ mutu pendidikan	387,190,000.00	223,443,416.00	57.71
2	Meningkatnya aksesibilitas memperoleh pendidikan dan meningkatnya pelayanan pendidikan Bagi masyarakat miskin	4,827,000,000.00	3,951,858,515.00	81.87
3	Meningkatnya kualitas tenaga kerja	5.928.879.795	3.281.359.515	55.35
4	Meningkatnya status kesehatan masyarakat	642,784,100.00	580,035,503.00	90.24
5	Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan kesehatan	50,675,633,487.00	32,506,159,004.25	64.15
6.	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan	46.751.500	25.394.500	54.32

7.	Meningkatnya kualitas dan prestasi olahraga dan Olahraga Tradisional.	5,091,148,500.00	4,454,686,549.00	87.50
8.	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan agama	1.154.265.000,00	578.969.060,00	50.16
9.	Meningkatnya kerukunan intra dan antar umat beragama			
10.	Meningkatnya kualitas pengelolaan UMKM dan Koperasi	2,237,691,500.00	1,802,287,051.00	80.54
11	Meningkatnya kualitas produk UMKM dan Koperasi	1.233.466.119,00	1.110.119.507	90,74
12.	Meningkatnya produktivitas Pertanian, Kelautan dan Perikanan	15,574,720,350.00	13,484,317,012.00	86.58
13.	Meningkatnya pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin			
14	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum	107,150,000.00	82,128,400.00	76.65
15.	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat	1.104.265.000,00	538.274.000,00	49
16.	Meningkatnya pelayanan dan perlindungan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	2.634.916.415,00	1.279.345.815,00	48.55

17.	Meningkatnya kemandirian masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial			
18.	Meningkatnya sistem kewaspadaan dini dan penanggulangan bencana			
19	Meningkatnya partisipasi pilar masyarakat/relawan dalam penanggulangan bencana	16.795.230.300,00	12.835.521.222,00	76
20.	Meningkatnya pelayanan administrasi dan perizinan investasi	240,300,000.00	172,894,950.00	71.95
21.	Meningkatnya cakupan layanan persediaan daya listrik kepada masyarakat	-	-	-
22.	Berkembangnya kawasan industri dan perdagangan yang berwawasan lingkungan	-	-	-
23.	Meningkatnya lapangan usaha dan lapangan kerja	1,473,053,400.00	1,087,784,000.00	73.85
24.	Meningkatnya sumber-sumber pendapatan daerah	33,986,720,775.00	30,202,477,794.91	88.87
25.	Meningkatnya Kapasitas institusi penyelenggara pelayanan publik	-	-	-

26.	Terlaksananya Reformasi Birokrasi	8,218,504,862.00	6,761,447,563.00	82.27
27.	Meningkatnya manajemen dan fasilitas perlengkapan jalan	147,437,065,722.00	144,132,169,365.40	97.76
28.	Terwujudnya sarana angkutan umum massal	-	-	-
29.	Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih/ air minum	-	-	-
30.	Tersedianya sistem jaringan dan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) terpadu	-	-	-
31.	Berkurangnya titik/ lokasi banjir dan luas wilayah banjir	51,931,889,000.00	35,334,459,449.00	68.04
32.	Meningkatnya kualitas perumahan dikawasan pemukiman kumuh	1,842,937,600.00	1,783,574,100.00	96.78
33.	Terwujudnya penyedia hunian vertikal (rusunawa dan rusunami)	4.225.583.300,00	3.596.471.090,00	85.11
34.	Terwujudnya sanitasi sehat yang dapat diakses seluruh lapisan masyarakat	2.430.720.000,00	2.102.557.180,00	86.56
35.	Tersedianya Struktur dan pola ruang yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.	704,106,400.00	551,060,470.00	78.26

36.	Tersedianya Tata ruang pesisir, dan pulau-pulau kecil	-	-	-
37.	Terkendalinya Pemanfaatan ruang	1,802,880,000.00	1,073,825,502.00	59.56
38.	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam program Keluarga Berencana	1,058,043,000.00	932,676,125.00	88.15
39.	Meningkatnya pemanfaatan teknologi tepat guna	59,950,000.00	48,053,000.00	80.16
40.	Meningkatnya kemampuan perempuan dalam keluarga dan lingkungan kerja	228,576,000.00	57,987,700.00	25.37
41.	Meningkatnya kualitas anak	6,221,800,000.00	4,143,011,005.00	66.59
42.	Terwujudnya peningkatan pelestarian dan pengembangan kawasan hutan, lahan dan DAS	26,646,833,440.00	20,468,338,260.00	76.81
43.	Meningkatnya kebersihan dan keindahan kota	66,844,709,400.00	53,948,749,726.00	80.71
44.	Meningkatnya upaya pelestarian lingkungan hidup melalui pendidikan dan peran	1,173,316,000.00	906,128,800.00	77.23

	serta aktif masyarakat			
45.	Meningkatnya upaya pelestarian seni dan budaya yang ada di Kota Balikpapan	6,680,776,920.00	3,899,522,291.00	58.37
46.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata	1,367,000,000.00	1,267,563,032.00	92.73
47.	Berkembangnya usaha-usaha pendukung kepariwisataan	2,542,642,000.00	2,327,853,573.00	91.55

C. CAPAIAN PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Dalam kurun waktu tahun 2013 Pemerintah Kota Balikpapan telah mendapatkan beberapa penghargaan dan prestasi yang diraih yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Adapun penghargaan dan prestasi yang diraih adalah sebagai berikut:

JENIS PENGHARGAAN	TINGKAT	LEMBAGA YANG MEMBERIKAN
2	3	
1. Panji Bidang Pembangunan Hukum dan Hak Asasi Manusia	Provinsi	Gubernur Kalimantan Timur
2. Panji Bidang Penyelenggara Pemerintah Daerah Kategori Kota	Provinsi	Gubernur Kalimantan Timur
3. Panji Bidang Kebudayaan dan Kepariwisata	Provinsi	Gubernur Kalimantan Timur
4. Panji bidang Perekonomian	Provinsi	Gubernur Kalimantan Timur
5. Panji Bidang Perdagangan	Provinsi	Gubernur Kalimantan Timur
6. Panji Bidang Perhubungan dan Wahana Tata Nugraha	Provinsi	Gubernur Kalimantan Timur
7. Panji Bidang Ketenagakerjaan	Provinsi	Gubernur Kalimantan Timur
8. Panji Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Provinsi	Gubernur Kalimantan Timur
9. Panji Bidang Pelaksanaan Program Kependudukan dan	Provinsi	Gubernur Kalimantan Timur

LEMBAGA YANG MEMBERIKAN	TINGKAT	JENIS PENGHARGAAN
	3	2
Gubernur Kalimantan Timur	Provinsi	10. Panji Bidang Tim Penggerak PKK Keluarga Berencana
Gubernur Kalimantan Timur	Provinsi	11. Tropy Bidang Lingkungan hidup (Terbaik II)
Gubernur Kalimantan Timur	Provinsi	12. Tropy Bidang Pemerintahan E-Government (Terbaik III)
Gubernur Kalimantan Timur	Provinsi	13. Tropy Bidang Kelautan dan Perikanan (Terbaik III)
Gubernur Kalimantan Timur	Provinsi	14. Tropy Bidang Pendidikan (Terbaik II)
Gubernur Kalimantan Timur	Provinsi	15. Tropy Bidang Kesehatan (Terbaik II)
Gubernur Kalimantan Timur	Provinsi	16. Tropy Bidang Administrasi Kependudukan (Terbaik III)
Gubernur Kalimantan Timur	Provinsi	17. Tropy Bidang Kesejahteraan Sosial (Terbaik II)
Gubernur Kalimantan Timur	Provinsi	18. Tropy Bidang Gerakan Pramuka (Terbaik III)
Gubernur Kalimantan Timur	Provinsi	19. Tropy Bidang Keolahragaan (Terbaik II)
Gubernur Kalimantan Timur	Provinsi	20. Tropy Bidang Daya Saing Daerah (Terbaik III)
Gubernur Kalimantan Timur	Provinsi	21. Piagam Lurah Berprestasi
Gubernur Kalimantan Timur	Provinsi	22. Piagam Kelurahan Berprestasi
Gubernur Kalimantan Timur	Provinsi	23. Piagam Kelompok Tani (Terbaik I)
Gubernur Kalimantan Timur	Provinsi	24. Piagam Penghargaan Pelaksana Program

JENIS PENGHARGAAN	TINGKAT	LEMBAGA YANG MEMBERIKAN
2	3	
25. Piagam Penghargaan Pengelola Bina Keluarga Balita (BKB) (Terbaik I)	Provinsi	Gubernur Kalimantan Timur
26. Piagam Penghargaan Posyandu (Terbaik I)	Provinsi	Gubernur Kalimantan Timur
27. Piagam Penghargaan	Provinsi	Gubernur Kalimantan Timur
28. Pelaksanaan Pelayanan e – KTP terbaik I se-Indonesia Tengah	Nasional	Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil
29. IMP (Inovasi Manajemen Perkotaan) Award	Nasional	Kementerian Dalam Negeri
30. Pembina K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja)	Nasional	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
31. Wahana Tata Nugraha Kategori Lalu Lintas	Nasional	Kementerian Perhubungan
32. Tim Pengendali Inflasi Daerah Terbaik se - Indonesia Timur	Nasional	Kementerian Dalam Negeri
33. Adipura Kencana Kategori Kota Besar	Nasional	Kementerian LH
34. Juara II Nasional Hatinya PKK	Nasional	TP PKK Pusat
35. Adiwiyata Mandiri	Nasional	Kementerian LH
36. Kalpataru	Nasional	Kementerian LH
37. Penghargaan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)	Nasional	Kementerian LH
38. Grand Otonomi Award Bidang Pelayanan Publik	Provinsi	Jawa Post Institute Pro Otonomi
39. Penghargaan PPID Terbaik	Nasional	Kementerian Dalam Negeri
40. Ksatria Bhakti Husada	Nasional	Kementerian Kesehatan
41. Mitra Bhakti Husada	Nasional	Kementerian Kesehatan
42. Swasti Sabha Wiwerda	Nasional	Kementerian Kesehatan

JENIS PENGHARGAAN	TINGKAT	LEMBAGA YANG MEMBERIKAN
2	3	
43. Terbaik Ketiga Partisipasi Penanaman 1 Milyar Pohon, Kategori Kota	Nasional	Kemeterian Kehutanan
44. Penghargaan AMPL	Nasional	Bappenas
45. Penghargaan IRSA	Nasional	
46. Paramadana Madya Koperasi 2013	Nasional	Kementerian Koperasi dan UKM
47. Kota Peduli HAM	Nasional	Kementerian Hukum dan HAM
48. Peringkat III Lomba Tata Kelola Kearsipan teladan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota Se - Kalimantan Timur	Provinsi	Badan Arsip Daerah

BAB IV

PENUTUP

Sebagai bagian penutup dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2013, dapat disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kota Balikpapan telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Pada tahun 2013 terdapat 47 (empat puluh tujuh) sasaran strategis dan 182 (seratus delapan puluh dua) indikator kinerja yang terdiri dari 45 indikator untuk misi 1, 27 indikator untuk misi 2, 19 indikator untuk misi 3, 34 indikator untuk misi 4, 30 indikator untuk misi 5, 55 indikator untuk misi 6, 21 indikator untuk misi 7 dan 48 indikator untuk misi 8.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 182 indikator sasaran, disimpulkan bahwa :

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KEUANGAN
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas/ mutu pendidikan	93.64	57.71
2	Meningkatnya aksesibilitas memperoleh pendidikan dan meningkatnya pelayanan pendidikan Bagi masyarakat miskin	108	81.87
3	Meningkatnya kualitas tenaga kerja	97,66	55.35
4	Meningkatnya status kesehatan masyarakat	124,45	90.24
5	Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan kesehatan	113	64.15
6.	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan	100	54.32
7.	Meningkatnya kualitas dan prestasi olahraga dan Olahraga Tradisional.	100	87.50

8.	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan agama	81	50.16
9.	Meningkatnya kerukunan intradani antar umat beragama	100	
10.	Meningkatnya kualitas pengelolaan UMKM dan Koperasi	111.96	80.54
11	Meningkatnya kualitas produk UMKM dan Koperasi	75	90.74
12.	Meningkatnya produktivitas Pertanian, Kelautan dan Perikanan	107.1	86.58
13.	Meningkatnya pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin	100	-
14	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum	100	76.65
15.	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat	100.4	49%
16.	Meningkatnya pelayanan dan perlindungan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	55	48.55

17.	Meningkatnya sistem kewaspadaan dini dan penanggulangan bencana	0	76
18.	Meningkatnya partisipasi pilar masyarakat/relawan dalam penanggulangan bencana	96.8	
19	Meningkatnya pelayanan administrasi dan perizinan investasi	110.8	71.95
20.	Meningkatnya cakupan layanan persediaan daya listrik kepada masyarakat	100	-
21.	Berkembangnya kawasan industri dan perdagangan yang berwawasan lingkungan	103.7	-
22.	Meningkatnya lapangan usaha dan lapangan kerja	99	73.85
23.	Meningkatnya sumber-sumber pendapatan daerah	117.15	88.87
24.	Meningkatnya Kapasitas institusi penyelenggara pelayanan publik	100	-
25.	Terlaksananya Reformasi Birokrasi	79.81	82.27
26.	Meningkatnya manajemen dan fasilitas perlengkapan jalan	164.4	97.76

27.	Terwujudnya sarana angkutan umum massal	100	-
28.	Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih/ air minum	100	-
29.	Tersedianya sistem jaringan dan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) terpadu	100	-
30.	Berkurangnya titik/ lokasi banjir dan luas wilayah banjir	169	68.04
31.	Meningkatnya kualitas perumahan dikawasan pemukiman kumuh	99.74	96.78
32.	Terwujudnya penyedia hunian vertikal (rusunawa dan rusunami)	100	85.11
33.	Terwujudnya sanitasi sehat yang dapat diakses seluruh lapisan masyarakat	100	86.56
34.	Tersedianya Struktur dan pola ruang yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.	77.66	78.26
35.	Tersedianya Tata ruang pesisir, dan pulau-pulau kecil	101	-
36.	Terkendalinya Pemanfaatan ruang	104.25	59.56

37.	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam program Keluarga Berencana	106	88.15
38.	Meningkatnya pemanfaatan teknologi tepat guna	166.67	80.16
39.	Meningkatnya kemampuan perempuan dalam keluarga dan lingkungan kerja	91.11	25.37
40.	Meningkatnya kualitas anak	90	66.59
41.	Terwujudnya peningkatan pelestarian dan pengembangan kawasan hutan, lahan dan DAS	96.53	76.81
42.	Meningkatnya kebersihan dan keindahan kota	107	80.71
43.	Meningkatnya upaya pelestarian lingkungan hidup melalui pendidikan dan peran serta aktif masyarakat	91.65	77.23
44.	Meningkatnya upaya pelestarian seni dan budaya yang ada di Kota Balikpapan	126.26	58.37
45.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata	84.43	92.73
46.	Berkembangnya usaha-usaha pendukung kepariwisataan	100	91.55

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis terhadap 47 sasaran beserta indikatornya, pencapaian sasaran kinerja Pemerintah Kota Balikpapan menunjukkan trend naik dibandingkan pada tahun 2012 yang merupakan tahun kedua RPJMD. Walau demikian masih terdapat beberapa indikator sasaran yang capaiannya belum seperti diharapkan sehingga harus mendapat perhatian dan peningkatan pada tahun-tahun berikutnya.

Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 khususnya untuk Tahun Anggaran 2013 sebagaimana Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2011-2016, dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran maupun pencapaian SPM yang belum memenuhi target yang ditetapkan, Kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di waktu yang akan datang.

WALIKOTA BALIKPAPAN



H.M. RIZAL EFFENDI

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013

(Berdasarkan APBDP Kota Balikpapan)

KOTA

: BALIKPAPAN

TAHUN ANGGARAN

: 2013

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas/mutu pendidikan	1 Jumlah Tenaga Pendidik yang bersertifikat profesi	750
		2 Persentase capaian SPM pendidikan tingkat dasar	100%
		3 Persentase capaian SPM pendidikan tingkat menengah	100%
		4 Angka putus sekolah a. SD b. SMP Sederajat c. SLTA Sederajat	0,80% 5,79% 27,21%
		5 Jumlah sekolah standar nasional a. SD b. SMP Sederajat	9 10
2	Meningkatnya aksesibilitas memperoleh pendidikan dan meningkatnya pelayanan pendidikan	1 Persentase Angka Partisipasi Kasar a. SD b. SMP c. SLTA/MA sederajat	112,30% 102,8% 80,8%
		2 Angka Partisipasi Murni: a. SD/MI Sederajat b. SMP Sederajat c. SLTA/ MA Sederajat	90,75% 69,41% 53,98%
		3 Jumlah Perpustakaan a. Formal b. Non formal	140 10
		4. Persentase Tingkat literasi usia > 15 tahun	98,93%
		5. Kurikulum SMK yang diintegrasikan kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri	100%
		6. APK Pendidikan Usia Dini	45%
		7. Rasio tingkat pendidikan dasar yang ditamatkan siswa Gakin	100%
3	Meningkatnya kualitas tenaga kerja	1 Persentase Angka beban tanggungan (Dependency ratio)	44,9
		2 Angka kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja	182
		3 Persentase penggunaan peralatan K3 di perusahaan	85%
		4 Persentase lembaga K3 di perusahaan	70%
		5 jumlah perusahaan yang menerima penghargaan Zero Accident dan SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja)	35
4	Meningkatnya status kesehatan masyarakat	1 UHH	72,3

		2 AKI/AKB:	
		- Angka kematian ibu nifas	102/100.000KH
		- Angka kematian balita	32/ 1000 KH
		- Angka kematian Neonatal	0
		- Persalinan dengan Tenaga kesehatan	87%
		3 Persentase ASI eksklusif	50%
5	Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan kesehatan	1 Jumlah fasilitas kesehatan tingkat I	27 PKM;28 klinik
		2 Jumlah fasilitas kesehatan rujukan	18
		3 Puskesmas perawatan mampu PONED	5 PKM
		4. Persentase produksi sediaan farmasi dan Makanan yang memenuhi standar mutu & distribusi	67%
		5. Presentase puskesmas dalam pelaksanaan PIO (Pelayanan Informasi Obat)	6PKM
		6. Jumlah Fasilitas kesehatan dengan poli kesehatan remaja.	15PKM
		7. Jumlah fasilitas kesehatan santunan lansia	1 PKM
		8 Jumlah jaminan kesehatan	
		a. Jamkesda	150.000 jiwa
		b. JPK OR	1000 jiwa
		c. Gakin	17.360 jiwa
		d. Jamkesmas	93.475 jiwa
		9. Persentase pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100%
		10. Jumlah puskesmas yang memeberikan fasilitas kesehatan rujukan TK.I	27 PKM
6.	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan	1. Jumlah organisasi kepemudaan aktif	56
7.	Meningkatnya kualitas dan prestasi olahraga dan Olahraga Tradisional.	1 Jumlah organisasi Cabang olahraga	45
		2 Jumlah prestasi olahraga	45
		3 Jumlah klub olahraga tradisional	3
8.	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan agama	1 Jumlah prestasi masyarakat dalam lomba bidang keagamaan	45
		2 Jumlah TKA / TPA	330
		3 Jumlah Pembangunan fasilitas keagamaan	113
9.	Meningkatnya kerukunan intradan antar umat beragama	1 Jumlah konflik masyarakat yang berlatar belakang Agama	0
10.	Meningkatnya kualitas pengelolaan UMKM dan Koperasi	1 Jumlah Koperasi Aktif (%)	385
		2 Jumlah UMKM Produktif	14770
		3 Jumlah Produk unggulan	2
11	Meningkatnya kualitas produk UMKM dan Koperasi	1 Jumlah LKM (Lembaga Keuangan Mikro)/ KSP (Koperasi Simpan Pinjam)	12
		2. Jumlah BPR	0
		3. % Kredit Usaha Kecil Menengah	65,46%
12.	Meningkatnya produktivitas Pertanian, Kelautan dan Perikanan	1. Produktivitas Tanaman Panqan dan Hortikultura	58.522,5 ton

		2. Produksi hasil ternak	2.761,35 ton
		3. Produksi Budidaya Perikanan	8.222,8 ton
13.	Meningkatnya pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin	1. Pemerataan pendapatan penduduk berpenghasilan di bawah 40% terendah	16,58%
		2. Persentase penduduk miskin	3,79%
14	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum	1 Jumlah kelompok siskamling aktif	475
		2. Jumlah kelurahan sadar hukum	12
15.	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat	1. Angka partisipasi pemilu	62
16.	Meningkatnya pelayanan dan perlindungan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	1. Jumlah panti sosial dan rehabilitasi yang dikelola Pemerintah dan non pemerintah	1
		2. Jumlah Masyarakat PMKS	549
17	Meningkatnya sistem kewaspadaan dini dan penanggulangan bencana	1. Terbentuknya sistem informasi Peringatan Dini Kejadian Bencana	100%
18	Meningkatnya partisipasi pilar masyarakat/relawan dalam penanggulangan bencana	1. Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat	220
		2. Jumlah Taruna siaga bencana	480
19	Meningkatnya pelayanan administrasi dan perizinan investasi	1. Capaian IKM unit Pelayanan Publik	65
		2. Cakupan kepemilikan Kartu tanda penduduk	87%
		3. Cakupan kepemilikan akte kelahiran	63%
		4. Jumlah investor	75
		5. Jumlah penghargaan citra pelayanan prima	0
20	Meningkatnya cakupan layanan persediaan daya listrik kepada masyarakat	1. Rasio Ketersediaan daya listrik	178.668
21	Berkembangnya kawasan industri dan perdagangan yang berwawasan lingkungan	1. Jumlah luas kawasan terbuka pada lahan industri	0,2%
		2. Persentase Pertumbuhan Industri	4,75%
		3. Kontribusi sektor industry terhadap PDRB	34,22T
		4. Angka PDRB	48,45T
		5. Jumlah Sarana Perdagangan :	46
		6. Jumlah Pasar yang berwawasan lingkungan	300%
		7. Jumlah pasar yang ditingkatkan sarana dan prasarana	7
22	Meningkatnya lapangan usaha dan lapangan kerja	1. Jumlah Unit Usaha	8450
23	Meningkatnya sumber-sumber pendapatan daerah	1. Pajak daerah, Retribusi, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain pendapatan yang sah	51.248.954.189,00
		2. Sumber pembiayaan daerah dari pihak ketiga	4
24	Meningkatnya Kapasitas institusi penyelenggara pelayanan publik	1. SKPD yang menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	13
25	Terlaksananya Reformasi Birokrasi	1. Opini terhadap laporan keuangan daerah	WTP
		2. Nilai akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintahan (AKIP) SKPD	B
		3. Pemenuhan kebutuhan PNS	195
		4. Rasio PNS yang mengikuti diklat teknis	1:09
		5. Rasio PNS yang mengikuti diklat fungsional	1:51
		6. Peningkatan pemanfaatan SIMPEG (Sistem Informasi, Formasi dan Mutasi)	5 Modul
		7. Tingkat kapasitas sumberdaya aparatur (Diklat):	
		a. Diklat PIM II	6
		b. Diklat PIM III	20

		c. Diklat PIM IV	40
26	Meningkatnya manajemen dan fasilitas perlengkapan jalan	1. Jumlah uji kir angkutan umum 2. Jumlah rambu jalan, marka jalan, dan ATCS 3. Pemeliharaan alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL) 4. Panjang jalan kota yang dibangun 5. Panjang jalan yang ditingkatkan 6. Panjang jembatan yang dibangun 7. Panjang jalan yang dipelihara 8. Jumlah perbaikan simpang 9. Panjang trotoar yang ditingkatkan 10. Jumlah halte angkutan umum 11. Jumlah area parkir 12. Jumlah fasilitas pelabuhan/ ruang tunggu	50.000 100,1799m, 14 14 3 km 15 km 50 m 500m 1 titik 350 m 4 21 1
27	Terwujudnya sarana angkutan umum massal	1. Jumlah Angkutan Umum	1922
28	Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih/ air minum	1. Jumlah Produksi IPA 2. Jumlah ketersediaan air baku 3. Persentase rumah tangga pengguna air bersih	1157 1105 73%
29	Tersedianya sistem jaringan dan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) terpadu	1. Cakupan pelayanan air limbah 2. Jumlah instalasi pengolahan Air Limbah (IPAL) terpusat	100% 1
30	Berkurangnya titik/ lokasi banjir dan luas wilayah banjir	1. Jumlah titik lokasi banjir 2. Jumlah bendali/ bozem 3. Panjang normalisasi sungai 4. Panjang saluran drainase permanen (primer, sekunder dan tersier) 5. Panjang saluran drainase pemukiman permanen 6. Panjang saluran drainase permanen (primer, sekunder dan tersier) 7. Jalan inspeksi sungai	0 2 1000m 1000m 5000 2500 1000m
31	Meningkatnya kualitas perumahan dikawasan pemukiman kumuh	1. Jumlah rumah tidak layak huni 2. Persentase kawasan pemukiman kumuh	6747 0,01%
32	Terwujudnya penyedia hunian vertikal (rusunawa dan rusunami)	1. Jumlah rusunami 2. Jumlah rusunawa	1 1
33	Terwujudnya sanitasi sehat yang dapat diakses seluruh lapisan masyarakat	1. Persentase Rumah tinggal bersanitasi	97,15
34	Tersedianya Struktur dan pola ruang yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.	1. Produk hukum tentang rencana tata ruang Kota Balikpapan 2. Jumlah kegiatan sosialisasi Rencana Tata Ruang Kota Balikpapan 3. Tersedianya dokumen-dokumen perencanaan tata ruang	0 34 3
35	Tersedianya Tata ruang pesisir, dan pulau-pulau kecil	Luas wilayah budaya pesisir	10,16
36	Terkendalinya Pemanfaatan ruang	1. Persentase bangunan ber IMB dengan satuan bangunan 2. Persentase kesesuaian pemanfaatan Ruang dengan rencana Tata Ruang 3. Jumlah fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial 4. Jumlah Bangunan Perumahan 5. Luas Wilayah Hutan Lindung	2% 2% 300 654 14.781

		6. Luas Wilayah Ruang Terbuka Hijau	3 Ha
37	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam program Keluarga Berencana	1. Akseptor aktif	70.096
		2. Prevalensi Rate	74,90
		3. Persentase partisipasi Gakin untuk berKB	75,03
		4. Tingkat kelestarian ber KB	
		a. 10 tahun	5,878
		b. 15 tahun	2,803
		c. 20 tahun	313
38	Meningkatnya pemanfaatan teknologi tepat guna	1. Jumlah inovasi Teknologi Tepat Guna	3
39	Meningkatnya kemampuan perempuan dalam keluarga dan lingkungan kerja	1. Partisipasi Perempuan di lembaga pemerintah	3420
		2. Rasio Pejabat PNS Perempuan dan laki-laki	10:13
		3. Partisipasi angkatan kerja perempuan	46,07
		4. menurunnya kasus kasus kekerasan dalam rumah Tangga	30
40	Meningkatnya kualitas anak	1. Jumlah prestasi anak:	
		a. tingkat propinsi	152
		b. tingkat nasional	52
		c. tingkat internasional	2
		2. Jumlah PAUD	200
		3. Jumlah TK	138
		4. Jumlah anak terlantar	25
41	Terwujudnya peningkatan pelestarian dan pengembangan kawasan hutan, lahan dan DAS	5. Angka kekerasan dan eksploitasi anak dibawah umur	10
		6. Angka anak jalanan	20
		7. Jumlah fasilitas bermain anak	72
		1. Luas kawasan hutan	16.809,49 Ha
		2. Luas rehabilitasi kawasan hutan	50 Ha
		3. Jumlah kegiatan Pengamanan kawasan hutan	2,35
		4. Luas Konservasi kawasan mangrove	10 Ha
5. Luas Hutan kota yang terehabilitasi dan tidak bermasa	5 Ha		
6. Luas Hutan Kota yang sudah di pagar	5 Ha		
7. Luas hutan kota	5Ha		
8. Persentase terbangunnya Kebun Raya	40%		
9. Persentase Ruang Terbuka hijau publik dan privat	37%		
10. Luas lahan Pemakaman	294.671m		
11. Jumlah DAS yang termonitoring	7		
12. Jumlah rekomendasi untuk ijin pengguna air tanah	25		
13. Luasan penanaman Pohon	50.000		
14. Angka data keanekaragaman hayati	30%		
15. luas lokasi percontohan KEHATI	1 Ha		
42	Meningkatnya kebersihan dan keindahan kota	1. Cakupan pelayanan persampahan	100%
		2. Volume Pengelolaan sampah melalui pengangkutan ke TPA	195.548,02
		3. Jumlah sarana dan prasarana TPA	4 unit
		4. Luas bangunan TPA	29,1 Ha
		5. Jumlah Kerja Bakti Massal	12 kali
43	Meningkatnya upaya pelestarian lingkungan hidup melalui pendidikan dan peran serta aktif masyarakat	1. Persentase pengelolaan Gas Buang industri	-
		2. Jumlah stasiun monitoring udara beroperasi dan kondisi baik	3
		3. Jumlah kendaraan yang telah mengikuti uji emisi	1500
		4. Jumlah sumber tidak bergerak (industri, dll) yang telah dipantau tentang emisi cerobong	5

		5. Persentase Badan usaha yang telah memiliki dokumen lingkungan (UKL/UPL atau Amdal)	80
		6. Persentase Usaha/industri yang menaati peraturan pembuangan air limbah	100%
		7. Persentase Usaha yang telah memiliki izin pengelolaan limbah B3	100%
		8. Persentase Pengendalian pada sumber pencemar memenuhi baku mutu	40%
		9. Persentase Badan usaha yang telah memiliki sertifikasi hijau (Proper)	14
		10. Persentase Peran aktif masyarakat dan pendidikan dalam pengelolaan lingkungan hidup	100%
		11. Jumlah sarana dan prasarana 3R dan sarana persampahan RT yang terintegrasi mulai dari sumber sampai dengan TPA	65 bank sampah
		12. Jumlah Penyuluhan LH kepada masyarakat	12 kegiatan
44	Meningkatnya upaya pelestarian seni dan budaya yang ada di Kota Balikpapan	1. Jumlah grup seni dan budaya	76
		2. Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	3
		3. Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	5
		4. Jumlah sarana gedung seni dan budaya	2
		5. Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	15
45	Meningkatnya kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata	1. Jumlah wisata nusantara	599.968
		2. Jumlah wisata mancanegara	64.848
		3. Jumlah destinasi/obyek wisata	13 ow
46	Berkembangnya usaha-usaha pendukung kepariwisataan	Jumlah usaha pendukung kepariwisataan	734

Jumlah Anggaran Tahun 2013 : Rp. 3.167.626.103.188,43

Balikpapan, November 2013

WALIKOTA BALIKPAPAN

M. RIZAL EFFENDI

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2013

KOTA
TAHUN ANGGARAN

: BALIKPAPAN
: 2013

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	(%)	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Meningkatnya kualitas/mutu pendidikan	1 Jumlah Tenaga Pendidik yang bersertifikat profesi	750	488	65,07	Rp 187.190.000,00	Rp 76.286.800,00	40,75		
		2 Persentase capaian SPM pendidikan tingkat dasar	100%	98%	98	Rp 125.000.000,00	Rp 104.964.216,00	83,97		
		3 Persentase capaian SPM pendidikan tingkat menengah	100%	98%	98					
		4 Angka putus sekolah				Rp 75.000.000,00	Rp 42.192.400,00	56,26		
		a. SD	0,80%	0,92%	85					
b. SMP Sederajat	5,79%	6,38%	89,80							
		c. SLTA Sederajat	27,21%	29,02%	93,30					
		5 Jumlah sekolah standar nasional								
		a. SD	9	9	100					
		b. SMP Sederajat	10	12	120					
2	Meningkatnya aksesibilitas memperoleh pendidikan dan meningkatnya pelayanan pendidikan Bagi masyarakat miskin	1 Persentase Angka Partisipasi Kasar				Rp 1.000.000.000,00	Rp 829.457.900,00	82,95		
		a. SD	112,30%	112,30%	100					
		b. SMP	102,8%	102,80%	100,00					
				c. SLTA/MA sederajat	80,80%	80,80%	100			
				2 Angka Partisipasi Murni:				Rp 500.000.000,00	Rp 488.186.000,00	97,64
				a. SD/MI Sederajat	90,75%	90,75%	100			
				b. SMP Sederajat	69,41%	69,41%	100			
				c. SLTA/ MA Sederajat	53,98%	53,98%	100			
				3 Jumlah Perpustakaan				Rp 3.000.000.000,00	Rp 2.438.478.000,00	81,28
				a. Formal	140	140	100			
				b. Non formal	10	17	170			
				4. Persentase Tingkat literasi usia > 15 tahun	98,95%	98,95%	100,00			
				5. Kurikulum SMK yang diintegrasikan kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri	100%	100%	100	Rp 100.000.000,00	Rp 8.656.000,00	8,66
		6. APK Pendidikan Usia Dini	45%	57,12%	126,93	Rp 82.000.000,00	Rp 69.163.500,00	84,35		

		7. Rasio tingkat pendidikan dasar yang ditamatkan siswa Gakin	100%	100%	100	Rp 145.000.000,00	Rp 117.917.115,00	81,32
3	Meningkatnya kualitas tenaga kerja	1. Persentase Angka beban tanggungan (Dependency ratio)	44,9	44,9	100	Rp 5.928.879.795,00	Rp 3.281.359.515,00	55,35
		2. Angka kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja	182	173	95,05			
		3. Persentase penggunaan peralatan K3 di perusahaan	85%	67%	78,82			
		4. Persentase lembaga K3 di perusahaan	70%	66%	94,29			
		5. jumlah perusahaan yang menerima penghargaan Zero Accident dan SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja)	35	36	102,86			
4	Meningkatnya status kesehatan masyarakat	1. UHH	72,3	72,3	100			
		2. AKI/AKB:				Rp 400.000.000,00	Rp 347.996.000,00	87,00
		- Angka kematian ibu nifas	102/100.000KH	88/100.000kh	113,73			
		- Angka kematian balita	32/ 1000 KH	12/1000KH	162,5			
- Angka kematian Neonatal	-	8/1000KH	107,84					
- Persalinan dengan Tenaga kesehatan	87%	93,82%						
3. Persentase ASI eksklusif	50%	69,10%	138,20	Rp 242.784.100,00	Rp 232.039.503,00	95,57		
5	Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan kesehatan	1. Jumlah fasilitas kesehatan tingkat I	27 PKM;28 klinik	27 pkm; 28 klinik	100	-	-	-
		2. Jumlah fasilitas kesehatan rujukan	18	17	94,44	-	-	-
		3. Puskesmas perawatan mampu PONED	5 PKM	6 PKM	120	-	-	-
		4. Persentase produksi sediaan farmasi dan Makanan yang memenuhi standar mutu & distribusi	67%	70%	104	Rp 235.940.000,00	Rp 125.097.000,00	53,02
		5. Presentase puskesmas dalam pelaksanaan PIO (Pelayanan Informasi Obat)	6PKM	8 PKM	133,33	-	-	
		6. Jumlah Fasilitas kesehatan dengan poli kesehatan remaja.	15PKM	12 PKM	80	Rp 25.000.000,00	Rp 19.509.520,00	78,04
		7. Jumlah fasilitas kesehatan santunan lansia	1 PKM	1PKM	100	Rp 135.395.000,00	Rp 95.249.650,00	70,35
		8. Jumlah jaminan kesehatan						
		a. Jamkesda	150.000 jiwa	116387 jiwa	77,59	Rp 29.200.000.000,00	Rp 22.533.975.074,86	77,17
		b. JPK OR	1000 jiwa	1000 jiwa	100	Rp 800.000.000,00	Rp 708.361.142,03	88,55
		c. Gakin	17360 jiwa	17360 jiwa	100	Rp 4.500.000.000,00	Rp 1.780.876.134,68	39,58
		d. Jamkesmas	93475 jiwa	87673 jiwa	93,79	Rp 842.980.000,00	Rp 215.634.164,00	25,58

		9. Persentase pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100%	4,96%	4,96	Rp 4.500.000.000,00	Rp 1.780.876.134,68	39,58
		10. Jumlah puskesmas yang mem berikan fasilitas kesehatan rujukan TK.I	27 PKM	27 pkm	100	Rp 5.936.318.487,00	Rp 5.246.580.184,00	88,38
6.	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan	1. Jumlah organisasi kepemudaan aktif	56	56	100	Rp 46.751.500,00	Rp 25.394.500,00	54,32
7.	Meningkatnya kualitas dan prestasi olahraga dan Olahraga Tradisional.	1 Jumlah organisasi Cabang olahraga	45	45	100	Rp 5.091.148.500,00	Rp 4.454.686.549,00	87,50
		2 Jumlah prestasi olahraga	45	45	100			
		3 Jumlah klub olahraga tradisional	3	3	100			
8.	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan agama	1 Jumlah prestasi masyarakat dalam lomba bidang keagamaan	45	33	73	Rp 1.154.265.000,00	Rp 578.969.060,00	50,16
		2 Jumlah TKA / TPA	330	330	100			
		3. Jumlah Pembangunan Fasilitas keagamaan	113	113	100			
9.	Meningkatnya kerukunan intradan antar umat beragama	1 Jumlah konflik masyarakat yang berlatar belakang Agama	0	0	0			
10.	Meningkatnya kualitas pengelolaan UMKM dan Koperasi	1 Jumlah Koperasi Aktif (%)	385	410	106,49	Rp 1.069.075.000,00	Rp 1.034.773.500,00	96,79
		2 Jumlah UMKM Produktif	14770	19017	129	Rp 442.168.000,00	Rp 257.106.500,00	58,15
		3 Jumlah Produk unggulan	2	2	100	Rp 726.448.500,00	Rp 510.407.051,00	70,26
11	Meningkatnya kualitas produk UMKM dan Koperasi	1 Jumlah LKM (Lembaga Keuangan Mikro)/ KSP (Koperasi Simpan Pinjam)	12	15	125	Rp 1.223.466.119,00	Rp 1.110.119.507,00	90,74
		2. Jumlah BPR	0	0	0			
		3. % Kredit Usaha Kecil Menengah	65,46%	65,46%	100			
12.	Meningkatnya produktivitas Pertanian, Kelautan dan Perikanan	1. Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura	58.522,5 ton			Rp 2.827.564.000,00	Rp 2.629.672.225,00	93,00
		2. Produksi hasil ternak	2761,35 ton			Rp 4.040.026.350,00	Rp 3.598.867.437,00	89,08
		3. Produksi Budidaya Perikanan	8.222,2 ton			Rp 8.707.130.000,00	Rp 7.255.777.350,00	83,33
13.	Meningkatnya pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin	1. Pemerataan pendapatan penduduk berpenghasilan di bawah 40% terendah	16,58%	16,58%	100			
		2. Persentase penduduk miskin	3,79%	3,79%	100			
14	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum	1 Jumlah kelompok siskamling aktif	475	475	100			
		2. Jumlah kelurahan sadar hukum	12	12	100	Rp 107.150.000,00	Rp 82.128.400,00	76,65
15.	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat	1. Angka partisipasi pemilu	62%	62,25%	100,4	Rp 1.104.265.000,00	Rp 538.274.000,00	49
16.	Meningkatnya pelayanan dan perlindungan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	1. Jumlah panti sosial dan rehabilitasi yang dikelola Pemerintah dan non pemerintah	1	0	0	Rp 2.634.916.415,00	Rp 1.279.345.815,00	48,55
		2. Jumlah Masyarakat PMKS	549	490	110			

26	Meningkatnya manajemen dan fasilitas perlengkapan jalan	1. Jumlah uji kir angkutan umum	50000	51995	103,99	Rp	1.141.000.000,00	Rp	995.350.225,00	87,23
		2. Jumlah rambu jalan	100	100	100					
		marka jalan	1799 m	1799 m	100					
		ATCS	14	14	100	Rp	2.093.500.400,00	Rp	1.897.482.773,00	90,64
		3. Pemeliharaan alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL)	14	14	100					
		4. Panjang jalan kota yang dibangun	3 km	7,9 km	263	Rp	61.836.845.600,00	Rp	52.533.961.840,00	84,96
		5. Panjang jalan yang ditingkatkan	15 km	32,8 km	218,66	Rp	47.210.501.822,00	Rp	59.341.510.652,40	125,70
		6. Panjang jembatan yang dibangun	5 bh	6 bh	120	Rp	18.670.023.700,00	Rp	13.921.565.400,00	74,57
		7. Panjang jalan yang dipelihara	500m	625,8m	125	Rp	2.500.000.000,00	Rp	8.116.684.000,00	324,67
		8. Jumlah perbaikan simpang	1 titik	1 titik	100	Rp	2.662.324.200,00	Rp	2.106.542.200,00	79,12
		9. Panjang trotoar yang ditingkatkan	350 m	350 m	100	Rp	10.083.468.000,00	Rp	4.497.070.200,00	44,60
		10. Jumlah halte angkutan umum	4	0	0	Rp	400.000.000,00	-	-	
11. Jumlah area parkir	21	21	100	Rp	764.402.000,00	Rp	671.213.250,00	87,81		
12. Jumlah fasilitas pelabuhan/ ruang tunggu	1	1	100	Rp	75.000.000,00	Rp	50.788.825,00	67,72		
27	Terwujudnya sarana angkutan umum massal	1. Jumlah Angkutan Umum	1922	1922	100	-	-	-	-	
28	Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih/ air minum	1. Jumlah Produksi IPA	1157	1157	100					
		2. Jumlah ketersediaan air baku	1105	1105	100		-	-		
		3. Persentase rumah tangga pengguna air bersih	73%	73%	100					
29	Tersedianya sistem jaringan dan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) terpadu	1. Cakupan pelayanan air limbah	100%	100%	100		-	-		
		2. Jumlah instalasi pengolahan Air Limbah (IPAL) terpusat	1	1	100		-	-		
30	Berkurangnya titik/ lokasi banjir dan luas wilayah banjir	1. Jumlah titik lokasi banjir	55	55	100		-	-	-	
		2. Jumlah bendali/ bozem	1 bh	7 bh	700	Rp	4.222.000.000,00	Rp	3.371.342.000,00	79,85
		3. Panjang normalisasi sungai	1000m	0	0	Rp	4.760.100.000,00	Rp	2.440.316.165,00	51,27
		4. Panjang saluran drainase permanen (primer, sekunder dan tersier)	2500m	3136,25m	125,45	Rp	14.659.888.000,00	Rp	10.523.240.284,00	71,78
		5. Panjang saluran drainase pemukiman permanen	5000 m	3093,67 m	61,87	Rp	9.272.760.000,00	Rp	6.588.342.000,00	71,05
		6. Panjang saluran drainase permanen (primer, sekunder dan tersier)	2000 m	4702,63 m	235	Rp	19.017.141.000,00	Rp	12.411.219.000,00	65,26
		7. Jalan inspeksi sungai	1000 m	0	0		-	-		
31	Meningkatnya kualitas perumahan dikawasan pemukiman kumuh	1. Jumlah rumah tidak layak huni	6747	6782	99,48	Rp	1.145.387.600,00	Rp	1.130.837.440,00	98,73
		2. Persentase kawasan pemukiman kumuh	0,01%	0,01%	100	Rp	697.550.000,00	Rp	652.736.660,00	93,58
32	Terwujudnya penyedia hunian vertikal (rusunawa dan rusunami)	1. Jumlah rusunami	1	0	0		-	-		
		2. Jumlah rusunawa	0	2	200		-	-		
33	Terwujudnya sanitasi sehat yang dapat diakses seluruh lapisan masyarakat	1. Persentase Rumah tinggal bersanitasi	97,15	97,15	100					

34	Tersedianya Struktur dan pola ruang yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.	1. Produk hukum tentang rencana tata ruang Kota Balikpapan	0	0	0	-	-	
		2. Jumlah kegiatan sosialisasi Rencana Tata Ruang Kota Balikpapan	34	34	100	-	-	
		3. Tersedianya dokumen-dokumen perencanaan tata ruang	3	4	133	Rp 704.106.400,00	Rp 551.060.470,00	78,26
35	Tersedianya Tata ruang pesisir, dan pulau-pulau kecil	Luas wilayah budaya pesisir	10,16	10,33	101			
36	Terkendalinya Pemanfaatan ruang	1. Persentase bangunan ber IMB dengan satuan bangunan	2%	2,90%	145	Rp 752.880.000,00	Rp 519.573.786,00	69,01
		2. Persentase kesesuaian pemanfaatan Ruang dengan rencana Tata Ruang	2%	2%	100	Rp 1.050.000.000,00	Rp 554.251.716,00	52,79
		3. Jumlah fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial	300	472	157			
		4. Jumlah bangunan Perumahan	654	154	23,5			
		5. Luas wilayah Hutan lindung	14.781	14.781	100			
		6. Luas wilayah ruang terbuka hijau (RTH)	3 Ha	3 Ha	100			
37	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam program Keluarga Berencana	1. Akseptor aktif	70.096	83.728	119	Rp 501.032.000,00	Rp 432.743.875,00	86,37
		2. Prevalensi Rate	74,90	75,25	100,47	-	-	
		3. Persentase partisipasi Gakin untuk berKB	75,03	75,03	100	Rp 110.086.000,00	Rp 87.983.700,00	79,92
		4. Tingkat kelestarian ber KB						
		a. 10 tahun	5,878	5,886	100,14	Rp 446.925.000,00	Rp 411.948.550,00	92,17
b. 15 tahun	2,803	2,845	101,50					
c. 20 tahun	313	316	100,96					
38	Meningkatnya pemanfaatan teknologi tepat guna	1. Jumlah inovasi Teknoloqi Tepat Guna	3	5	166,67	Rp 59.950.000,00	Rp 48.053.000,00	80,16
39	Meningkatnya kemampuan perempuan dalam keluarga dan lingkungan kerja	1. Partisipasi Perempuan di lembaga pemerintah	3420	3420	100	-	-	
		2. Rasio Pejabat PNS Perempuan dan laki-laki	10:13	10:13	100	-	-	
		3. Partisipasi angkatan kerja perempuan	46,07	46,07	100			
		4. menurunnya kasus kasus kekerasan dalam rumah Tangga	30	38	73,33	Rp 228.576.000,00	Rp 57.987.700,00	25,37
40	Meningkatnya kualitas anak	1. Jumlah prestasi anak:						
		a. tingkat propinsi	152	152	100	Rp 75.000.000,00	Rp 35.775.475,00	47,70
		b. tingkat nasional	52	52	100	Rp 1.672.000.000,00	Rp 941.127.000,00	56,29
		c. tingkat internasional	2	2	100	-	-	-
		2. Jumlah PAUD	200	200	100	Rp 4.384.800.000,00	Rp 3.078.000.000,00	70,20
		3. Jumlah TK	137	137	100	Rp 90.000.000,00	Rp 88.108.530,00	97,90
		4. Jumlah anak terlantar	25	25	100	-	-	
		5. Angka kekerasan dan eksploitasi anak dibawah umur	10	22	220			
6. Angka anak jalanan	20	20	100	-	-			
7. Jumlah fasilitas bermain anak	72	72	100					

41	Terwujudnya peningkatan pelestarian dan pengembangan kawasan hutan, lahan dan DAS	1. Luas kawasan hutan	16809,49 Ha	16809,49 Ha	100	-	-	
		2. Luas rehabilitasi kawasan hutan	50 Ha	50 Ha	100	-	-	
		3. Jumlah kegiatan Pengamanan kawasan hutan	2,35 km	2,35 km	100	-	-	
		4. Luas Konservasi kawasan mangrove	10 Ha	10 Ha	100	-	-	
		5. Luas Hutan kota yang terehabilitasi dan tidak bermasalah	5Ha	5Ha	100	-	-	
		6. Luas Hutan Kota yang sudah di pagar	5 Ha	5 Ha	100	-	-	
		7. Luas hutan kota	5 Ha	5 Ha	100	-	-	
		8. Persentase terbangunnya Kebun Raya	40%	40%	100	Rp 2.000.000.000,00	Rp 1.766.680.950,00	88,33
		9. Persentase Ruang Terbuka hijau publik dan privat	37	37	100	-	-	
		10 Luas lahan Pemakaman	294671	278844	94,6	Rp 24.048.339.640,00	Rp 18.181.950.760,00	75,61
		11. Jumlah DAS yang termonitoring	7	7	100	Rp 124.850.000,00	Rp 109.559.350,00	87,75
		12. Jumlah rekomendasi untuk ijin pengguna air tanah	25	44	176	-	-	
		13. Luasan penanaman Pohon	50.000	40.460	80,92	-	-	
		14. Angka data keanekaragaman hayati	30%	30%	100	Rp 473.643.800,00	Rp 410.147.200,00	86,59
		15. luas lokasi percontohan KEHATI	1 Ha	1 Ha	100	-	-	
42	Meningkatnya kebersihan dan keindahan kota	1. Cakupan pelayanan persampahan	100%	98%	98	Rp 14.737.984.880,00	Rp 11.884.191.483,00	80,64
		2. Volume Pengelolaan sampah melalui pengangkutan ke TPA	195548,02	123.664,87	63	Rp 14.737.984.880,00	Rp 11.884.191.483,00	80,64
		3. Jumlah sarana dan prasarana TPA	4 unit	5 unit	125	Rp 13.320.400.000,00	Rp 11.998.416.000,00	90,08
		4. Luas bangunan TPA	29,1 Ha	27,1 Ha	93	Rp 24.048.339.640,00	Rp 18.181.950.760,00	75,61
		5. Jumlah Kerja Bakti Massal	12 kali	10 kali	83,33	-	-	
43	Meningkatnya upaya pelestarian lingkungan hidup melalui pendidikan dan peran serta aktif masyarakat	1. Persentase pengelolaan Gas Buang industri	-	-	-	-	-	
		2. Jumlah stasiun monitoring udara beroperasi dan kondisi baik	3	2	66,66	Rp 392.634.400,00	Rp 272.440.450,00	69,39
		3. Jumlah kendaraan yang telah mengikuti uji emisi	1500	2032	135%	Rp 117.504.000,00	Rp 113.463.500,00	96,56
		4. Jumlah sumber tidak bergerak (industri, dll) yang telah dipantau tentang emisi cerobong	5	5	100	Rp 65.307.600,00	Rp 62.840.850,00	96,22
		5. Persentase Badan usaha yang telah memiliki dokumen lingkungan (UKL/UPL atau Amdal)	80	107	133,75	Rp 200.000.000,00	Rp 166.031.350,00	83,02
		6. Persentase Usaha/industri yang menaati peraturan pembuangan air limbah	100	100	100	-	-	
		7. Persentase Usaha yang telah memiliki izin pengelolaan limbah B3	100	100	100	Rp 66.925.000,00	Rp 24.362.700,00	36,40
		8. Persentase Pengendalian pada sumber pencemar memenuhi baku mutu	40%	40%	100	Rp 181.850.000,00	Rp 166.541.450,00	91,58
		9. Persentase Badan usaha yang telah memiliki sertifikasi hijau (Proper)	14	10	71,43	Rp 66.245.000,00	Rp 20.952.500,00	31,63
		10. Persentase Peran aktif masyarakat dan pendidikan dalam pengelolaan lingkungan hidup	100	93	93	Rp 82.850.000,00	Rp 79.496.000,00	95,95
		11. Jumlah sarana dan prasarana 3R dan sarana persampahan RT yang terintegrasi mulai dari sumber sampai dengan TPA	65 bank sampah	65 bank sampah	100	-	-	

		12. Jumlah Penyuluhan LH kepada masyarakat	12 Keg	12 Keg	100	Rp 220.297.500,00	Rp 142.724.100,00	64,79
44	Meningkatnya upaya pelestarian seni dan budaya yang ada di Kota Balikpapan	1. Jumlah grup seni dan budaya	76	80	105	Rp 6.680.776.920,00	Rp 3.899.522.291,00	58,37
		2. Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	3	4	133,33			
		3. Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	5	8	160			
		4. Jumlah sarana gedung seni dan budaya	2	-	0			
		5. Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	15	25	166,67			
45	Meningkatnya kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata	1. Jumlah wisata nusantara	599.968	616.252	103	Rp 1.367.000.000,00	Rp 1.267.563.032,00	92,73
		2. Jumlah wisata mancanegara	64.848	27.423	42,29			
		3. Jumlah destinasi/obyek wisata	13 ow	14 ow	108			
46	Berkembangnya usaha-usaha pendukung kepariwisataan	Jumlah usaha pendukung kepariwisataan	734	734	100	Rp 2.542.642.000,00	Rp 2.327.853.573,00	91,55

Balikpapan, Februari 2014

WALIKOTA BALIKPAPAN

H. M. RIZAL EFFENDI